



**Ali Maksum, Ph.D.** lahir di Ponorogo Jawa Timur adalah alumni TA PSM Bogem, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bogem Sampung Ponorogo, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sampung Ponorogo, Sekolah Menengah Umum 2 (SMU 2) Ponorogo, Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia, dan Universiti Sains Malaysia (USM) Penang Malaysia. Saat ini bekerja dan tinggal di Yogyakarta sebagai pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pernah menjadi peneliti untuk *Japan-Related Research Project*, The Sumitomo Foundation Japan. Menjadi *Visiting Scholar* di *National Chengchi University Taiwan* didanai *2018 Taiwan Fellowship*. Tulisannya banyak dimuat di media nasional misalnya *The Jakarta Post*, Koran Sindo, Jawa Pos termasuk jurnal nasional dan internasional.



## POTRET DEMOKRASI

DI ASIA TENGGARA PASCA PERANG DINGIN:

*Analisa, Dinamika, dan Harapan*

ISBN 978-602-6941-32-9



9 786026 194132 9



Ali Maksum

POTRET DEMOKRASI DI ASIA TENGGARA PASCA PERANG DINGIN :  
Analisa, Dinamika, dan Harapan

Ali Maksum, Ph.D.



# POTRET DEMOKRASI DI ASIA TENGGARA PASCA PERANG DINGIN:

*Analisa, Dinamika, dan Harapan*

**Ali Maksum**

**POTRET  
DEMOKRASI  
DI ASIA TENGGARA  
PASCA PERANG DINGIN:**

Analisa, Dinamika, dan Harapan



*The Pustaka Press*

POTRET DEMOKRASI DI ASIA TENGGARA  
PASCA PERANG DINGIN:

Analisa, Dinamika dan Harapan

© Ali Maksum, 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

*All rights reserved*

---

xvi + 219 hlm; 145 x 210 mm

Cetakan I, September 2018

ISBN: 978-602-6941-32-9

---

Penulis: Ali Maksum

Editor: Ahmad Sahide, Nur Alam Amjar

Pewajah sampul: Team The Phinisi Press

Pewajah isi: Team The Phinisi Press

Penyunting: Nur Alam Amjar

---

Copyright © 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara  
elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy,  
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya  
tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Diterbitkan Oleh:

The Phinisi Press Yogyakarta

Jalan Nitipuran No. 313 Yogyakarta

Nomor telepon : 085292039650

Alamat e-mail : thephinisipress@yahoo.com

## KATA PENGANTAR

PUJI syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini sesuai target. Ide awal penulisan buku ini adalah dinamika terkini politik dan demokrasi di Asia Tenggara yang terus-menerus berproses tidak ada habisnya. Fakta pula bahwa di Asia Tenggara adalah tempat di mana mayoritas umat Islam berada. Meskipun situasinya tidak separah di Timur Tengah, namun tetap saja ada upaya-upaya untuk medegredasikan umat Islam baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Implikasinya, terjadi berbagai eskalasi konflik baik sekala kecil maupun sekala besar seperti di Selatan Thailand dan Marawi di Filipina.

Hal ini muncul akibat perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah berkuasa kepada kelompok Islam. Walaupun, dalam narasi umat Islam dua dekade kebelakang cenderung dipresentasikan secara negatif misalnya lekat dengan terorisme dan anti-demokrasi, apa yang terjadi di Indonesia dan Malaysia membalikkan tesis tersebut. Umat Islam menunjukkan tidak ada benturan antara Islam dan demokrasi. Dengan segala kekurangan, buku ini sangat layak untuk dikritik termasuk mengapa penulis selalu menghubungkan dengan nasib umat

Islam di negara terkait. Ini tidak lain sebagai ijtihad penulis agar “rasa keadilan” itu muncul dan tercipta sebuah tatanan yang sejahtera untuk semua kalangan.

Dalam konteks Asia Tenggara, umat Islam umumnya tidak menginginkan menjadi “pemerintahan absolut”, namun lebih pada keadilan untuk semua kalangan apapun agama dan sukunya. Tetapi, fakta bahwa upaya-upaya “mengkebiri” umat Islam memunculkan sikap keras sebagian kelompok mengatas namakan “umat Islam” sehingga melakukan aksi-aksi kekerasan. Oleh karena itu, kultur Islam dan demokrasi di Asia Tenggara harus dipelihara dengan baik agar tercipta keadilan untuk semua masyarakat. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya buku ini. Pertama, Rektor UMY yang dengan “SK” nya memaksa penulis aktif menulis, tetapi ini merupakan sebuah anugerah sekaligus cambuk. Kedua, kolega di Program Studi Hubungan Internasional dan Magister Ilmu Hubungan Internasional UMY. Ketiga, *Taiwan Fellowship Program 2018* yang dengan program ini penulis bisa “bertapa” menyelesaikan buku ini. Keempat, “pertapaan” ini juga didukung oleh Mas Ahmad Syauki (Mas Yoki) dan keluarga, Andi Azhar, Nasaruddin, Mbak Yuli, dan Mbak Shely di Taiwan. Terakhir tapi bukan yang terakhir adalah Ibu dan Ibu mertua serta saudara-saudara penulis dan isteri penulis Anieke Muflihah, S.S., juga Azfar Mirza Noh sudah berkorban waktu dan kesempatan. Semoga semuanya mendapat ridho Allah SWT.

Taipei, 2018

Ali Maksum

# MEMBACA DINAMIKA BERDEMOKRASI DI ASIA TENGGARA (Catatan Pengantar)

*Ahmad Sahide*

DEMOKRASI bukanlah kosa kata yang baru, istilah ini sudah muncul sebelum kita memasuki kalender Masehi. Menurut sebagian teoritikus politik, ide filosofis demokrasi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno dengan adanya negara kota (polis) di Athena pada abad ke-4 dan ke-5 SM. Sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk yang juga tidak banyak sehingga memungkinkan warga Athena bertemu setidaknya empat puluh kali dalam setahun untuk membahas persoalan-persoalan publik. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari prinsip demokrasi secara langsung yang dijalankan secara partisipatoris (Ketchum, 2004: Vii-Viii).

Namun demikian, tidak semua negara di dunia menerapkan sistem politik yang demokratis. Amerika Serikat dikenal sebagai negara kampiun demokrasi di dunia dan aktif mengampanyekan demokrasi sebagai sistem politik global. Demokrasi sebagai bagian dari wacana global yang datangnya dari Barat. Tidak heran jika ada kelompok yang

skeptis dan memandang demokrasi sebagai wacana yang tentu saja tidak mungkin sesuai dengan budaya lain di luar Barat. Bahkan ada yang menganggap bahwa demokrasi merupakan cangkokan dari Barat, dan bagian dari proyek imperialisme Barat (Westernisasi) yang terselubung dengan retorika yang manis, enak, dan menarik (Hakim, 2016).

Hal inilah yang memunculkan perdebatan mengenai demokrasi, terutama di dunia Islam. Ada pandangan yang melihat demokrasi tidak sesuai dengan tradisi Islam, tetapi juga ada pandangan yang melihat demokrasi dan Islam tidak bertentangan. Perdebatan itu masih berlangsung hingga saat ini, termasuk di Indonesia yang sudah menerapkan demokrasi pasca lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Terlebih hari ini, setelah daur ulang demokrasi di negeri kampiun demokrasi dunia yang memenangkan Donald Trump sebagai Presiden AS. Dan juga hasil referendum Inggris yang mana suara mayoritas rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah Brexit. Demokrasi kemudian semakin disanksikan oleh publik sebagai sistem politik terbaik dari yang ada.

Ali Maksum, Ph.D, salah satu dosen produktif S1 dan S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan kontribusi penting dengan bukunya yang memotret perkembangan dan dinamika demokrasi di Asia Tenggara. Bukan perdebatannya yang ditulis, melainkan implementasinya di empat negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Kehadiran buku ini sangat penting karena mencoba mengurai perkembangan demokrasi di negara dengan kultur dan agama yang berbeda. Indonesia dan Malaysia, misalnya adalah dua negara di mana Islam sebagai mayoritas tetapi praktik berdemokrasinya berbeda. Rupanya tidak salah jika mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia, tetapi Malaysia lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia.

Praktik demokrasi di Philipina dan Thailand menghardirkan cerita dan dinamika berbeda. Philipina dapat dikatakan sebagai salah satu negara di ASEAN dengan sistem demokrasi yang relatif bagus tetapi juga tidak terlepas dari beberapa masalah yang disorot dunia internasional, terutama di Philipina Selatan, menyangkut umat Islam sebagai warga minoritas. Selain itu, tingkat korupsi di negara ini juga tergolong cukup tinggi meskipun dengan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik.

Thailand ini menerapkan demokrasi tetapi selalu diwarnai peralihan kekuasaan secara tidak sah. Tercatat dalam sejarah Thailand modern, sudah terjadi kurang lebih 11 kali kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Taksin Sinawatra dan keluarganya termasuk yang banyak disorot karena dia adalah figur yang populer di mata rakyat tetapi berhasil digulingkan oleh militer dengan dukungan raja.

Dinamika berdemokrasi di empat negara ASEAN inilah yang diulas dengan sangat baik oleh Ali Maksum, Ph.D. dalam bukunya yang berjudul *Potret Demokrasi di Asia Tenggara Pasca Perang Dingin*. Robert W. Hefner sudah lama



meneorikan bahwa jalan menuju demokrasi dan pluralisme *civic* harus bervariasi. Seturut Hefner, demokrasi tidak hanya cocok di dunia Barat. Demokrasi hadir dengan beragam bentuk yang menyesuaikan dengan kemiripan keluarga (Hefner, 2007). Buku ini membuktikan teori dari Hefner tersebut di mana demokrasi di empat negara Asia Tenggara hadir dengan bentuk yang beragam.

Yogyakarta, Oktober 2018

**Ahmad Sahide**

Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional UMY

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Catatan Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan .....	xi
<b>BAB 1: Demokrasi dan Asia Tenggara .....</b>	<b>1</b>
» Tentang Demokrasi.....	3
» Demokrasi di Asia Tenggara Era Kolonialisme ..	7
» Demokrasi di Asia Tenggara Pasca Perang Dunia Ke-II.....	15
» Demokrasi di Asia Tenggara Era Perang Dingin	15
» Kesimpulan .....	26
<b>BAB 2: Demokrasi dan Indonesia Pasca Perang</b>	
<b>Dingin: Reformasi dan Liberalisasi .....</b>	<b>29</b>
» Indonesia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin .	29
» Politik Pasca Reformasi 1998 .....	37
» Politik Pasca Pemilu 2004 .....	42
» Masa Depan dan Posisi Politik Umat Islam .....	53
» Kesimpulan .....	61

<b>BAB 3: Demokrasi dan Malaysia Pasca Perang Dingin:</b>	
<b>Isu Reformasi dan Dominasi Politik Melayu .....</b>	<b>65</b>
» Malaysia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin ...	66
» Malaysia, Goncangan Reformasi dan Keberhasilan Keluar Krisis .....	74
» Malaysia Pasca Mahathir Mohamad .....	77
» Seputar Kasus 1MDB dan Implikasinya .....	83
» Malaysia dan Politik Umat Islam .....	88
» Kesimpulan .....	97
<b>BAB 4: Demokrasi dan Politik Filipina Pasca Perang Dingin: Kontestasi Antar Elit, <i>Civil Society</i> dan Mindanao .....</b>	<b>99</b>
» Filipina dan Geopolitik Pasca Perang Dingin .....	100
» Filipina dan Demokrasi Pasca Perang Dingin ...	103
» Manila dan Islam di Filipina Selatan .....	125
» Kesimpulan .....	130
<b>BAB 5: Demokrasi dan Masalah Internal di Thailand Selatan.....</b>	<b>133</b>
» Thailand dan Geopolitik Pasca Perang Dingin ...	134
» Demokrasi di Thailand Pasca Perang Dingin .....	137
» Bangkok dan Islam di Thailand Selatan .....	162
» Kesimpulan .....	167
<b>BAB 6: Penutup .....</b>	<b>169</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>177</b>
<b>Glosarium .....</b>	<b>211</b>
<b>Index .....</b>	<b>215</b>
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>219</b>

## DAFTAR SINGKATAN

1MDB	: 1Malaysia Development Berhad
ABIM	: Angkatan Belia Islam Malaysia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
API	: Angkatan Pemuda Insaf
ARMM	: Autonomous Region in Muslim Mindanao
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
AUKU	: Akta Universiti dan Kolej Universiti
AUSAID	: U.S. Agency for International Development
AWAS	: Angkatan Wanita Sedar
BN	: Barisan Nasional
BRN	: Barisan Revolusi Nasional
CAPO	: Centre for Administration of Peace and Order
CDR	: Council for Democratic Reform
CNS	: The Council for National Security
CPP	: Communist Party of the Philippines
DAP	: Democratic Action Party
DKI	: Daerah Khusus Ibukota

DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSW	: Deep South Watch
EDSA II	: Second EDSA Revolution
ETP	: Economic Transformation Program
FPI	: Front Pembela Islam
G30S/PKI	: Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GERAM	: Gerakan Pemuda Melayu
GNB	: Gerakan Non-Blok
GTP	: Government Transformation Program
HINDRAF	: Hindu Rights Action Force
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IMF	: International Monetary Fund
IP	: Indische Partij
ISA	: Internal Security Act
ISIL	: Islamic State of Iraq and the Levant
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
KIH	: Koalisi Indonesia Hebat
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMM	: Kesatuan Melayu Muda
KMP	: Koalisi Merah Putih

KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LOI	: Letter of Intent
LSM	: lembaga swadaya masyarakat
MASYUMI	: Musyawarah Muslimin Indonesia
MBM	: Majlis Belia Malaysia
MCA	: Malaysian Chinese Association
MCP	: Malayan Communist Party
MIC	: Malaysian Indian Congress
MILF	: Moro Islamic Liberation Front
MMDA	: Metropolitan Manila Development Authority
MNLF	: Moro National Liberation Front
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTEN	: Majelis Tindakan Ekonomi Negara
NAFTA	: North Atlantic Treaty Agreement
NAM	: Non-Alignment Movement
NAMFREL	: Movement for Free Elections
NCPO	: National Council for Peace and Order
NDF	: The National Democratic Front
NEP	: New Economic Policy
NKRA	: National Key Result Areas
NPA	: The New People's Army
NPKC	: National Peace Keeping Council
NU	: Nahdhatul Ulama

OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PAD	: People's Alliance for Democracy
PAP SINGAPURA	: People's Action Party
PAS	: Partai Islam Se-Malaysia
PBB	: Partai Bulan Bintang
PERAM	: Pemuda Radikal Melayu
PH	: Pakatan Harapan
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKMM	: Partai Pergerakan Melayu Malaya
PKR	: Partai Keadilan Rakyat
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKU	: Partai Kebangkitan Ummat
PMSJ	: Pergerakan Melayu Semenanjung Johor
PNU	: Partai Nahdatul Ummat
POMC	: Peace and Order Maintaining Command
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPP THAILAND	: People's Power Party
PR	: Pakatan Rakyat (PR).
PSI	: Partai Sarekat Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PULO	: Patani United Liberation Organization
RIS	: Republik Indonesia Serikat

RRC	: Republik Rakyat China
SAF FILIPINA	: Special Action Force
SARA	: Suku, Ras, Agama
SBPAC	: Southern Borders Provinces Administrative Centre
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SEMBAKO	: Sembilan Bahan Pokok
SI	:
SPCPD	: Southern Philippines Council for Peace and Development
SPRM	: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
SWAT	: Special Weapons and Tactics
SWS	: Social Weather Stations
TI	: Transparency International
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDDT	: United Front for Democracy against Dictatorship of Thailand
UMNO	: United Malays National Organisation
UUD	: Undang-Undang Dasar
WASP(M)	: White, Anglo, Saxon, Protestant, Male





## BAB 1

# Demokrasi dan Asia Tenggara

MENDISKUSIKAN tentang demokrasi dan Asia Tenggara tentu sangat menarik mengingat terminologi demokrasi diposisikan berbeda-beda di setiap negara akibat sistem politik dan tata nilai sosial yang berbeda pula. Perbedaan tafsir politik tersebut tentunya berimbas kepada tatanan sosial politik yang berbeda-beda di Asia Tenggara. Sehingga tidak mengherankan jika negara-negara Asia Tenggara mempraktikkan sistem politik dan demokrasi yang berbeda-beda seperti presidensial, parlementer, monarki konstitusional, dan junta militer (rezim). Persinggungan negara-negara Asia Tenggara dengan demokrasi juga tidak lepas dari masuknya unsur-unsur penjajahan Barat yang sering memaksa demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri (Gordon, 2010). Namun ketika demokrasi ditegakkan dan justru memperlemah posisi penjajah tetapi justru menguatkan posisi masyarakat lokal, maka demokrasi dianggap menjadi ancaman dan sebaliknya.

Ada banyak kasus di mana demokrasi justru berakibat bomerang bagi penjajah dan memaksanya untuk kembali menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Sebagai

contoh adalah munculnya berbagai organisasi di era pergerakan kemerdekaan Indonesia dalam merintis kemerdekaan misalnya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Taman Siswa, dan lain-lain. Munculnya organisasi tersebut juga selalu menaikkan tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam menggerakkan masyarakat misalnya Dr. Soetomo, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Ir. Sukarno dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut pada akhirnya menjadi lawan pemerintah penjajah dan sering diperlakukan dengan cara-cara tidak demokratis misalnya dipenjara, diasingkan dan lain-lain karena dianggap mengancam pemerintah. Bahkan, ketika tokoh-tokoh tersebut memegang tampuk kekuasaan, juga melakukan tindakan yang anti-demokrasi di saat berhadapan dengan lawan-lawan politiknya. Misalnya saja Ir. Soekarno ketika mengendalikan Indonesia di bawah rezim Orde Lama dengan cara mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya seperti Masyumi, dan lain-lain (M. Busyro Muqoddas, 2011).

Seharusnya, jika demokrasi dianut oleh penjajah, cara-cara tidak demokratis tidak diimplementasikan dalam menegakkan hukum. Karena hukum yang adil, bersih dan tidak dimanipulasi adalah kunci demokrasi bisa tegak dengan baik (Maravall, et al., 2003). Akhirnya, berkobarnya Perang Kemerdekaan antara tahun 1945-1949 adalah bukti bahwa demokrasi hanya slogan belaka, pepesan kosong dan cenderung dilaksanakan hanya jika menguntungkan penjajah. Bagaimanapun, seringkali demokrasi dianggap sebagai cara dan mekanisme politik paling ideal diterapkan di Indonesia misalnya dibanding mekanisme lainnya (Nucholis Madjid,

2004; Moh. Mahfudz MD, 1993; Maarif, 1988). Faktanya, ada negara misalnya Singapura yang tidak menganut sistem demokrasi, namun negaranya maju dan rakyatnya taat hukum. Singapura juga tidak liberal meskipun banyak warganya menganut pola hidup yang liberal. Tentu kekurangan Singapura hanya satu, warganya tidak mempunyai kebebasan di ruang politik. Demikian halnya dengan Arab Saudi sebagai negara tidak demokratis, onarki absolut, meskipun secara materi maju, namun banyak ruang yang menyekat warganya untuk melakukan aktivitas secara leluasa. Artinya, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna meskipun akhirnya sejarah akan membuktikan sistem mana paling sesuai di sebuah tempat (Mallarangeng, 2008).

## **Tentang Demokrasi**

Membicarakan konsep demokrasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka tesk-teks rujukan utama tentang demokrasi. Di Indonesia, konsep demokrasi yang paling terkenal adalah definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” disampaikan dalam sebuah pidatonya atau dikenal sebagai “*Gettysburg Address*” (Conant, 2015). Bisa dikatakan semua orang tahu definisi tersebut dan semakin memudahkan setiap orang untuk memahami arti demokrasi secara mudah.

Secara umum, istilah demokrasi pertama kali muncul tahun 508–507 Sebelum Masehi yang dikenalkan oleh Filusuf Yunani, Cleisthenes. Cleisthenes kemudian dikenal sebagai “Bapak Demokrasi Athena.” Melalui Cleisthenes

istilah “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuatan, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam perkembangannya, istilah demokrasi kemudian lekat dengan dua konsep penting yaitu kebebasan dan demokrasi. Dua istilah tersebut selalu muncul dalam diskursus seputar demokrasi di berbagai pembahasan (US Embassy Seoul, 2017; Raaflaub, Ober, & Wallace, 2007).

Menurut beberapa tokoh demokrasi mempunyai definisi yang berbagai. Menurut Aristotle, dalam karyanya yang sangat terkenal “*The Politics*,” mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh banyak pihak. Dari konsep Aristotle tersebut maka muncul varian-varian konsep bentuk pemerintahan di dunia. Bagaimanapun, konsep Aristotle masih membutuhkan penterjemahan dan pembahasan yang lebih rinci. Sehingga Aristotle bersama-sama dengan gurunya Plato menjadi tokoh penting yang sangat mempengaruhi pemikiran politik di dunia (Aristotle, Barker, & Stalley, 1995).

Sedangkan para ahli mendefinisikan demokrasi juga cenderung berbeda-beda. Misalnya menurut Schumpeter inti demokrasi adalah keputusan diambil secara kolektif dengan dua elemen utama yaitu Partisipasi dan persaingan (Schumpeter, 1983). Secara spesifik, Samuel Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah pengambilan keputusan yang paling kuat dilakukan secara kolektif melalui sistem pemilu yang jujur, adil dan berkala. Sistem tersebut membolehkan seorang kandidat bisa secara bebas berkompetisi dan memperoleh suara dari konstituen

yang sudah berhak mendapatkan hak pilih (Huntington, 1991). Sementara dalam Islam, konsep demokrasi masih menimbulkan perdebatan, ada yang menerima ada pula yang melihat demokrasi bukan ajaran Islam. Menurut pakar hukum Islam Ali Khan, menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, namun juga mengkritik konsep sekularisme dan demokrasi liberal (Khan, 2003). Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ajaran Islam sebenarnya sudah mengandung unsur-unsur demokrasi misalnya *shura* (musyawarah), *ijma* (mufakat), *al-hurriyya* (kemerdekaan), *al-huquq al shari'iyya* (legitimasi) (Moussalli, 2001). Lain halnya dengan salah seorang pemikir politik Islam, Abul A'la Maududi, menyatakan bahwa demokrasi dipahami sebagai sebuah sistem Islam yang harus mengintegrasikan nilai-nilai dan unsur-unsur Islam. Maka lahir istilah "*theodemocracy*" (Maududi, 1960). Istilah "*theodemocracy*" tidak lain untuk melawan sekularisme dan demokrasi ala Barat yang membedakan dan memisahkan antara urusan agama dan negara (Maududi, 1960).

Demokrasi kemudian berkembang menjadi sebuah konsep yang lekat dengan proses pembangunan politik sebuah negara terutama pasca Perang Dunia ke II (Kaunda, 1995). Pada akhirnya, demokrasi seringkali berbenturan dengan nilai-nilai dan norma-norma di sebuah tempat yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Hal ini disebabkan di Asia khususnya, kearifan lokal sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai demokrasi Barat. Nilai-nilai demokrasi Barat yang cenderung liberal, memberikan kebebasan sebeb-asbebnya kepada

masyarakat tentu tidak seluruhnya tepat. Karena dalam masyarakat Timur dikenal nilai-nilai yang masih mengikat individu untuk patuh kepada norma-norma di masyarakat. Misalnya, kebersamaan, gotong-royong, toleransi, taat kepada orang tua, taat kepada tokoh masyarakat dan lain-lain yang melarang individu bertindak sesuka hati. Oleh karena itu, jika dalam prakteknya demokrasi di Asia Tenggara berbeda dengan apa yang dikehendaki Barat merupakan hal wajar (Hood, 1998; Neher, 1994).

Seterusnya, praktek demokrasi pada dasarnya juga tidak lepas dari benturan demokrasi apalagi demokrasi liberal dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menyulitkan sehingga tidak semua nilai demokrasi bisa direalisasikan dengan baik. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa praktek demokrasi terutama di negara-negara berkembang yang merdeka pasca Perang Dunia ke-II sangat sulit dilakukan. Sistem pemerintahan adalah hal yang paling mendasar dan fondasi pelaksanaan sistem demokrasi. Faktanya, memang demokrasi hanya sukses dilaksanakan di negara-negara Barat. Sebaliknya, demokrasi gagal dipraktekkan terutama di negara-negara bekas Uni Soviet dan di Amerika Latin. Begitu juga dengan negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Timur Tengah juga masih mengalami kesulitan dalam memahami dan merealisasikan demokrasi dalam arti yang sebenarnya sebagaimana didefinisikan oleh Barat (Boix, 2006). Sedangkan untuk Asia Tenggara, sebagai perbandingan, bisa dianggap Indonesia lebih baik dibanding Malaysia misalnya dari segi kebebasan pemilih, namun gagal memberantas korupsi. Sedangkan Malaysia mungkin tidak sebagus Indonesia

terutama segi kebebasan, namun Malaysia unggul dalam aspek kelembagaan (Zeeman, 2012).

## **Demokrasi di Asia Tenggara Era Kolonialisme**

Pada era kolonial, terutama sebelum dan setelah Perang Dunia ke-II merupakan fase penting perkembangan demokrasi di Asia Tenggara. Pada era tersebut, tumbuh gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat terutama kalangan pemuda untuk menuntut kemerdekaan negaranya. Tuntutan kemerdekaan merupakan isu utama yang diusung oleh organisasi- organisasi tersebut sebagai bentuk perlawanan kepada penjajah. Isu demokrasi dan hak asasi manusia muncul menjadi diskursus yang selalu hadir karena semua pergerakan berpandangan sama bahwa hak asasi manusia dan hak demokrasi tersebut bisa menjadi jalan merealisasikan kemerdekaan. Isu demokrasi pula yang pada dasarnya dimunculkan penjajah untuk memenuhi dan mewedahi aspirasi negeri jajahan terutama terkait kebebasan bersuara. Karena bagaimanapun di bawah pemerintahan penjajah, kebebasan bersuara yang menjadi elemen terpenting demokrasi Barat, sangat dibatasi bahkan disekat. Oleh karenanya, di bawah situasi tersebut isu demokrasi sangat penting.

Sejarah membuktikan bahwa era penjajahan telah memicu munculnya berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan di negara-negara Asia Tenggara sebagai bentuk realisasi demokrasi. Tentunya organisasi pergerakan tersebut menghadapi dinamika dan konstelasi politik yang berbeda-beda di setiap negara dengan pemerintahan kolonial yang berbeda pula.



## 1. Di Filipina

Filipina mengalami tiga kali era penjajahan, yaitu Portugis, Spanyol dan Amerika Serikat (AS). Era kolonialisasi Filipina hampir sama dengan Indonesia kurang lebih 330 tahun, sebelum akhirnya merdeka tahun 1946 dari Amerika Serikat. Latar belakang tersebut tentu saja telah memunculkan berbagai pergerakan kemerdekaan di kalangan masyarakat Filipina. Maka muncul salah satu penduduk pribumi yang bernama Joze Rizal sebagai pelopor pergerakan kemerdekaan Filipina. Sayangnya, meskipun Joze Rizal telah mengorbankan dirinya menjadi martir, dieksekusi oleh penjajah Spanyol, namun tidak mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah Filipina sebagai pahlawan nasional (House of Congress, 2016).

Spirit Joze Rizal pula yang akhirnya menginspirasi bangsa Filipina untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menjadi negara merdeka, bedaulat dan demokratis. Melalui semangat demokrasi itulah Filipina berjuang dan memperbaiki negaranya dengan menganut sistem demokrasi. Bahkan, sejarah mencatat bagaimana warisan semangat Joze Rizal dalam melawan penjajah masih lekat ketika rakyat Filipina berjuang melawan bangsanya sendiri, melawan kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos. Peristiwa tersebut nyata menjadi inspirasi banyak negara bahwa kediktatoran harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau "*people power*." Artinya, perjuangan rakyat Filipina dalam menegakkan demokrasi benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara

bahwa kediktatoran bisa dilawan “tanpa kekerasan” (George, 2016).

## **2. Indonesia**

Di Indonesia, pada masa kolonial, ekspresi demokrasi di Indonesia dituangkan dalam bentuk pergerakan kemerdekaan karena gerakan fisik yang sebelumnya dilakukan dilihat terus mengalami kegagalan. Pergerakan Indonesia era kolonial pada dasarnya bisa dibagi menjadi tiga bentuk (1) perintis kemerdekaan dan nasionalisme, (2) berbasis keagamaan, dan (3) berbasis sekuler. Untuk lebih jelasnya bisa dijabarkan dalam uraian singkat berikut:

### **i. Perintis kemerdekaan dan nasionalisme**

Gerakan atau organisasi berbasis ini sangat berperan penting dalam membentuk bangunan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia di tengah tekanan politik penjajah. Misalnya muncul RA Kartini (1879-1904), Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tokoh utamanya Soetomo, Sarekat Islam (SI) pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta, serta Indische Partij (IP) oleh E.F.E Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912 (Noer, 1996; Poesponegoro & Notosusanto, 1981; Ricklefs, 1993).

### **ii. Berbasis keagamaan**

Organisasi berbasis keagamaan muncul sebagai bentuk artikulasi politik umat Islam didorong oleh spirit keagamaan untuk melawan penjajahan melalui jalur-jalur demokrasi. Meskipun kemunculan organisasi tersebut tidak secara eksplisit menyebut sebagai gerakan politik, namun fakta

sejarah menunjukkan bahwa kemunculannya didorong oleh keinginan kuat menentang penjajah. Adapun beberapa organisasi tersebut adalah seperti berikut:-

<b>Nama</b>	<b>Pendiri</b>	<b>Waktu Pendirian</b>	<b>Tempat</b>
Muhammadiyah	K.H. Akhmad Dahlan	18 Nopember 1912	Yogyakarta
Ahmadiyah	Mirza Wali Ahmad Beid	28 September 1929	Yogyakarta
Al-Irsyad dan Partai Arab Indonesia	Kelompok Sayid (Keturunan Nabi tetap) dan kelompok non Sayid	16 September 1914	Batavia (Jakarta)
Thawalib	Sheikh Ibrahim Musa	Awal 1919	Bukittinggi
Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti)	Syekh Sulaiman ar Rasuly	1930	Bukittinggi
Persatuan Muslimin Tapanuli (PMT)	Syekh Musthafa Purbabaru	1930	Tapanuli, Sumatera Utara
Persatuan Islam (PERSIS)	Kiai Hasan	1923	Jakarta
Musyawatut Thalibin	Syekh Abdurrasyid Amuntai	1930	Kalimantan Selatan

<b>Nama</b>	<b>Pendiri</b>	<b>Waktu Pendirian</b>	<b>Tempat</b>
Al jam'iyatul Wasliyah	Ismail Banda, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Abdul Wahab, dan M. Isa.	1930	Medan
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)	Tengku M. Daud Beureuh	5 Mei 1939	Peusangan, Bereuen, NAD
Nahdlatul Wathan	TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid	22 Agustus 1937	Mataram, NTB
Nahdhatul Ulama	K.H. Hasyim Asy'ari	31 Januari 1926	Jombang, Jawa Timur

*Sumber: diolah dari berbagai sumber.*

### **iii. Berbasis Radikal**

Organisasi berbasis radikal wajar muncul di tengah berbagai tekanan penjajah Belanda terutama kepada para pedagang dan petani pribumi. Adalah Sarekat Islam (SI) yang mula-mula menjadi akar gerakan radikal di tanah Hindia Belanda. Meskipun berakar dari fondasi organisasi berbasis Islam yang kuat, namun SI menjelma menjadi sebuah gerakan radikal rakyat pribumi untuk menentang penjajah. Hal ini tidak lain dilatarbelakangi oleh situasi sosial dan politik waktu itu di mana rakyat ditekan habis-habisan oleh penjajah dengan berbagai cara. Maka muncullah berbagai tokoh yang lahir dari

SI misalnya HOS Tjokroaminoto, Haji Misbach, Haji Agus Salim, Semaoen dan lain-lain. Dalam perkembangannya, terjadi transformasi besar di tubuh SI di tengah gencarnya pengaruh radikalisme militant dari kelompok yang dekat dengan komunis. Benturan ideologi tidak bisa dihindari dan akhirnya pada kongres di Surabaya tahun 1921, SI resmi pecah menjadi SI Merah (Sarekat Rakyat) dipimpin Semaoen yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) berpusat di Semarang dan SI Putih menjadi Partai Sarekat Indonesia (PSI) dipimpin Haji Agoes Salim bermarkas di Yogyakarta (Ahmad, 2014).

### **3. Malaysia**

Di Malaysia, juga muncul gerakan-gerakan untuk menentang penjajahan yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi. Dalam hal ini perbincangan terkait pergerakan sebelum kemerdekaan Malaysia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pergolakan politik di Malaysia sebelum merdeka. Secara umum munculnya gerakan kemerdekaan menentang penjajah Inggris di Malaysia yang dimotori oleh golongan mahasiswa khususnya mahasiswa Melayu sudah dimulai sejak tahun 1920-an. Bisa dikatakan periode tahun 1920-an hingga 1950-an merupakan fase penting tumbuhnya pergerakan Islam modernis di kawasan Asia Tenggara termasuk di Malaysia (Liow, 2005). Pada fase tersebut pergolakan politik di kalangan pemuda Melayu sangat agresif yang ditandai berdirinya beberapa organisasi pergerakan kemerdekaan. Misalnya Pergerakan Melayu Semenanjung Johor (PMSJ), *United Malays National Organisation (UMNO)* termasuk Partai Pergerakan Melayu

Malaya (PKMM) dan organisasi sayapnya Angkatan Pemuda Insaf (API) (Ramlah Adam, 1998). Pergerakan kemerdekaan Malaysia juga muncul di luar negeri khususnya di Mesir misalnya mendirikan *Djama'ah al-Chairiah al-Talabijja al-Azhariah al-Djawiah* atau Persatuan Pelajar-Pelajar Nusantara bersama para pelajar-pelajar dari Indonesia. Melalui beberapa jurnal ilmiah seperti *Seruan Azhar*, *Al-Imam* dan *Al-Manar* para aktivis Melayu secara aktif menuangkan gagasan-gagasan politiknya (Liow, 2005: 54-55).

Khusus kalangan pemuda muncul juga beberapa organisasi pergerakan yang dibentuk oleh para pemuda di tingkat bawah seperti *Setiawan Belia* di Negara Bagian Kelantan, *Ikatan Pemuda Pelajar* (1929), *Kesatuan Melayu Muda* [KMM] (1937) dan *Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung* (1948) (Hussain Mohamed, 1986: 133-151): Namun, pergolakan politik para pemuda Melayu pada akhirnya mengalami perpecahan akibat perbedaan ideologi dan visi politik. Perpecahan semakin tajam pasca Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perbedaan ideologi tersebut terutama antara dua organisasi penting yaitu PKMM dan UMNO. PKMM yang berhaluan “kiri” cenderung dipengaruhi sikap radikal di Indonesia, sedangkan UMNO lebih dekat ke pemerintah Inggris (Ramlah Adam, 1998: 13). Menghadapi situasi ini penjajah Inggris sangat paham gerakan tersebut harus dikondisikan agar tidak agresif dan bisa mengancam pemerintah penjajah. Beberapa organisasi yang masih setia kepada Inggris terus-menerus mendapat perlindungan, sedangkan organisasi

radikal yang anti-penjajah semakin tertekanan di tengah ancaman komunis. Akhirnya, sebuah lembaga dibentuk untuk mengendalikan situasi agar unsur-unsur radikal bisa dicegah termasuk ancaman dari organisasi radikal Majlis Belia Malaysia (MBM) pada tahun 9 September 1950 (Hussain Mohamed, 1986: 154). Selain pergerakan di atas muncul juga beberapa organisasi misalnya Angkatan Wanita Sedar (AWAS), Gerakan Pemuda Melayu (GERAM), Pemuda Radikal Melayu (PERAM), dan Hizbul Muslimin (Ahmad Ali Seman, Nordin Hussin, & Uqbah Iqbal, 2016).

Dengan demikian, bisa ditarik benang merah bahwa dari beberapa contoh di atas menunjukkan dinamika demokrasi di Asia Tenggara era kolonial sangat kaut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang sedang dijajah. Situasi tersebut bagaimanapun memicu berbagai elemen masyarakat untuk bahu-membahu dan secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsanya masing-masing. Semua pergerakan tampaknya sepakat bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya kontruksi pemikiran tersebut muncul dari sebuah paradigma bahwa demokrasi dan hak asasi manusia muncul seiring dengan tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa terjajah. Tumbuhnya kesadaran tersebut juga merupakan sebuah indikator bahwa gerakan-gerakan tersebut dikonstruksi di atas sebuah fondasi bangunan yang bernama demokrasi. Oleh sebab itu, pada bagian selanjutnya dibahas perkembangan demokrasi Asia Tenggara pasca kolonialisme khususnya memasuki era Perang Dingin.

## **Demokrasi di Asia Tenggara Pasca Perang Dunia Ke-II**

Pasca Perang Dunia II dinyatakan selesai ditandai dengan menyerahnya Jepang setelah dua kotanya Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu tahun 1945. Berakhirnya Perang Dunia II, nyata menjadi titik tolak penting bagi negara-negara jajahan untuk merdeka secepatnya termasuk negara-negara Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang langsung merespon situasi tersebut dan akhirnya dengan perjuangan para pendiri bangsa, Indonesia bisa memproklamakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara-negara lain cenderung lebih lambat disebabkan masih kuatnya pengaruh penjajah misalnya Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Namun situasinya hampir sama di mana pasca kolonisasi negara-negara jajahan di Asia Tenggara menuntut dibentuknya sistem pemerintahan yang merdeka dan demokratis. Fenomena partai politik dan pemilu selalu menjadi diskursus di Asia Tenggara. Tetapi situasinya agak berbeda di Indonesia tatkala harus berjibaku berdarah-darah melawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan (Chua, 2008). Oleh karena itu, dalam bagian berikut dijelaskan tentang kondisi politik dan demokrasi di Asia Tenggara yang dibagi menjadi dua fase yaitu Era Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin.

## **Demokrasi di Asia Tenggara Era Perang Dingin**

Terkait dengan dinamika demokrasi di Asia Tenggara era Perang Dingin bisa dilihat dalam beberapa indikator. Menurut *National Democratic Institute*, setidaknya ada 11 indikator



utama pengukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Indikator tersebut adalah seperti berikut:-

1. Penegakan hak asasi manusia/hak sipil
2. Penegakan hak sosial dan ekonomi
3. Partisipasi politik dan publik
4. Adanya partai politik
5. Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil
6. Penegakan supremasi hukum
7. Kontrol sipil atas militer dan polisi
8. Pemerintahan yang bertanggungjawab
9. Bebas korupsi
10. Kebebasan Media
11. Pemerintahan yang tanggap

*Sumber: (National Democratic Institute, 2007).*

Pada kesempatan ini penulis tidak akan menjelaskan satu-per satu indikator tersebut. Namun penulis berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi demokrasi di Asia Tenggara khususnya era Perang Dingin dengan berpandukan indikator di atas. Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa massifnya agenda demokratisasi juga tidak lepas dari agenda internasional yang diusung terutama oleh AS sebagai pemain utama percaturan politik global. Bagi AS, demokrasi merupakan salah satu strategi untuk memperluas “imperialismenya” dan tidak selalu selaras dengan nilai-nilai fundamental demokrasi. Apa yang menjadi fokus AS adalah kepentingan-kepentingan AS bisa terimplementasikan dalam

kebijakan luar negerinya terlepas apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai demokrasi. Tetapi pada dasarnya bagi AS prinsip demokrasi adalah untuk “perdamaian, kesejahteraan dan pluralisme.” Dalam prakteknya, ketika era Perang Dingin, prinsip demokrasi seringkali dikebiri di tengah pertarungan antara AS dan Uni Soviet. Fokus AS bukan pada penegakan demokrasi tetapi pada aspek memenangkan pertarungan dengan Blok Komunis, meskipun harus mendukung negara-negara yang tidak mempraktekkan demokrasi (Lagon, 2011).

Jika diteliti lebih jauh, gaung demokrasi di Asia Tenggara jelas tidak lepas dari upaya AS untuk mengendalikan kawasan ini. Akibatnya segala dinamika yang berkembang termasuk organisasi regional semacam *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* tidak bisa lepas dari campur tangan AS. Implikasinya jargon-jargon demokrasi hanya berlaku ketika implementasi demokrasi selaras dengan kepentingan AS. ASEAN misalnya didirikan juga dalam kerangka mempromosikan demokrasi di Asia Tenggara. Namun, faktanya Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Suharto, sikap AS cenderung membiarkan dan tidak memberikan teguran atau mengenakan sanksi. Sehingga, meskipun dinilai tidak demokratis, namun Indonesia mampu menjadi motor penggerak ASEAN yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama. Sebaliknya, pasca Perang Dingin yang mengubah konstelasi politik Internasional nyata berdampak pada kebijakan luar negeri AS di Asia Tenggara khususnya ASEAN dan Indonesia. Hal ini disebabkan munculnya “kerjasama” juga lebih disebabkan

kepentingan AS untuk membendung pengaruh Uni Soviet dalam kancah Perang Dingin. Charles L. Glaser menyatakan:

*International organisations can also help a major power deal with challenges posed by regional powers and ethnic conflict. When a major power has limited interests in a conflict – for example, an ethnic conflict in which the state has primarily humanitarian but not strategic interests – it may have sufficient resources to intervene effectively on its own, but its limited interests make it unwilling to do so, unless others join in the intervention (Glaser, 2003).*

Pendapat Glaser sangat tepat jika dikaitkan dengan situasi di Indonesia sebagai negara terpenting ASEAN yang dianggap memiliki catatan buruk terkait isu pelanggaran hak asasi manusia ketika melakukan pendudukan di Timor Timur (Timor Leste). Faktanya, sebagaimana dijelaskan di atas kebijakan Indonesia di Timor Leste seolah-olah “di-benarkan” oleh AS. Bahkan dukungan AS secara terang di-ungkapkan melalui Presiden Gerald Ford dan Sekretaris Negara AS Henry Kissinger ketika melakukan kunjungan kenegaraannya di Jakarta pada Desember 1975. Dukungan AS tersebut tidak lain karena kemenangan Partai Fretelin yang berhaluan komunis dinilai bisa mengancam kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara (Permal, 2006). Dengan istilah lain AS sendiri sangat berkepentingan dengan langkah dan kebijakan Indonesia meskipun bertentangan dengan norma-norma perdamaian dan hak asasi manusia.

Sebaliknya, pasca-Perang Dingin dengan segala konsekuensinya termasuk usangnya isu-isu komunisme, ber-

dampak pada hubungan Indonesia-Amerika Syarikat yang cenderung tegang. Hal ini tidak lain karena isu hak asasi manusia dan demokrasi tiba-tiba muncul menjadi sebuah skenario politik yang menekan negara-negara di Asia Tenggara. Implikasinya, dengan dalih demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, AS mulai mengungkit dugaan keterlibatan Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam isu pembantaian besar-besaran di Timor Leste tahun 1991. Akibat tuduhan itu, Indonesia dikenakan sanksi berupa embargo persenjataan oleh AS (Smith, 2003). Dengan demikian jelas terlihat bahwa selama Perang Dingin, isu-isu keamanan sangat dominan. Namun, pasca Perang Dingin isu keamanan mulai bergeser menjadi isu-isu yang lebih ringan atau non-keamanan tetapi justru dengan daya tekanan lebih besar yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Seiring dengan meningkatnya isu-isu keamanan pasca Serangan 11 September 2001, tampaknya juga merubah kebijakan luar negeri AS yang kembali menggunakan pendekatan keamanan. Munculnya kelompok teroris (yang sering dikaitkan dengan Islam), menjadikan AS kembali merangkul dan bekerjasama dengan negara-negara Islam (seperti Indonesia) meskipun sebelumnya dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Glaser, 2003: 413).

Upaya penegakan demokrasi tentunya versi Asia Tenggara selama Perang Dingin bisa ditelusuri dalam beberapa rangkaian peristiwa. Di Indonesia misalnya bisa dilihat dalam dua periode pemerintahan yaitu Presiden Sukarno dan Presiden Suharto. Ketika Presiden Sukarno berkuasa, sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan.

Namun, sejak awal cenderung sepakat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Era Sukarno, ketika era Revolusi Fisik (1945-1949) Indonesia menganut sistem parlementer dengan Perdana Menteri pertama Syahrir. Tahun 1949, Indonesia memasuki era baru pasca revolusi fisik menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS, *Republic of the United States of Indonesia*, atau *Verenigde Staten van Indonesie*). Tidak berlangsung lama, setahun kemudian tepatnya 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan (Kartasmita, 1981). Pasca RIS, Presiden Sukarno membentuk Orde Lama dengan sistem parlementer. Di era inilah, pemilu demokratis pertama dilaksanakan yang dikenal dengan Pemilihan Umum 1955. Di tengah, instabilitas politik seiring dengan friksi politik di parlemen terutama kuatnya pengaruh komunisme dan isu separatisme ketika itu, parlemen hasil pemilu 1955 tidak bisa bekerja dan selalu menemukan kebuntuan politik. Melihat kondisi bangsa tersebut, Presiden Sukarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan parlemen dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Akibatnya, Pemilu yang seharusnya diselenggarakan tahun 1960, gagal terlaksana (Feith, 1962). Fase berikutnya, Indonesia di bawah Presiden Sukarno memasuki era Demokrasi Terpimpin. Di era ini situasi sosial, ekonomi dan politik Indonesia sangat memprihatinkan. Musuh-musuh dan kelompok yang anti-pemerintah Sukarno disingkirkan. Salah satu langkah kontroversialnya adalah membubarkan Partai Muslimin Indonesia (Masyumi) tahun 1960 (Siregar, 2003). Pasca Sukarno jatuh berikut peristiwa Gerakan 30 September/PKI tahun 1965, Indonesia di bawah kendali Jenderal Suharto

yang kemudian membentuk Orde Baru. Di bawah Orde Baru, nasib demokrasi semakin memburuk. Pemerintah membatasi hak-hak bersuara dan berpolitik di segala bidang. Meskipun ada pemilu, kehidupan demokrasi era Orde Baru bisa dikatakan jauh dari ekspektasi demokratis walaupun harus diakui banyak kemajuan ekonomi dibandingkan Orde Lama (Ikrar Nusa Bhakti, 2004). Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia era Perang Dingin hanya didominasi dua fase yaitu Orde Lama yang sangat tidak stabil dan Orde Baru yang stabil ekonomi dan politiknya, namun tidak demokratis.

Malaysia yang masih dalam pendudukan Inggris menghadapi situasi berbeda dalam dinamika demokrasi pasca Perang Dunia dan era Perang Dingin. Malaysia yang dihuni oleh tiga etnis utama yaitu Melayu, Cina dan India dikondisikan dengan politik rasialis. Pilihan politik berdasarkan ras/etnis ini dirancang sebagai konsekuensi dominasi etnis Melayu dalam pembentukan negara Malaysia. Sejak awal etnis Melayu telah membentuk partai yang terkenal yaitu *United Malays National Organisation (UMNO)*, disusul partai-Partai etnis lain seperti partai etnis Cina yaitu *Malaysian Chinese Association (MCA)* dan partai etnis India yaitu *Malaysian Indian Congress (MIC)*. Partai UMNO juga yang selalu berkomunikasi dengan kolonial Inggris dalam mempersiapkan kemerdekaan. Gagasan kemerdekaan juga tidak lepas dari kompleksitas persaingan antar etnis yang akhirnya mengantarkan sebuah koalisi kokoh sampai saat ini yaitu Barisan Nasional (BN). BN yang dibentuk tahun 1973 tidak lain adalah perubahan nama atas koalisi tiga partai tersebut sebelumnya yaitu Partai Perikatan. BN diisi oleh partai pendukung pemerintah yang

didominasi tiga partai utama yaitu UMNO, MCA, dan MIC. Pelaksanaan demokrasi di Malaysia secara nyata baru tahun 1959 atau dua tahun setelah merdeka tahun 1957 yang dimenangkan oleh koalisi Partai Perikatan (sekarang BN) (Ramlah Adam, 1998).

Terkait dengan kebebasan bersuara atau berpolitik masyarakat, pemerintah Malaysia sangat membatasi. Hal ini ditunjukkan dengan diberlakukannya beberapa peraturan. Misalnya pemberlakuan undang-undang yang membatasi para mahasiswa melakukan kegiatan berbau politik kampus dikenal dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) pada tahun 1971 (Hussain Mohamed, 1986). Meskipun mahasiswa banyak yang berpikiran kritis kepada pemerintah, namun tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, situasi sosial politik Malaysia yang berbasis etnis menjadikan para aktivis politik berfikir berkali-kali untuk menentukan pilihan politiknya. Karena, pilihan politik jelas terkait erat dengan keberlangsungan kekuasaan sebuah etnis. Dalam hal ini tentu etnis Melayu, Cina dan India akan sekuat tenaga mempertahankan eksistensinya untuk berkontestasi di panggung perpolitikan Tanah Melayu (Hoffstaedter, 2012). Selama Perang Dingin, politik Malaysia relatif sangat stabil dengan BN mendominasi bahkan sampai sekarang.

Lain halnya dengan di Singapura, demokratisasi selama Perang Dingin mengalami dinamika yang unik. Singapura sebelumnya merupakan salah satu negara bagian Malaysia. Disebabkan konstelasi politik di Semenanjung Malaysia, Singapura akhirnya memisahkan diri dari Malaysia dan

merdeka tahun 1965 (Ming, 2009). Namun sebelum memisahkan diri dari Malaysia, Singapura di bawah pimpinan Lee Kwan Yew, cenderung berseberangan dengan dengan Kuala Lumpur. Sehingga sejak awal tepatnya tahun 1959 Singapura sudah mempunyai partai lokal yang sangat berpengaruh sampai sekarang yaitu *People's Action Party (PAP)*. Sejak itulah, demokrasi di Singapura tidak lepas dari dinamika partai PAP lebih-lebih ketika Perang Dingin. Bahkan bisa dikatakan sejak awal hingga sekarang Singapura mempraktekkan sebagai negara yang dikenal dengan *one party state* atau negara dengan partai tunggal. Meskipun ada partai lain namun posisinya seperti dibonsai (Mauzy & Milne, 2002). Posisi Singapura yang demikian kompleks di tengah negara-negara besar mengakibatkan seolah-olah terjepit di antara negara besar terutama dengan Indonesia dan Malaysia. Hubungan Singapura dengan negara tetangganya seringkali bersitegang seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura yang jauh meninggalkan negara tetangga lainnya. Sehingga mendapat julukan sebagai "*Little Red Dot*" atau titik merah yang harus dihilangkan dari peta Asia Tenggara. Istilah ini muncul pertama kali tahun 1998 oleh Presiden Indonesia BJ Habibie yang kesal dengan tindakan Singapura terkait dengan kondisi politik Indonesia ketika itu (Koh & Chang, 2005).

Sementara di Filipina pasca Perang Dunia dan masuk ke era Perang Dingin, situasinya juga berbeda dibanding dengan misalnya di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tetapi agak mirip di Indonesia terutama terkait dengan sikap AS di Asia Tenggara. Hal ini cukup terasa ketika Filipina di bawah



pimpinan Ferdinand Marcos. Di era Marcos, demokrasi di Filipina mengalami tekanan besar. Rakyat ditekan habis-habisan, disensor dan dibatasi hak politiknya. Selain itu, dikatakan keluarga Marcos hidup dalam kemewahan di tengah kemiskinan yang menghimpit rakyat Filipina sebagian besar. Sebaliknya, sebagaimana di Indonesia, AS merestui pemerintahan di Filipina meskipun melanggar berbagai norma kemanusiaan dan demokrasi. AS diam atas tindakan Marcos atas rakyatnya karena kebijakan pemerintah Filipina masih selaras dengan kebijakan AS ketika itu yaitu perang melawan komunis (Cellos, 1997).

Negara lain di Asia Tenggara yaitu Thailand juga mempunyai pengalaman yang berbeda dibanding negara lain terkait dengan demokratisasi dan dinamika politik dalam negerinya. Politik dan demokrasi di Thailand bisa dibilang agak unik mengingat kebijakan politik luar negerinya yang sangat pragmatis. Misalnya selama Perang Dunia II, Thailand memilih bersekutu dengan Jepang disaat negara lain menentang meskipun dikenal sebagai negara yang tidak pernah dijajah. Catatan lain, Thailand menganut sistem monarki/kerajaan dengan sistem yang silih berganti antara sistem parlementer dan junta militer. Thailand adalah salah satu negara yang sangat familier dengan peristiwa kudeta militer (Acharya, 1998). Tercatat dalam sejarah modern Thailand, sudah terjadi sebelas kali kudeta militer (Financial Times, 23 May 2014). Kudeta militer terakhir terjadi tahun 2014 di mana mayoritas kudeta militer tersebut dilatarbelakangi oleh kebuntuan politik (*deadlock*) (The Washington Post, 3 December 2013). Meskipun pada era Perang Dingin, Thailand lebih sering

dikendalikan oleh junta militer, namun AS terutama tidak melihatnya sebagai sebuah tindakan yang anti-demokrasi. Karena, kebijakan Thailand jelas anti-komunisme bahkan menyerahkan sebagian wilayahnya yaitu di Udon, Ubon, dan U-Tapao untuk menjadi pangkalan militer (*Air Base*) AS ketika terjadi Perang Vietnam (US Department of Veterans Affairs, 2018).

Dengan demikian pada bagian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa praktek demokrasi di negara-negara Asia Tenggara berbeda-beda. Namun, menariknya semua negara terutama yang menganut demokrasi telah berusaha untuk menjalankan konsep demokrasi tersebut dengan maksimal misalnya melaksanakan pemilu dan memberikan hak-hak sipil kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, pelaksanaan demokrasi penuh dengan berbagai hambatan sehingga sangat sulit menemukan sebuah konsensus politik. Implikasinya sering terjadi distorsi demokrasi dengan menggagalkan prestasi demokrasi yaitu pemilu. Hal ini dialami misalnya di Indonesia dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 atau seringnya terjadi kudeta militer di Thailand. Kebuntuan politik menjadi realitas yang sering terjadi di Asia Tenggara era Perang Dingin. Sebaliknya disebagian negara misalnya di Malaysia dan Singapura, demokrasi diterjemahkan dengan sebuah sistem politik yang “kaku” namun berhasil mensejahterakan rakyatnya. Peran penjajah menjadi kunci di kedua negara tersebut. Di sisi lain, muncul rezim yang “direstui” AS karena anti-komunis meskipun terlihat anti-demokrasi misalnya di Indonesia, Filipina dan Thailand. Oleh karena itu, jelas faktor politik internasional sangat mempengaruhi konstelasi politik

kawasan termasuk di Asia Tenggara dalam konteks isu-isu demokrasi.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas maka bisa disimpulkan (1) bahwa praktek demokrasi di Asia Tenggara tidak bisa direalisasikan dengan baik. Hal ini karena proses demokratisasi berjalan dengan dinamika yang berbeda-beda disebabkan latar belakang sejarah dan nilai-nilai lokal berbeda pula. Hasilnya, demokrasi adalah salah satu alat yang bisa digunakan negara Asia Tenggara untuk mencapai kemakmuran dengan interpretasi masing-masing. Sebagai perbandingan misalnya, bisa dianggap Indonesia lebih baik dibanding Malaysia dari segi kebebasan pemilih, namun gagal meberantas korupsi. Sedangkan Malaysia mungkin tidak sebagus Indonesia terutama segi kebebasan, namun Malaysia unggul dalam aspek kelembagaan.

Kesimpulan ke (2) proses demokratisasi di Asia Tenggara jelas sangat dipengaruhi oleh penjajah dan negara-negara besar terutama AS. Era Perang Dunia II, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi pelecut untuk mengobarkan spirit anti-penjajahan. Faktanya, tidak semua negara jajahan memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya misalnya Brunei Darussalam. Hal ini juga tidak lain karena skenario penjajah yang menginginkan Brunei Darussalam menjadi negara monarki dan tidak demokrasi disebabkan kepentingan yang pragmatis pula. Apa yang pasti, spirit demokrasi dan hak asasi manusia menjadi sebuah pemicu penting yang

membangkitkan negara-negara Asia Tenggara lepas dari belenggu penjajahan dengan proses masing-masing.

Kesimpulan ke (3) pasca Perang Dunia II, tampaknya hampir semua negara Asia Tenggara memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya beberapa parameter demokrasi misalnya melaksanakan pemilu dan memberikan hak-hak sipil kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, proses demokratisasi menemui berbagai tantangan yang tidak mudah terkait kompleksitas politik lokal. Apalagi di tengah memanasnya Perang Dingin, elemen-elemen demokrasi seringkali “disusupi” oleh kepentingan-kepentingan luar terutama AS dalam rangka mempengaruhi kebijakan negara Asia Tenggara agar tidak jatuh dalam pelukan komunisme. Hasilnya, muncul apa yang dikenal dengan Perang Proksi (*Proxy War*) untuk memenangkan elite-elite politik nasional agar pro kepada kebijakan AS yaitu anti-komunis. Kebijakan-kebijakan negara yang bertentangan dengan demokrasi biasa terjadi karena secara geopolitik “tidak berseberangan” dengan kebijakan AS di Asia Tenggara.



## **BAB 2**

# **Demokrasi dan Indonesia Pasca Perang Dingin: Reformasi dan Liberalisasi**

BAB ini membahas tentang demokrasi dan dinamika politik di Indonesia pasca Perang Dingin. Era pasca Perang Dingin menarik untuk dibahas karena Perang Dingin nyata berdampak pada konstelasi politik dalam negeri Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Bab ini dibagi menjadi enam bagian penting yaitu (1) Indonesia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin, (2) Politik Pasca Reformasi 1998, (3) Politik Pasca Pemilu 2004, (4) Politik Pasca Pemilu 2014, (5) Masa Depan dan Posisi Politik Umat Islam, dan (6) Kesimpulan.

### **Indonesia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin**

Pasca berakhirnya Perang Dingin 1989-1990 adalah masa-masa menentukan bagi arah politik dan demokrasi di Indonesia. Setelah runtuhnya Tembok Berlin yang menandai berakhirnya Perang Dingin, berdampak pada pergeseran skenario politik di belahan dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Perang Dingin yang sangat lekat dengan pertarungan ideologi Komunis-Kapitalis

sangat mempengaruhi konstelasi politik Indonesia. Pendulum politik Indonesia yang bergeser ke kanan pasca Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) 1965, jelas akibat pengaruh tensi Perang Dingin. Akibatnya, Indonesia secara *de-facto* menjadi bagian Blok-Kapitalis dan anti-Komunis meskipun Indonesia adalah bagian dari

(GNB, *Non-Alignment Movement/NAM*) (Sudarsono, 1979). Artinya, bahwa politik dan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh geopolitik semasa Perang Dingin yang identik dengan anti-Komunis termasuk dalam kebijakan luar negerinya. Selama Perang Dingin, Indonesia nyaris tidak melakukan hubungan “dekat” dengan negara-negara Komunis termasuk Republik Rakyat Cina (RRC)<sup>1</sup> dan sebagian besar negara berhaluan Komunis.

Menjelang Perang Dingin berakhir, Indonesia mulai berubah kebijakan luar negerinya termasuk membuka kembali hubungan bilateral dengan RRC yang dibekukan sejak peristiwa G30S/PKI 1965. Kebijakan pembekuan tersebut tidak lepas keterlibatan pemerintah RRP dalam peristiwa berdarah tersebut. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRC, namun sejak awal RRC memang cenderung dekat terutama dengan kalangan Komunis di Indonesia. Dugaan keterlibatan RRC dalam peristiwa G30S/PKI semakin menguat ketika PKI mewacanakan Angkatan ke-V yang dipersenjatai dalam rangka menghadapi Konfrontasi dengan Malaysia dengan RRC sebagai pemasok

---

<sup>1</sup> Dalam Bahasa Mandari negara Cina disebut dengan *Zhongguo*.

persenjataannya. Selain itu, kedekatan RRC dengan kelompok komunis di Indonesia juga didukung kedekatan sosiologis RRC dan hubungan etnis Cina yang banyak menjadi anggota PKI. Situasi ini menjadikan pemerintah Suharto bersikap keras kepada RRC dan resmi membekukan hubungan diplomatik tahun 1967 sebelum akhirnya normal tahun 1990 (Sukma, 2009).

Di sisi lain, politik nasional juga semakin bergeser ke kanan dalam artian semakin mengakomodir kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirnya terutama kelompok Islam. Hal ini juga dipengaruhi fakta bahwa di Dunia Islam sedang terjadi gejolak politik yang merugikan umat Islam misalnya di Afghanistan, Perang Teluk termasuk konflik di Semenanjung Balkan melibatkan tragedi pembersihan etnis (genosida) Bosnia. Selain itu, bergesernya arah politik Indonesia yang semakin ke kanan pasca Perang Dingin juga dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional di tengah meningkatnya kesadaran Islam kelas menengah di Indonesia. Apalagi ketika itu tengah gencar juga apa yang dikenal sebagai Islam politik kelas menengah pasca didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1990 oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Upaya tersebut setidaknya sebagai momentum penting eksistensi Islam politik di Indonesia yang semakin diperhitungkan meskipun pemicunya telah ada sejak tahun 1980-an terutama sejak Revolusi Islam di Iran tahun 1979 (Azra, 2006).

Gaung desakan akan suksesi kepemimpinan di Indonesia baru terasa kencang ketika menjelang Pemilu 1997 yang



merupakan pemilu terakhir bagi Presiden Suharto. Ketika awal tahun 1990-an wacana tersebut belum begitu kuat disebabkan geopolitik internasional pula masih belum terlalu besar pergeserannya mengingat yang berkuasa di Amerika Serikat masih dari kelompok Republik dan Presiden George Bush. Artinya desakan akan pergantian rezim melalui isu-isu pasca Perang Dingin yaitu demokrasi dan hak asasi manusia, masih belum kuat meskipun mulai tumbuh terutama di Asia Tenggara. Namun, hal ini berubah seketika saat AS dalam genggamannya kelompok Demokrat pasca terpilihnya Bill Clinton sebagai penguasa AS baru. Situasi ini semakin memanas pasca dukungan kalangan akademisi AS juga muncul secara provokatif menyuarakan dan mendengungkan apa yang disebut sebagai demokrasi dan benturan antar peradaban di dunia Timur (Islam) (Huntington, 1991; Huntington, 1997). Mulai saat itu juga isu-isu Perang Dingin seakan lenyap berganti dengan isu-isu hak asasi manusia, demokrasi yang berujung pada desakan suksesi kepemimpinan di Indonesia.

Posisi Indonesia semakin sulit ketika AS di bawah komando Partai Demokrat karena saat itu juga diserang dengan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia terutama yang diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Timor Leste. Padahal pada era Perang Dingin, Indonesia sama sekali tidak tersentuh dengan isu pelanggaran hak asasi manusia sama sekali. Bahkan era menjelang gejolak politik tahun 1997/1998 bermunculan juga berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dengan dukungan “asing” mulai berani menyuarakan dan mengkritik pemerintah Suharto. Ini jelas merupakan sebuah perkembangan pesat,

mengingat selama rezim Orde Baru berkuasa nyaris tidak ada LSM, media atau individu yang suaranya terdengar atau didengar penguasa (Mallarangeng, 2008). Namun suasana ketika itu jauh berbeda dan terlihat pemerintah Suharto semakin kehilangan kredibilitas. Isu terkait kebebasan berpendapat, demokrasi dan muaranya pergantian kepemimpinan menjadi topik utama menjelang saat-saat berakhirnya rezim Orde Baru. Maka muncullah slogan yang sangat terkenal untuk menggambarkan pentingnya pergantian kepemimpinan menuju pemerintahan “bersih” yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Puncak dari segala “skenario internasional” tersebut adalah pecahnya krisis ekonomi atau krisis moneter (krismon)<sup>2</sup> 1997. Akibat krisis ekonomi, masyarakat sangat terpukul terutama kalangan menengah ke bawah akibat melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok atau dikenal dengan istilah sembilan bahan pokok (sembako).<sup>3</sup> Krisis ekonomi 1997 juga bagian dari krisis ekonomi Asia yang sebenarnya hanya menimpa “sebagian saja” negara Asia misalnya Jepang, Korea, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Bagaimanapun, krisis ekonomi tersebut nyata menghantam dan memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial di Asia Tenggara termasuk di Indonesia

---

<sup>2</sup> Istilah Krismon sangat terkenal ketika masa reformasi 1997.

<sup>3</sup> Istilah Sembako juga sangat terkenal yang muncul baru ketika masa reformasi 1997. Tidak hanya istilah Sembako, pada saat Reformasi juga terkenal istilah “Turunkan Harga” di mana massa pendemo mendesak supaya pemerintah berkuasa menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Namun, “Turunkan Harga” juga bisa artikan sebagai “Turunkan Suharto dan Keluarga.”

yang telah dibangun oleh pemerintahan Suharto (Rasiah, Kee, & Doner, 2014). Di tengah berbagai himpitan masalah mulai dari isu demokrasi, hak asasi manusia hingga akhirnya menjaral ke suksesi kepemimpinan nasional, krisis ekonomi 1997 seolah-olah menjadi “senjata pamungkas terakhir” untuk merubah konstelasi politik Indonesia. Dengan krisis ekonomi 1997 yang pangkalnya masalah keuangan/moneter akhirnya berubah menjadi krisis sosial dan politik. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia, diselimuti awan kelabu, digoncang dengan berbagai aksi demonstrasi diikuti dengan aksi penjarahan, kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum (Habibie, 2006).

Isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, pemerintahan yang bersih bebas KKN seakan menjadi pembenar bagi pendesak reformasi yang tujuan akhirnya adalah pergantian rezim di tengah memburuknya ekonomi negara. Fokus para penuntut reformasi adalah bahwa sumber masalah utama terpuruknya kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia adalah rezim Suharto. Artinya solusi terbaik dari permasalahan tersebut menurut para penuntut reformasi adalah digantinya pemerintahan Suharto dan rezim Orde Baru oleh kepemimpinan baru yang bersih dan demokratis. Namun, jika ditelusiri lebih jauh sebenarnya ada faktor internasional yang mempengaruhi dan memaksa Indonesia harus menghadapi situasi sulit tersebut. Pergeseran dari isu-isu keamanan selama Perang Dingin ke isu-isu kemanusiaan terutama demokrasi dan hak asasi manusia jelas menjadi faktor penting perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Bahwa situasi internasional telah berubah jelas menjadi isu

yang harus diperhatikan. Sebab, hanya mengamati politik nasional semata-mata jelas tidak cukup untuk bisa mengurai benang kusut kemelut politik, sosial dan ekonomi tahun 1997. Bagaimanapun, Presiden Suharto akhirnya lengser pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie dalam sebuah seremonial singkat dan sederhana di Istana Negara Jakarta.

Menarik untuk dicatat bahwa jatuhnya Suharto dari tampuk kepemimpinan Indonesia merupakan dampak dari berbagai titik kepentingan politik dan ekonomi baik lokal maupun internasional. Dalam konteks lokal, jelas lengsernya Suharto akibat tekanan “sebagian rakyat” yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Jakarta. Dikatakan “sebagian” karena tidak semua kalangan masyarakat menginginkan atau pergantian Presiden Suharto yang dramatis tersebut. Sementara ada sebagian lagi, dengan segala kekurangan dan kelebihan, masih menyukai figur Suharto (Hasan, 2013). Tidak dipungkiri juga bahwa sebagian para pelaku reformasi mempunyai misi suci untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Namun, tidak sedikit yang akhirnya jatuh ke dalam pusaran kepentingan politik dan akhirnya tergelincir dari cita-cita reformasi serta jauh dari nilai-nilai idealisme (Rakyat Merdeka Online, 12 Mei 2012). Jatuhnya Suharto, justru mengakibatkan kebebasan media yang dicitatakan jatuh ke tangan para pemodal dan konglomerat dengan segala kepentingannya (Kristiawan, 2013). Lebih nestapa lagi, jatuhnya Suharto menandai menyerahnya kedaulatan Indonesia ke tangan emperium kapitalisme global pasca penandatanganan perjanjian hutang dari *International Monetary Fund (IMF)*. Berikut foto penandatanganan surat

perjanjian hutang atau *Letter of Intent (LoI)* antara Indonesia dan IMF yang menandai “takluknya” Indonesia di bawah cengkraman asing.

**Gambar 1.1. Foto legendaris penandatanganan perjanjian hutang *Letter of Intent (LoI)* antara Presiden Suharto dan Direktur Eksekutif IMF Michael Camdessus**



*Sumber: Merdeka.com (8 Juni 2015)*

Pasca jatuhnya Suharto, Indonesia memasuki era baru yang dikenal dengan Era Reformasi. Jatuhnya Suharto juga berdampak besar dalam kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia. Kebebasan menjadi isu penting yang diperoleh masyarakat Indonesia pasca dikekang pemerintah Orde Baru. Namun, apa yang pasti kejatuhan Suharto merupakan bagian penting dari skenario internasional untuk merubah peta politik di Indonesia melalui “tangan” IMF. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Michael Camdessus sendiri bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lepas untuk kepentingan politik mengganti rezim Suharto dengan dalih “pinjaman” dan skenario krisis moneter. Di harian *New York Times* Michael Camdessus menyatakan:

*“We created the conditions that obliged President Suharto to leave his job”* (The New York Times, 10 November 1999).

Dengan demikian jelas bahwa situasi di Indonesia pasca Perang Dingin terutama terkait dengan isu demokrasi yang berujung pada lengsernya Suharto tidak bisa lepas dari skenario internasional. Dari skenario internasional pada akhirnya berdampak pada konstelasi politik nasional. Reformasi dengan kata lain merupakan hasil pertemuan berbagai skenario yang saling berkaitan mulai dari Perang Dingin hingga munculnya kelompok-kelompoknya anti-pemerintah Suharto. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya dijelaskan tentang kondisi politik dan demokrasi pasca Reformasi 1998.

### **Politik Pasca Reformasi 1998**

Pasca lengsernya Suharto dan Orde Baru, maka perpolitikan Indonesia memasuki babak baru yaitu Era Reformasi. Era Reformasi juga menandai “runtuhnya bangunan demokrasi Pancasila yang sebelumnya dipraktekkan. Artinya muncul perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan demokrasi khususnya di pemerintahan. Perubahan tersebut terutama dalam aspek tiga isu penting yaitu berakhirnya isu ancaman komunis, peraturan tentang peran legislatif (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) yang baru, dan berubahnya pola hubungan antar lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (Schneier, 2009). Namun, dampak politik yang dirasakan masyarakat paling besar adalah runtuhnya praktek Demokrasi Pancasila. Sebagai gantinya, para pemangku kekuasaan

menggantinya dengan sistem demokrasi liberal *ala* Barat yang syarat dengan unsur-unsur kebebasan, pragmatis, dan cenderung bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Secara prinsip, Demokrasi Pancasila adalah praktek demokrasi dengan mengutamakan nilai-nilai dan kepribadian Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya mengutamakan musyawarah-mufakat berbanding voting dan mengutamakan untuk kepentingan umum, gotong-royong, dan mengusung norma-norma keagamaan-kemanusiaan. Dengan Demokrasi Pancasila adalah yang sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (Tjarsono, 2013; Yunus, 2015).

Dalam implementasinya pasca Reformasi, mulai ada beberapa perubahan fundamental dalam kehidupan politik ketata negara Indonesia. Misalnya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru. Dampak amandemen tersebut, ada beberapa aspek penting yang berubah dan cukup mempengaruhi kehidupan demokrasi misalnya sistem pemilu, tentang tata cara pemilihan presiden, termasuk peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu isu yang menarik adalah tentang dihapusnya syarat Presiden Indonesia yang harus “orang Indonesia Asli.” Hal ini tidak lain akibat dampak “serangan” demokrasi dan hak asasi manusia yang “anti-diskriminasi” pasca Perang Dingin. Bagaimanapun hal ini harus dilihat secara lebih teliti bahwa penghapusan syarat tersebut tidak lepas dari upaya “pelemahan” bangsa Indonesia yang ingin memperkuat kapasitas politiknya. Padahal, jika

bangsa Indonesia ingin mendefinisikan persyaratan politik bagi calon Presiden menurut perspektifnya sendiri, juga merupakan hak yang harus dihormati sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, upaya mensyaratkan calon presiden tersebut justru dianggap sebagai upaya diskriminasi.

Sebagai perbandingan misalnya, di AS sebagai salah satu negara paling demokratis dengan masyarakatnya yang sangat rasional, masih menyimpan “mitos” terutama terkait siapa yang layak menjadi presiden AS. Di AS, seorang presiden harus memenuhi syarat yaitu W.A.S.P. (M), di mana W (*White*), A (*Anglo*), S (*Saxon*), P (*Protestant*), dan M (*Male*) (MacDonald, 2015-16). Jika diterjemahkan secara bebas, yang layak menjadi presiden AS adalah mereka yang berkulit putih, keturunan Inggris, beragama protestan dan laki-laki. Artinya bahwa di AS yang sangat demokratis masih memberikan batasan dan definisi politik identitasnya dalam rangka “melindungi” kelompok tertentu atau jika bisa dikatakan juga mempraktikkan sistem ologarki politik. Di Malaysia juga sama ada semacam mitos yaitu perdana menteri Malaysia mengikuti siklus RAHMAN dan harus beretnis Melayu. Percaya atau tidak politik identitas selalu dipraktekkan di mana-mana dalam alam demokrasi. Oleh karena itu, jika di Indonesia muncul sebuah politik identitas maka merupakan sebuah kewajaran yang harus diterima.

Apa yang terjadi pasca Reformasi 1998 salah satunya adalah upaya penghapusan politik identitas terkait syarat-syarat presiden Indonesia. Menurut UUD 1945 sebelum di-amandemen yang layak menjadi presiden Indonesia adalah



“orang Indonesia asli.” Namun, pasca amandemen tersebut semua orang berhak untuk menjadi presiden Indonesia dengan latarbelakang apapun. Implikasinya jelas bahwa politik identitas yang merupakan fitrah dalam sebuah praktik politik termasuk di Indonesia sengaja dihilangkan. Upaya penghapusan politik identitas juga dilakukan dalam rangka “penegakan demokrasi” pasca Reformasi 1998. Padahal, “penegakan demokrasi” tersebut tidak lebih dari upaya sebagian kelompok “mengalahkan” kelompok lain yang juga sebuah kewajaran dalam praktik politik praktis. Upaya menghidupkan kembali gagasan kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen adalah ide yang sangat bagus dan layak didukung.

Aspek lain yang berubah pasca Reformasi 1998 adalah terkait peran lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya MPR sebelum Reformasi jelas diperlukan dalam rangka menjaga Demokrasi Pancasila itu sendiri. Dikatakan demikian karena MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pemegang amanat rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Namun pasca Reformasi dan amandemen, maka ketentuan itu berubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, MPR tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan “musyawarah” dalam menentukan presiden Indonesia. Sebagai gantinya, UUD 45 kembali diamandemen yang kemudian memunculkan Pasal 6A ayat 1 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh

rakyat.” Dampaknya, politik identitas semakin tidak relevan dan apa yang pasti, demokrasi menjadi liberal serta biaya politik semakin mahal di tengah maraknya politik uang (Fitriyah, Tanpa Tahun).

Aspek lain yang mengalami perubahan signifikan adalah terkait peran pemerintah daerah. Sebelum Reformasi 1998, sistem tatakelola terkait pemerintahan daerah adalah bersifat sentralistik. Artinya semua menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam segala aspek termasuk terkait dengan pembagian hasil sumber daya alam dan keuangan. Dampaknya tentu saja muncul ketidakpuasan daerah yang menilai kebijakan pemerintah pusat sangat tidak adil. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Imbas terbesar dari pelaksanaan undang-undang tersebut pada akhirnya adalah isu pemilihan kepala daerah yang akhirnya menjadi kewenangan masyarakat daerah. Implikasinya, praktek korupsi yang semakin merajalela termasuk munculnya fenomena “raja-raja kecil” dan politik dinasti serta suburnya nepotisme (Argama, 2005). Lebih parah lagi, adanya kontestasi politik lokal melalui pemilihan kepala daerah langsung berdampak pada semakin pentingnya peran para pemodal/ investor dalam panggung politik. mau tidak mau, calon kepala daerah akan sangat ditentukan oleh besaran modal yang dimiliki dan tentunya hal ini erat kaitannya dengan “calon penyumbang modal.” Pada akhirnya, bukan janji kampanye yang dipenuhi, kepala daerah terpilih akan sibuk memikirkan

“balik modal.” Dengan kata lain pemodal menjadi “berhala baru” dalam politik lokal di Indonesia (Mihradi, 2015).

Di sisi lain, otonomi daerah juga berdampak pada pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah. Hal ini terjadi karena pertimbangan-pertimbangan khusus yang diperlukan untuk daerah tersebut. Setidaknya ada lima klasifikasi yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan prioritas daerah otonomi khusus. Kelimanya adalah Aceh dan Papua (pertimbangan konflik dan separatisme) Batam (pengembangan ekonomi), Kalimantan Barat (perbatasan), Yogyakarta (Kebudayaan) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (ibukota negara). Bagaimanapun, sejak implementasi kebijakan tersebut pencapaiannya masih jauh dari harapan disebabkan kompleksnya permasalahan yang ada di daerah-daerah otonomi khusus tersebut (Kompas, 3 Juli 2013).

## **Politik Pasca Pemilu 2004**

Tahun 2004 menjadi periode penting transformasi politik di Indonesia pasca Reformasi 1998. Hal ini terjadi tidak lain karena pelaksanaan Pemilu 2004 yang menjadi tonggak perubahan kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama dalam sejarah di Indonesia yang melaksanakan dengan sukses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung. Agenda Pemilu 2004 sebagaimana penjelasan sebelumnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 6A ayat 1 pasca amandemen. Pilpres langsung 2004 menjadi sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia karena pemilihan Presiden

untuk pertama kalinya ditentukan oleh rakyat. Kemungkinan sebagian Sedangkan besar hampir tidak bisa membayangkan negara Indonesia akan memasuki fase sejarah demikian. Sejak tahun 2004, minimal masyarakat Indonesia harus mulai membiasakan diri dengan dua tahapan pemilu yang berbeda yaitu 1) Pemilu Legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai dari tingkat Kabupaten (DPRD), Provinsi (DPRD) dan Pusat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 2) Pemilu Presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau koalisi partai politik. Bukan hanya itu, masyarakat juga mulai membiasakan diri dengan tahapan pemilu yang “melelahkan” dan menguras energi serta emosi. Karena, harus mencoblos sebanyak dua kali dalam Pilpres disebabkan belum terpenuhinya syarat pemenang Pilpres yang 50%+1 sebagai akibat banyaknya pasangan calon presiden. Sehingga, dalam tahun 2004 saja masyarakat Indonesia mencoblos tiga kali masa pencoblosan yaitu DPR, dan dua putaran Pilpres.

Pasca 2004, masyarakat Indonesia juga diajak untuk berpesta demokrasi dengan banyaknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia. Ini juga menjadi pengalaman pertama bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin daerahnya yang sebelumnya selalu ditentukan oleh DPRD. Tahun 2005, menjadi tahun bersejarah di mana untuk pertama kalinya pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat benar-benar diajak untuk “berpesta” setelah setahun sebelumnya melakukan tiga tahapan pemilu. Masyarakat diajak untuk memilih pemimpin daerahnya

sesuai kehendak dan dikenal serta “paling dekat” dengan rakyat. Dengan proses ini harapannya tentu, masyarakat tidak akan “salah pilih” pemimpin yang ujungnya justru akan menyengsarakan rakyat. Selain itu, dengan adanya Pilkada langsung diharapkan rakyat juga semakin mudah mengawasi dan mengontrol kinerja pemimpin daerahnya karena “jaraknya” yang dekat dan sudah “dikenal.” Intinya, dengan adanya Pilkada langsung diharapkan masyarakat semakin tumbuh kesadaran berdemokrasinya dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Lebih penting lagi, pemerintah daerah akan semakin leluasa untuk mengelola sumber daya daerahnya dan digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kemajuan daerah lebih cepat, secepat-cepatnya dibanding era sebelumnya.

Era pasca 2004 benar-benar menjadi angin segar di berbagai daerah karena kewenangan yang besar dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bebas melakukan improvisasi pembangunan tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Meskipun otonomi daerah telah memberi wewenang besar kepada daerah terutama dalam kebijakan keuangan, namun tampaknya belum memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah. Walaupun demikian, ada beberapa daerah yang “maju” mampu memanfaatkan desentralisasi keuangan untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah tampaknya tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur terutama sumber daya manusia yang memadai. Dampaknya meskipun banyak sekali keleluasaan daerah, hasilnya masih jauh dari harapan. Justru yang muncul ketimpangan sosial semakin melebar. Sebagian daerah tidak

mempunyai perancangan pembangunan dan fiscal yang bagus (Nurana & Muta'ali, 2012). Kecenderungannya justru otonomi menjadi “kue” untuk diperebutkan para elite yang berkuasa di daerah.

Pasca 2004, iklim demokrasi Indonesia jelas tidak bisa lepas dari sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY menjadi figur penting dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia sejak 2004. Tercatat selama kepemimpinan SBY, banyak sekali hak-hal yang menjadi penggambaran perubahan kehidupan demokrasi. Misalnya terkait peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut sering menjadi diskursus hampir di semua lapisan masyarakat mulai elite paling atas hingga rakyat biasa. Diskursus tersebut jelas menggambarkan bagaimana iklim demokrasi yang semakin bebas dan terbuka. Bahkan bisa dikatakan setiap terjadi perbedaan pandangan hampir selalu menjadi kegaduhan politik yang menguras energi semua pihak. Hal ini tentu jarang terjadi ketika rezim Presiden Suharto yang sangat menjaga stabilitas politik, namun juga diiringi dengan roda pembangunan yang terus berjalan.

Isu-isu sosial, ekonomi dan politik nasional hampir setiap hari menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan di tengah liberalisasi media. Namun harus diberikan catatan bahwa diskursus yang berujung pada kegaduhan politik juga menunjukkan masyarakat dan elite sendiri “belum siap” dalam menghadapi era keterbukaan.

Ketidaksiapan tersebut berdampak pada cara pandang dan sikap sebagian besar masyarakat yang cenderung pragmatis dan keluar dari norma-norma dan etika berpolitik bangsa Indonesia. Bukan berarti era sebelumnya lebih baik. Tetapi paling di era sebelumnya masyarakat tidak kehilangan banyak energi dan roda ekonomi berjalan dengan baik. Jika ada yang berpendapat ini tidak sehat, maka wajar karena yang menyuarakan demikian tentu pihak-pihak di luar pemerintahan. Terlepas dari berbagai masalah tersebut, pasca 2004 justru banyak kegaduhan-kegaduhan politik bermotif kebebasan demokrasi yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan elite semata-mata, misalnya dalam kasus hubungan Indonesia-Malaysia (Schofield & Storey, 2005).

Pasca 2004, bisa dikatakan era yang menentukan bahwa Indonesia mulai masuk dalam sebuah era politik liberal dan mulai meninggalkan tradisi gotong-royong, musyawarah dan mufakat ciri dari Demokrasi Pancasila. Dikatakan demikian karena semua proses politik pada akhirnya ditentukan oleh suara terbanyak. Sebaliknya, unsur-unsur musyawarah-mufakat sudah tidak diberlakukan lagi. Mulai dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hingga Kepala Desa semua melalui pemungutan suara langsung yang membutuhkan biaya sangat besar. Sebelumnya hal demikian tidak ada dan selalu dilakukan dengan musyawarah perwakilan. Adanya konsep “*one man one vote*” jelas menunjukkan bahwa kekuatan modal memainkan peran vital dalam menentukan arah politik negara. Sedangkan masyarakat yang katanya “pemilik kedaulatan” belum siap dengan kondisi tersebut. Akhirnya, permainan politik uang untuk “membeli” suara

rakyat hampir sudah menjadi kebiasaan. Kondisi ini mungkin sangat berbeda jika tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sudah baik, kesadaran politik dan etika politik sudah menjadi budaya, maka apapun bentuk tindakan tidak bermoral yang menghasilkan politisi busuk bisa dibendung.

Pasca 2004-2014 atau dua periode kepemimpinan Presiden SBY, harus diakui banyak perubahan yang dilakukan terutama dalam konteks pembangunan demokrasi. Antara pencapaian penting tersebut adalah pengakuan dunia internasional kepada Indonesia sebagai salah satu negara paling demokratis. Inisiasi-inisiasi SBY untuk meningkatkan citra Indonesia di mata internasional layak mendapatkan apresiasi. Termasuk aspek positif otonomi daerah dan pemberantasan korupsi yang menjadikan tata kelola pemerintahan semakin bersih dan transparan. Hal ini tentu sulit dijumpai ketika era Orde Baru. Namun, dalam konteks yang lain terkait kehidupan demokrasi, masyarakat jelas belum siap dengan era persaingan politik yang sangat liberal. Oleh karenanya, situasi ini berdampak pada era berikutnya yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum siap hidup dalam persaingan politik, ekonomi dan sosial sangat bebas. Apalagi, aspek politik identitas yang menjadi penopang rakyat kecil semakin diberangus dan kalah oleh “ideologi” pemilik modal. Sangat disayangkan juga, ideologi yang diusung oleh para pemilik modal cenderung bertentangan dengan arus kebangsaan dan hanya mementingkan keuntungan. Keadaan ini tentu menjadi berbeda jika objektif para pemilik modal sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.



Tahun 2014 juga merupakan masa-masa yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimulai dengan inisiasi SBY “membudayakan” transisi kepemimpinan yang berjalan dengan penuh persahabatan melalui sebuah seremonial sederhana tetapi syarat akan pesan kebersamaan sebagai anak bangsa. Ini tentu menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia terkait tradisi baru tersebut yang sebelumnya tidak ada dan mustahil berjalan dengan baik. Mulai dari Sukarno-Suharto, Suharto-Habibie, Habibie-Gus Dur, Gus Dur-Megawati, dan Megawati-SBY berlangsung dengan suasana yang tidak bersahabat. Menurut SBY:

“Transisi ini penting dan apa yang kita lakukan penting, dan dengan niat yang baik, saudara mengetahui sudah beberapa kali mengatakan, saya dulu tidak beruntung mengalami masa transisi ini sehingga jauh lebih baik kalau pemerintahan yang lama memberikan sesuatunya agar lebih sukses dan lebih siap lagi” (Detik, 6 September 2014).

Dengan demikian jelas bahwa SBY pada dasarnya ingin mewariskan (*legacy*) sebuah tradisi yang baik dalam kehidupan berbangsa terutama dalam konteks suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan lancer dan penuh rasa persaudaraan. Selain itu, dengan adanya proses tersebut tentu mau tidak mau, SBY juga ingin menunjukkan sebagai negarawan sejati. Bagaimanapun, pasca SBY masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan hasil Pemilu 2014.

Pilpres 2014 tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu pemilu paling menarik sekaligus menguras energi bangsa termasuk berubahnya peta politik nasional yang semakin dinamis. Jika ditelusuri lebih jauh, muaranya tentu adalah pra-Pilpres 2014 yang penuh dengan dinamika persaingan dan sangat emosional. Sebagai ilustrasi, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun komposisinya sebagai berikut:

<b>No. Urut Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden</b>	<b>Partai Pendukung</b>
1. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	1. Partai Gerindra 2. Partai Golkar 3. Partai PPP 4. Partai PKS 5. Partai PAN 6. Partai Demokrat
2. Joko Widodo-Jusuf Kalla	1. Partai PDI-P 2. Partai Hanura 3. Partai NasDem 4. Partai PKB

Komposisi di atas sebagaimana diketahui terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan nomor urut 1, dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pasangan nomor urut 2. Pada akhirnya koalisi tersebut benar-benar membelah masyarakat Indonesia akibat adanya dua kubu tersebut. Meskipun diduga kuat banyak kecurangan, namun

menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie:-

“Pilpres lebih baik ini, walaupun lebih tegang. Ini membelah dua warga. Kita ini belum pernah kayak Amerika (hanya dua pasang calon)”( Merdeka.com, 4 Agustus 2014).

Terbelahnya masyarakat ketika itu tidak lain disebabkan adanya kompetisi politik dengan menggunakan isu-isu yang memancing emosi. Misalnya kampanye hitam dengan menggunakan isu agama, ideologi dan lain-lain melibatkan berbagai kalangan termasuk media massa yang “terbelah” dan di media sosial. Hingga memanasnya situasi tersebut memunculkan apa yang dikenal dengan “Pasukan Nasi Bungkus.” Istilah ini muncul pada awalnya untuk mendiskreditkan Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini dilihat sebagai “orang bayaran” oleh kelompok tertentu. Namun, dalam Pilpres 2014 istilah tersebut semakin populer pasca menguatnya dugaan pengerahan “Pasukan Nasi Bungkus” untuk mendukung calon tertentu, menggiring opini dan melawan opini negatif lawan politik. Pada calon pasangan Prabowo-Hatta, membantah adanya “Pasukan Nasi Bungkus” yang sebenarnya merujuk kepada relawan itu sendiri. Sedangkan pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla, mengakui keberadaan “Pasukan Nasi Bungkus” sebagai motor penggerak tim sukses dengan catatan, tidak memberikan bayaran kepada “Pasukan Nasi Bungkus” tersebut (RMOL, 23 April 2014).

Adanya hal-hal tersebut sebagaimana penulis rasakan, memang masyarakat seakan terbelah dalam kondisi tersebut.

Lebih jauh lagi, masyarakat ikut terseret dalam emosional dan friksi politik yang sangat tajam di tengah masyarakat. Isu-isu berbaur agama dan ideologi atau dikenal dengan SARA (suku, ras, agama) nyata menjadi senjata ampuh untuk memobilisasi masa meskipun sangat kontroversial di era demokrasi. Oleh karenanya, kehadiran Prabowo dalam acara pelantikan Presiden terpilih Jokowi, jelas memberikan kesejukan luar biasa pasca Pilpres 2014. Sebagian pakar menyarankan perlunya rekonsiliasi nasional untuk menghentikan “ketegangan” tersebut. Intinya, ketegangan tersebut tidak lain adalah penggunaan sentimen agama yang sangat dilarang dalam sistem demokrasi sebagaimana pendapat filsuf Inggris John Lock (1632 – 1704). Artinya bagi John Locke, harus dipisahkan antara urusan agama dan politik atau dikenal dengan istilah sekulerisme. Sedangkan konsep John Locke sendiri tentu tidak selamanya sesuai dengan kepribadian politik, budaya dan agama di Indonesia (Suhadi, 8 Juli 2014).

Pasca pelantikan Jokowi tahun 2014 tampaknya suhu politik dan demokrasi Indonesia belum reda sepenuhnya. Hal ini karena sisa-sisa “kontestasi 2014” masih terus muncul dalam berbagai isu politik yang melibatkan kedua kubu. Namun, perseteruan tersebut semakin nampak ketika masuk tahun 2016 dan tahun 2017 bersamaan dengan Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta<sup>4</sup>. Pilkada DKI seakan sebagai pengulangan Pilpres 2014 disebabkan mempertemukan kandidat-kandidat yang didukung kuat oleh kedua belah pihak sebagaimana formasi Pilpres 2014. Kandidat tersebut adalah

---

<sup>4</sup> Selanjutnya disebut DKI saja.

Basuki T. Purnama (Ahok)- Djarot S. Hidayat (didukung Jokowi), Agus H. Yudhoyono-Silviana Murni (SBY), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Prabowo). Sebagaimana diketahui bersama, pemenangnya adalah pasangan Anies-Sandi setelah melalui dua putaran Pilkada yang menguras energi dan sangat emosional. Kemenangan Anies-Sandi tidak saja dirayakan oleh masyarakat DKI, namun juga seluruh pendukungnya di Indonesia meskipun bukan warga DKI. Bagaimanapun, kemenangan pasangan Anies-Sandi tidak lepas dari bergulirnya bola panas isu agama yang dihembuskan sebagai senjata ampuh. Tetapi perlu dicatat bahwa hembusan isu agama tersebut muncul tidak lain akibat “kecerobohan” calon Ahok sendiri dalam mengeluarkan pernyataan hingga akhirnya muncul isu skandal “Al Ma’idah Ayat 51.”

Pilkada DKI jelas menjadi ujian bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, di tengah-tengah kontroversi pernyataan Ahok tersebut, kembali mengemuka wacana tentang sekularisasi politik. Tentu saja gagasan tersebut dimunculkan untuk membela Ahok yang tersangkut masalah “penistaan agama.” Dalam hal ini tentu, lawan politik Ahok dengan mudah menggunakan isu agama untuk menghantam Ahok yang itu merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat agamis Indonesia. Tindakan Ahok yang terlanjur menghina agama Islam dilanjutkan dengan ide sekularisasi agama tentu sangat tidak tepat. Di sisi lain, ada pihak yang ingin memisahkan agama dengan politik dan di sisi lain dilakukan pelecehan agama. Apalagi pelecehan tersebut bersentuhan langsung dengan mayoritas umat Islam yang sedang “dibendung”

politik identitasnya. Sebaliknya kasus Ahok justru semakin menguatkan politik identitas terutama umat Islam yang sudah sekian lama terpinggirkan di panggung politik Indonesia. Kasus Ahok juga mempertegas bahwa permainan modal sangat penting dalam sebuah kontestasi politik di Indonesia. Artinya, Pilkada DKI sebagai gambaran bahwa biaya politik di Indonesia sememangnya sangat mahal. Sebagaimana informasi yang tersebar, agenda pemilu 2014 mulai dari Pileg hingga Pilpres telah menelan biaya hingga Rp. 16,2 Trilyun (Perpustakaan Bappenas, 2014). Sebuah angka yang sangat fantastis.

Akhirnya, Pilkada DKI semakin mempertegas bahwa pasca Pilpres 2014 isu-isu politik terkait sekulerisme, sentimen agama, dan politik identitas yang semakin menguat. Dalam hal ini tentunya sangat menarik untuk membahas tentang umat Islam sendiri yang menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, bagian berikutnya akan membahas tentang posisi umat Islam di tengah berbagai perubahan politik khususnya pasca Perang Dingin dan Reformasi tahun 1998.

## **Masa Depan dan Posisi Politik Umat Islam**

Pasca Reformasi dan Perang Dingin, posisi politik umat Islam menjadi bahan perbincangan yang menarik seiring dengan semakin terakomodasinya kelompok Islam di lingkaran kekuasaan era Suharto. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terakomodasinya kelompok Islam salah satunya diwujudkan dengan pembentukan ICMI

dan munculnya isu “Jenderal Merah” dan “Jenderal Hijau” (Muna, 1999). Presiden Suharto sendiri juga menunjukkan komitmennya dengan masalah-masalah umat Islam yang ditunjukkan dengan kunjungan kontroversial ke medan konflik di Bosnia-Herzegovina ketika Perang Teluk. Langkah tersebut dilakukan Presiden Suharto adalah untuk menunjukkan kepada umat Islam di Indonesia bahwa beliau sangat peduli dengan masalah umat. Demikian halnya umat Islam semakin simpatik kepada Suharto terlebih setelah menunaikan rukun Islam ke lima tahun 1991.

Menjelang lengsernya Suharto, fenomena menguatnya Islam politik di Indonesia memang menunjukkan tanda-tanda yang cukup jelas. Selain ditunjukkan dengan berdirinya ICMI, bangkitnya Islam politik juga ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan semangat “ber-Islam” di kalangan masyarakat terutama menengah ke atas. Selain itu, pasca Reformasi mulai tubuh partai-partai Islam di tengah menjamurnya partai-partai sekuler. Dari 48 partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif 1999, ada tujuh partai Islam yaitu 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2). Partai Bulan Bintang (PBB), 3). Partai Keadilan (PK), 4). Partai Nahdhatul Ummat (PNU), 5). Partai Masyumi, 6). Partai Kebangkitan Ummat, dan 7). Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu 1999 juga diikuti oleh dua partai yang berbasis masa Islam meskipun tidak menyatakan sebagai partai Islam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (berbasis Nahdhatul Ulama, NU) dan Partai Amanat Nasional (berbasis Muhammadiyah). Artinya, sebagian besar partai di Indonesia berbasis selain Islam, baik berhaluan nasionalis maupun sekuler.

Pemilu 1999 menjadi penggambaran yang jelas bahwa meskipun tumbuh kesadaran Islam politik di Indonesia, namun pencapaian partai politik Islam masih sangat mengecewakan. Sebagian besar partai Islam hanya mendapatkan suara yang sangat kecil dibanding suara partai non-Islam. Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saja yang memperoleh suara tertinggi di antara partai-partai Islam. Perolehan suara PPP meskipun terbesar di antara partai Islam, namun ternyata hanya sebesar 12% dari total suara Pemilu 1999. Demikian halnya dengan dua partai lain non-Islam tetapi berbasis massa Islam yaitu PKB dan PAN juga memperoleh suara yang sangat kecil masing-masing 11% dan 7,36%. Bahkan Pemilu 1999 juga diwarnai dengan aksi penolakan 24 partai peserta pemilu atas hasil penghitungan suara yang dinilai belum jujur dan adil sebagaimana tujuan pemilu. Aksi penolakan tersebut salah satunya diinisiasi oleh kelompok partai Islam terkait *stembus accord* atau pengalihan suara dari partai yang tidak lolos ke partai yang lolos karena dinilai merugikan. Walau bagaimanapun, hasil pemilu 1999 dinilai sah setelah dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden B.J. Habibie (Komisi Pemiluhan Umum, 2008).

Pada intinya, posisi politik umat Islam pasca Perang Dingin secara umum masih rendah dibanding misalnya dua pemilu yaitu 1955 dan 1971. Di kedua pemilu tersebut dikatakan suara umat Islam masih sangat kompak dan kuat terutama untuk mendukung aspirasi politik umat Islam. Di era Orde Baru dengan segala kebijakannya yang sangat represif, nyata berhasil membonsai dan membatasi ruang gerak kelompok politik umat Islam untuk berkembang. Langkah pemerintah



Orde Baru tersebut tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan semua sumber daya politik mulai rasionalisasi partai politik, kekuatan birokrasi dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dampaknya, pasca Reformasi, suara umat Islam masih belum bisa bangkit dan kompak akibat masih kuatnya pengaruh Orde Baru di segala lini. Demikian juga ide-ide dan gagasan umat Islam tidak bisa disuarakan dengan jelas akibat munculnya pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri (Basalim, 2002).

Ketidakkompakan umat Islam tersebut jelas ditunjukkan dengan pencapaian partai-partai Islam sendiri yang sangat mengecewakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa umat Islam belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran partai Islam meskipun jelas-jelas mengusung ide-ide Islam. Bahkan pasca tahun 1999, partai-partai Islam sampai harus berjuang lolos dari ambang batas partai (*electoral threshold*) atau tersingkir dari kontestasi politik di Indonesia. Misalnya Partai PK yang harus mengganti namanya menjadi PK Sejahtera (PKS) dan PBB yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tahun 2014. Intinya pasca Orde Baru dan Perang Dingin partai-partai Islam di Indonesia belum bisa berbicara pencapaian, tetapi kerja keras dahulu agar tetap bisa mengikuti pemilu-pemilu selanjutnya.

Kondisi di atas tentu semakin membuat partai-partai Islam dijauhi oleh umat di tengah berbagai kasus yang menimpa dan melibatkan tokoh-tokoh partai Islam. Pada saat yang sama, geopolitik politik internasional juga kurang berpihak kepada umat Islam pasca peristiwa Serangan 11

September 2001 di New York. Pasca kejadian tersebut, citra umat Islam sangat buruk dan digambarkan oleh media-media barat serta media pendukungnya sebagai umat yang dekat dengan aktivitas terorisme dan kekerasan. Islam yang *rahmatan lil 'alamin* seolah-olah hanya mengajarkan apa yang sering disebut media sebagai *Jidah* dan disamakan dengan *Qital* (perang). Sedangkan faktanya, ajaran Islam sangat komprehensif dan tidak terbatas kepada satu ajaran saja. Sayangnya pasca serangan di New York berbagai aksi terorisme di Indonesia juga melibatkan “orang-orang Islam.” Pada akhirnya, sadar atau tidak sadar, seolah-olah sudah dirancang dengan rapi upaya-upaya untuk “membonsai” suara umat Islam. Hal tidak lain akibat konsekuensi geopolitik AS pasca Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Munculnya isu “benturan antar peradaban” dilanjutkan dengan “perang melawan terorisme” adalah strategi yang dimunculkan untuk memuluskan kebijakan luar negeri AS pasca Perang Dingin (Sukma, 2003). Faktanya, yang dimunculkan sebagai teroris hanya kelompok Islam “garis keras” meskipun aksi dan kejahatan terorisme tidak mengenal agama. Apa yang pasti, agama Islam mendapat pelabelan yang terstruktur mulai Islam garis keras (fundamentalisme), Islam radikal dan akhirnya teroris (Bustamam-Ahmad, 2003).

Fakta bahwa di dalam umat Islam sendiri ada kelompok-kelompok yang menganut paham tersebut haruslah diakui. Namun, sebagian besar umat Islam tentu masih waras dan sangat rasional dalam memperjuangkan aspirasi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Terlebih dalam diri umat Islam Indonesia, nuansa kemajemukan dengan segala

konsekuensinya adalah darah daging yang sudah ada sejak lahir di bumi nusantara. Bahwa umat Islam ingin memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik adalah sebuah langkah yang sah di alam demokrasi. Akan tetapi hal ini tidak mudah meskipun telah diusahakan melalui jalur-jalur konstitusional sejak sebelum kemerdekaan.

Menurut Taufik Abdullah, ada tiga alasan pokok yang mendorong umat Islam berpolitik. Ketiganya adalah 1) Islam tidak mengenal sekulerisme yang memisahkan negara dan masyarakat sebagai sebuah realitas, 2) umat Islam jelas terlibat secara serius dalam proses pembentukan negara dan bangsa di Indonesia, 3) realitas bahwa Islam sebagai mayoritas wajib dipertimbangkan secara politik (Abdullah, 1987). Ketiga fondasi tersebut juga yang disadari penuh oleh kelompok-kelompok di luar mainstream umat Islam untuk membendunginya berkembang. Karena jelas jika tidak dengan sistem politik yang semakin terbuka dan mengedepankan suara mayoritas, posisi umat Islam sangat strategis. Oleh karena itu, wajar jika ada usaha-usaha dari pihak di luar kelompok Islam untuk melakukan apa yang disebut dengan “depolitiasi Islam” atau pembonsaian politik umat Islam. Bahkan dilakukan jauh hari pasca kemerdekaan Indonesia, meskipun realitas umat Islam berkontribusi besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Mutawakkil, 2009).

Realitas di atas tampaknya terus berkembang sampai Suharto jatuh, digantikan era Reformasi dan posisi umat Islam tetap tidak signifikan. Betul ada dua presiden yang dikatakan

“pro-umat Islam” yaitu B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun hanya berumur pendek. Keduanya juga diwarnai dengan dinamika internal umat Islam yang tidak mudah untuk disatukan. Akhirnya tiba momen penting umat Islam untuk kembali mengkonsolidasikan secara politik. Momen tersebut adalah Pilkada DKI 2017 yang akhirnya dimenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Keduanya adalah hasil didikan “demokrasi” Barat dan menghabiskan masa pendidikannya di AS. Keduanya menang mutlak pada putaran kedua atas pasangan petahana Basuki Purnama-Djarot S. Hidayat. Apa yang dimaksud dengan momen umat Islam tersebut adalah terkonsolidasinya umat Islam dalam satu isu yaitu penistaan agama oleh calon petahana Basuki Purnama. Konsolidasi umat tersebut juga dibumbui dengan sentiment etnis dan agama di tengah realitas Jakarta bahwa etnis Pribumi nyata terpinggirkan oleh etnis dan agama minoritas.

Bagi sebagian pihak yang “alergi” dengan politik identitas, mungkin sangat menyakitkan bahwa Pilkada DKI dibumbui dengan isu-isu berbau SARA. Namun, bagi mereka yang sadar bahwa politik adalah salah satu jalan memperjuangkan keberpihakan, maka hal tersebut sebuah kemenangan. Banyak yang lupa bahwa di alam demokrasi, semua ditentukan oleh suara mayoritas. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, maka akan keluar sebagai pemenang. Realitas di lapangan (DKI dan Indonesia umumnya) menunjukkan bahwa kelompok minoritas yang sudah menguasai berbagai sektor, ingin juga menguasai politik di saat nasib Pribumi kian terpinggir. Dalam situasi ini, disaat demokrasi yang semakin liberal, maka

kekuatan modal yang dimiliki minoritas akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan hegemoninya. Isu-isu pluralisme dan multi-kulturalisme menjadi senjata ampuh untuk melindungi kepentingan minoritas dan kekuatan modalnya. Akhirnya memilik suara mayoritas bisa dibungkam dengan media-media bayaran dan survey-survey bayaran. Dalam situasi ini, jelas ide-ide politik identitas yang dimiliki kelompok mayoritas dan dibenarkan dalam iklim demokrasi, lenyap seketika.

Oleh karena itu, Pilkada DKI 2017 menjadi momen penting konsolidasi umat Islam yang sekian lama telah mengalami peminggiran peran politik atau depolitisasi oleh berbagai pihak. Namun, tantangan tidak mudah bahkan semakin berat disebabkan konsolidasi tersebut berhadapan dengan kekuatan modal yang tidak terbatas. Sebagai umat Islam yang percaya akan kekuasaan Allah, tentu tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah berkehendak. Kekuasaan adalah milik Allah dan tugas manusia hanyalah berusaha sekuat tenaga. Hasil semuanya diserahkan kepada Allah Swt. Pilkada DKI 2017 tidak lain adalah kehendak Yang Maha Kuasa sebagai peringatan bahwa “kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.” Demikian petuah Sayyidina Ali Bin Abi Thaalib, menantu Rasulullah dan Amirul Mu’minin yang keempat.

Akhirnya, terkait dengan proyeksi kekuatan umat Islam kedepan dalam kontestasi politik di Indonesia, maka kuncinya ada pada idealitas umat Islam dan konsolidasi kekuatan elite umat. Idealitas ditempatkan yang pertama karena sepanjang

umat masih idealis, maka kemenangan yang akan didapat. Karena, meskipun digoncang dengan berbagai isu dan godaan, jika idealisme umat kokoh maka tidak akan tergoyahkan walaupun elite umat Islam keropos dan pragmatis. Sebaliknya, kekuatan idealisme umat Islam akan semakin berlipat ganda jika elite umat Islam melalui kekuatan politik formal mampu berkonsolidasi dengan baik. Jika tidak maka siap-siap akan ditinggalkan umat yang sudah mempunyai idealisme sendiri. Adapun momen tersebut tampaknya besar kemungkinan akan selalu ada kedepan di tengah kompleksitas bangsa Indonesia yang dinamis dan majemuk. Salah satu faktornya adalah keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak akan terbandung oleh siapapun.

## Kesimpulan

Dengan demikian, dari pembahasan di atas maka bisa ditarik beberapa kesimpulan. **Pertama**, bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin nyata berdampak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perubahan isu politik internasional dari perang melawan komunisme ke isu demokrasi dan hak asasi manusia jelas mempengaruhi perubahan politik, sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini masyarakat Indonesia jelas belum sepenuhnya siap menerima perubahan tersebut. Dan yang terjadi adalah ketidakmatangan berpolitik dan berdemokrasi baik di tingkat elite maupun di masyarakat bawah. Dibuktikan dengan masih banyaknya indikator rendahnya tingkat demokrasi misalnya “serangan fajar, koruspi, dan pengaruh pemodal.” Kedua, bahwa pasca Reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945,

nasib dan politik identitas kelompok pribumi mayoritas semakin terpinggirkan. Meskipun di alam demokrasi semua ditentukan oleh suara mayoritas. Selain itu, ada upaya-upaya penghapusan demokrasi ala Indonesia yaitu Demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan bukan ditentukan oleh suara terbanyak semata-mata.

**Kedua**, pasca Perang Dingin disusul dengan Reformasi 1998, mengakibatkan banyaknya perubahan kehidupan demokrasi di Indonesia yang sangat penting yaitu peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dampaknya MPR tidak lagi sebagai lembaga terpenting yang mewakili rakyat untuk melakukan “musyawarah” dalam menentukan pemimpin negara. Artinya dengan sendirinya menggerus politik identitas sebagai landasan masyarakat bawah semakin dan demokrasi menjadi liberal tidak terkontrol akibat dominasi para pemodal dan politisi tamak. **Ketiga**, liberalisasi demokrasi yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila juga diartikulasikan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak sebagai konsekuensi penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bukannya perbaikan yang muncul, justru tren yang muncul adalah adanya “raja-raja kecil” dan politik dinasti serta nepotisme di daerah. **Keempat**, indikasi adanya permainan modal juga semakin jelas dalam Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Hal ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Artinya masyarakat sebetulnya belum siap hidup menghadapi demokrasi liberal yang penuh dengan persaingan politik, ekonomi dan sosial

tak terkawal. Lebih-lebih politik identitas semakin tergerus sebagaimana digambarkan dalam Pilkada DKI 2017 yang akhirnya terpaksa membawa sentimen agama dan etnis. **Kelima**, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia jelas sangat dirugikan meskipun pada dasarnya kesejahteraan ditujukan untuk semua kalangan. Namun fakta sosiologis menunjukkan bahwa ada upaya-upaya depolitisasi peran politik umat Islam melalui berbagai skenario politik. Lagi-lagi semua diprakarsai oleh para pemilik modal yang semakin menggurita di Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, etika dan nilai-nilai lokal sebagai mayoritas. Akhirnya, jelas bahwa praktik demokrasi di Indonesia sudah melenceng dari konsep demokrasi umumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan konsep Demokrasi Pancasila, semakin menjauh dibuktikan dengan semakin terpinggirnya nilai-nilai Pancasila akibat dominasi tekanan modal. Pancasila digunakan tidak lebih sebagai pembenar atas apa yang dilakukan oleh kelompok politik beserta pendukung modalnya.





## **BAB 3**

# **Demokrasi dan Malaysia Pasca Perang Dingin: Isu Reformasi dan Dominasi Politik Melayu**

BAB ini membahas tentang politik dan dinamika demokrasi di Malaysia pasca Perang Dingin. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, berakhirnya Perang Dingin jelas berdampak kepada dinamika politik di Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris dan terlibat secara aktif dalam percaturan politik internasional khususnya selama Perang Dingin. Bagaimanapun dinamika politik di Malaysia jelas lebih stabil dibanding dengan misalnya Indonesia. Meskipun terjadi friksi tajam di dalam negeri akibat politik rasial yang dijalankan, namun nampak bahwa iklim ekonomi dan pesatnya pembangunan merupakan bukti bahwa demokrasi lokal ala Malaysia mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sehingga, sangat menarik untuk diketahui apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia pada era tersebut, walaupun juga terdampak oleh krisis ekonomi Asia. Faktanya, Malaysia bisa keluar krisis dan bertahan menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang sangat mengesankan.

Oleh karena itu, bab ini dibagi menjadi enam bagian yaitu (1) Malaysia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin, (2) Malaysia, Guncangan Reformasi dan Keberhasilan Keluar Krisis, (3) Malaysia Pasca Mahathir Mohamad, (4) Seputar Kasus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) dan Implikasinya, (5) Malaysia dan Masa Depan Politik Umat Islam, dan (6) Kesimpulan.

## **Malaysia dan Geopolitik Pasca Perang Dingin**

Pasca Perang Dingin, Malaysia juga menghadapi persoalan yang sama terkait tantangan era baru politik internasional pasca runtuhnya Uni Soviet dan kemenangan kapitalisme. Bangkitnya apa yang dinamakan globalisasi tampaknya sangat disadari betul oleh Malaysia, khususnya pemerintahan Mahathir Mohamad bahwa itu merupakan bagian dari skenario Barat. Munculnya isu-isu baru yang cukup menantang dan menekan banyak negara yaitu demokrasi dan hak asasi manusia, menjadi perhatian serius pemerintahan Malaysia awal tahun 1990-an. Apa yang disampaikan Malaysia seolah menjadi gambaran sebenarnya bahwa selama ini negara-negara kecil selalu menjadi obyek politik Barat tatkala secara ekonomi dan politik kalah dibandingkan Barat. Negara-negara Dunia Ketiga termasuk Malaysia dan Indonesia seakan harus “mengekor” kepada apa saja yang dikehendaki Barat termasuk dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Barat menginginkan negara Dunia Ketiga harus melakukan apa saja yang diinginkan Barat demi menyukkseskan agenda politiknya yang sebetulnya mereka juga tidak melakukannya. Bahkan Barat sendiri seringkali melanggar nilai-nilai

yang diperjuangkannya misalnya mendukung rezim anti-demokrasi dan anti-hak asasi manusia tetapi mendukung Barat sebagaimana dipraktikkan selama Perang Dingin. Oleh karena itu, menurut Mahathir pasca Perang Dingin menjadi momentum untuk melawan dominasi Barat yang selama ini selalu memaksakan kehendak dan merugikan negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini disampaikan dengan jelas oleh Mahathir Mohamad dalam agenda *International Conference on the 'Future of Asia,'* yang diadakan di Tokyo tahun 1995. Secara umum, Mahathir mengatakan bahwa negara-negara Asia khususnya tidak seharusnya terlalu merujuk apa yang diinginkan Barat. Karena tujuannya jelas yaitu negara-negara Dunia Ketiga akan “didikte” untuk mengikuti “aturan main” ekonomi internasional sebagaimana standar Barat. Misalnya terkait isu demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal Barat yang jelas akan selalu lebih depan karena sudah terikat dengan pakta ekonomi lebih kuat misalnya melalui Uni Eropa dan perjanjian perdagangan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Agreement*, NAFTA) di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) (Gomez, 2007).

Penegasan Mahathir Mohamad tersebut jelas mengindikasikan bahwa Malaysia pada dasarnya sudah siap dengan segala konsekuensinya yang ditimbulkan pasca Perang Dingin dan menguatnya gejala globalisasi. Dalam hal ini kontestasi komunis-kapitalis bagi Malaysia seolah sudah using berganti dengan isu-isu di luar itu yaitu ekonomi pasar, demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan Malaysia telah mengakhiri jauh lebih awal perseteruannya dengan komunis dibanding Indonesia yang baru melakukannya tahun 1989 pasca

perjanjian normalisasi hubungan Indonesia-Cina (lihat bab 2). Sedangkan Malaysia sudah melakukannya pada tahun 1974 tepatnya tanggal 30 Mei dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak kemerdekaan Malaysia di Beijing. Mulai saat itulah hubungan Malaysia-Cina kembali normal meskipun Cina sebelumnya sangat mendukung keberadaan Partai Komunis Malaya (*Malayan Communist Party*, MCP). Akhirnya, Mao Zedong dan Perdana Menteri Chou Enlai menyatakan kepada Tun Abdul Razak bahwa MCP adalah masalah dalam negeri Malaysia (Saravanamuttu, 2010).

Keputusan Malaysia tersebut menunjukkan bahwa, Kuala Lumpur sangat memahami perkembangan politik internasional serta langkah politik yang harus dilakukan. Hal ini karena Malaysia mengetahui bahwa dinamika politik di tingkat internasional era Perang Dingin sedang mengalami perubahan drastis. Kunjungan mendadak Presiden AS Richard Nixon ke Cina tahun 1971 nyata berdampak pada konstelasi politik kawasan termasuk Asia Tenggara. Disebabkan kesuksesan pertemuan tersebut maka dikatakan sebagai *“the week that changed the world.”* Bagaimanapun pasca pertemuan tersebut, ketegangan Perang Dingin mulai mereda atau jika tidak bisa dianggap “telah selesai lebih awal.” Karena normalisasi hubungan AS-Cina jelas mengguncang soliditas blok komunis terutama Uni Soviet-China. Sebaliknya menandai awal kemenangan kapitalis (MacMillan, 2007). Oleh karena itu, wajar jika Malaysia langsung merespons dengan melakukan hal yang serupa yaitu normalisasi hubungan Kuala Lumpur-Beijing.

Sejak itulah, Malaysia fokus membenahi ekonominya pasca kerusuhan etnis tahun 1969 yang melibatkan etnis Melayu dan Cina. Kesenjangan ekonomi dan politik menjadi pemicu utama konflik sosial tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Malaysia seiring dengan perkembangan internasional, meluncurkan kebijakan pembangunan baru atau *New Economic Policy (NEP)* pada tahun 1971. Dari segi ekonomi, kebijakan NEP jelas memicu pertumbuhan ekonomi Malaysia yang melejit ditandai dengan meningkatnya kelas menengah ke atas dan urbanisasi semakin tinggi. Namun dari segi demokrasi tentunya dari kacamata Barat, kebijakan NEP dinilai sangat diskriminatif. Karena nyatanya kebijakan NEP lebih berpihak kepada etnis Melayu (Gomez, 2007: 6). Tetapi dalam perspektif etnis Melayu, kebijakan tersebut justru sangat menguntungkan disebabkan lemahnya daya saing etnis Melayu dibandingkan etnis Cina atau India. Hal ini disadari bahwa tanpa dukungan kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi Malaysia, maka akan terjadi disparitas dan ketimpangan sosial ekonomi yang besar. Adanya NEP nyata berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup bangsa pribumi Malaysia (Mohamad, 2002). Meskipun demikian, keberpihakan tersebut jelas dinilai Barat sebagai kemunduran akibat kebijakan tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai yang diusung khususnya terkait demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebijakan ekonomi pemerintah Malaysia melalui NEP menunjukkan kuatnya praktik politik identitas. Kebijakan NEP menjadi bukti bahwa dalam konteks demokrasi di Asia Tenggara, khususnya negara-negara dengan tingkat ekonomi

menengah ke bawah, politik identitas memainkan peran sangat penting. Hal ini tidak lain karena kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah rendahnya daya saing sekaligus menguatnya dominasi ekonomi dari entitas politik lain khususnya etnis Cina dan India di Malaysia. Pemerintah Malaysia pasti sadar betul bahwa di tataran bawah, antara Melayu, Cina dan India terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat tajam. Artinya, secara alamiah jelas Cina dan India selangkah lebih maju ekonominya dibanding Melayu akibat naluri “pendatang” dan “perantauan” yang menjadikan etos kerja dua kali lebih kuat. Bahkan secara demografis, menuju kemerdekaan Tanah Melayu dan kemudian Malaysia, muncul ketakutan di kalangan elite Melayu akan dominasi Cina dan India akibat kebijakan imigrasi penjajah Inggris. NEP merupakan salah satu usaha nyata elite Melayu untuk memartabatkan pribumi atau di Malaysia disebut Bumiputera agar sejajar ekonominya dengan etnis lain. Pada dasarnya di awal kebijakan NEP mempunyai dua objektif utama yaitu i) memberantas kemiskinan, dan ii) merestrukturisasi keseimbangan ekonomi antar etnis (Bustami, Nasruddin, & Samat, 2006).

Meskipun tampak menimbulkan kontroversi, namun nyata bahwa NEP berhasil mengangkat taraf sosial dan ekonomi pribumi Malaysia menjadi lebih baik. Berdasarkan sebuah penelitian menyatakan bahwa NEP berdampak sangat signifikan terutama dalam aspek penurunan angka kemiskinan di Malaysia. Secara rinci dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:-

**Table 1. Pencapaian NEP**

No	Indikator NEP	1970	1990	2004	2011
1	Ekuitas Bumiputra	2.4% (RM477 Juta/ Rp 1,7 T)	19.3% (RM20.9 Milyar /Rp 71,4 T)	18.7% (RM73.2 Milyar/Rp 260 T)	23.5%
2	Angka Kemiskinan	52%	17.1%	5%	
3	Angka Kemiskinan Perkotaan	59%	21.8%	11%	
4	Pendapatan Rumah Tangga/ Bulan	RM660 (Rp 2,3 Juta)	RM1,254 (Rp 4,4 Juta)	RM2,996 (Rp 10 Juta)	

*Sumber: Funston (2001)*

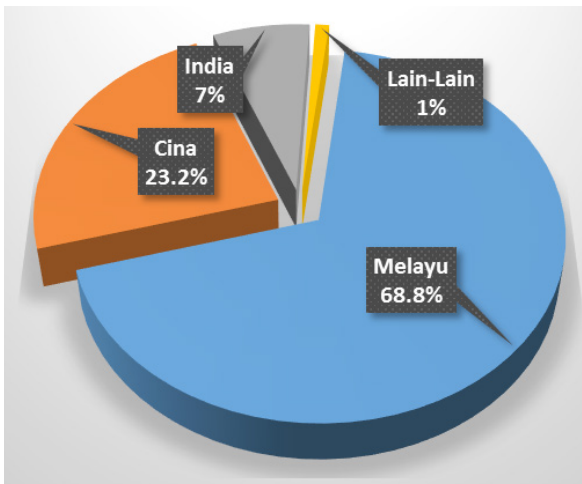
Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Malaysia melalui NEP sangat berdampak pada pencapaian ekonomi pribumi Malaysia. Angka kemiskinan terlihat menurun drastis di mana pada awal implementasi NEP tahun 1970 mencapai 52% dari total populasi etnis etnis Melayu. Dua puluh tahun kemudian angka tersebut menurun tajam menjadi 17,1% pada tahun 1990 dan akhirnya hanya menjadi 5% saja tahun 2004. Demikian juga dalam konteks pendapatan rumah tangga juga mengalami peningkatan tajam. Tahun 1970 pendapatan rumah tangga pribumi hanya RM 660 saja. Namun angka tersebut meningkat dua kali lipat tahun 1990 menjadi RM 1,254 dan jumlah tersebut menjadi dua kali lipat



lagi tahun 2004 sejumlah RM 2,996 per bulan. Tentu hal ini sebuah pencapaian yang luar biasa meskipun secara sosial dan politik memunculkan berbagai gesekan sosial dan politik sangat tajam di tengah masyarakat Malaysia.

Masyarakat Malaysia yang sangat plural baik sosial, ekonomi dan politik memerlukan sebuah iklim politik stabil dan berpihak. Hal ini penting tidak lain untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi di tengah kompetisi global yang sangat tajam. Kelompok yang minoritas seringkali dihadapkan pada posisi sulit dan terpinggirkan baik sosial, ekonomi dan politik. Data terbaru populasi di Malaysia mencapai 32 juta jiwa tahun 2017. Dari jumlah tersebut tersebar dalam tiga kategori utama yaitu Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Secara lengkap bisa dilihat dalam diagram berikut.

**Gambar 1. Komposisi Jumlah Penduduk Malaysia 2017**



*Sumber: Department of Statistics Malaysia (2018)*

Data di atas jelas menunjukkan bahwa etnis minoritas dalam hal ini adalah Cina dan India serta lain-lain yang masing-masing sebesar 23,2%, 7%, dan 1% dibandingkan Melayu 68.8%. Dalam konteks sosial politik, dalam mainstream demokrasi khususnya di Asia Tenggara jelas bahwa kelompok minoritas akan selalu mendapat sorotan akibat tindakan diskriminasi dan peminggiran sepihak oleh pemerintah. Namun dalam kasus Malaysia sangat unik, di mana justru kelompok minoritas yang cenderung lebih unggul secara sosial dan ekonomi dibandingkan pribumi. Artinya justru yang harus mendapat pembelaan adalah pribumi yang mayoritas. Hal inilah yang akhirnya menjadi diskursus politik di era demokrasi terutama pasca Perang Dingin terkait meningkatnya isu hak asasi manusia dan demokrasi. Adanya kebijakan NEP yang secara kasat mata terlihat diskriminatif di Malaysia, justru pada akhirnya malah sebagai perwujudan pembelaan kepada kaum lemah. Dinamika inilah yang menjadi landasan penting politik dan demokrasi di Malaysia termasuk era pasca Perang Dingin.

Perlu ditekankan bahwa, mengakarnya politik identitas yang diartikulasikan dalam politik rasial diterjemahkan secara jelas dalam konstelasi politik nasional. Ada tiga partai utama berbasis etnis yaitu UMNO (*United Malays National Organization*), MCA (*Malaysian Chinese Association*), dan MIC (*Malaysian Indian Congress*). Di samping itu, ada juga partai oposisi baik yang berbasis etnis atau pluralis namun tidak mampu mendapatkan dukungan maksimal. Uniknya ketiga partai utama tersebut bergabung dalam sebuah koalisi

yang bernama Barisan Nasional (BN). Dengan demikian, tampak bahwa latar belakang politik Malaysia sangat kompleks dan dinamis, namun stabil meskipun diwarnai dengan friksi yang sangat tajam (Shamsul AB, 1996). Oleh karena itu, pada bagian berikut dijelaskan perkembangan politik Malaysia pasca Perang Dingin.

### **Malaysia, Guncangan Reformasi dan Keberhasilan Keluar Krisis**

Pasca Perang Dingin terutama menjelang akhir tahun 1990-an, sebagaimana yang dialami negara-negara Asia Tenggara lain, mengalami guncangan ekonomi dan politik akibat terjangan krisis ekonomi 1997. Namun, pemerintah Malaysia tampak lebih sigap dan tanggap dalam menghadapi krisis tersebut. Misalnya langsung membentuk sebuah badan yang disebut dengan Majelis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7 Januari 1998. Hasilnya Malaysia mengambil beberapa langkah taktis untuk menangkal krisis misalnya menolak pinjaman IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia serta mematok nilai tukar mata uang Ringgit sebesar USD 1=RM 3,8. Meskipun keputusan Mahathir sebagai perdana menteri menjadi kontroversi internasional, namun yang jelas Malaysia selamat dari krisis dan bisa keluar masalah multi-dimensi. Malaysia bisa mempertahankan kepercayaan para investor untuk tetap menginvestasikan dananya di Malaysia meskipun mengambil langkah yang berbeda dengan sebagian besar negara-negara di Asia (Cheah, 2002).

Bagi Malaysia, tahun 1997 merupakan masa-masa kritis di tengah badai krisis ekonomi Asia yang berdampak sistemik di sebagian negara Asia baik dari segi ekonomi, sosial atau politik. Sebagaimana terjadi reformasi di Indonesia, Malaysia juga tidak lepas goncangan dan krisis politik. Puncaknya adalah memanasnya konstelasi politik dalam negeri Malaysia akibat kebijakan sepihak Dr. Mahathir memecat wakilnya sendiri Deputy Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada September 1998 (Laman web untuk keperluan kursus Ekonomi Pembangunan, 2009). Di awal krisis terjadi, tampaknya muncul gejala politik yang hampir sama di Indonesia yaitu menuntut pemerintah menyelesaikan krisis, namun pada saat yang sama mendesak pemerintah “berlaku adil” di mana ujungnya adalah tuntutan pergantian rezim. Di Malaysia rezim Dr. Mahathir telah berkuasa sejak tahun 1981 dan tidak ada yang berani menggantikannya. Momen krisis ekonomi 1997 menjadi momentum sebagian politisi dan kelompok kepentingan di Malaysia untuk melakukan hal yang serupa di Indonesia.

Skenario politik di Malaysia tampaknya berbeda. Di awal krisis, Deputy Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim cukup yakin reformasi politik bisa dilakukan di Malaysia. Namun, gelagat tersebut segera tercium dan akhirnya justru gagal dilaksanakan karena lebih dahulu ditangkap oleh kepolisian Malaysia di bawah kendali Dr. Mahathir. Tampaknya lengsernya Suharto di Indonesia menjadi inspirasi Anwar Ibrahim untuk melakukan perubahan rezim Dr. Mahathir di Malaysia. Dalam sebuah rapat akbar, Anwar Ibrahim juga mengkampanyekan isu serupa di Indonesia

yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) termasuk di musyawarah luar biasa/Perhimpunan Agung UMNO tahun 1998. Anwar Ibrahim bahkan merencanakan mosi tidak percaya di kalangan elite UMNO atas Dr Mahathir (Sobri Sudin & Mohd. Hafidz Hussein, 2002). Namun, pemicu utama ketegangan antara Anwar-Mahathir tidak lain disebabkan oleh pernyataan provokatif Anwar Ibrahim. Pada bulan Juni 1998 Anwar menyatakan “*if we are unwilling to accept [political reform], we may face the Indonesian situation where people demanded changes*” (Felker, 1999). Pernyataan inilah yang akhirnya berujung pemecatan sebelum akhirnya membawa Anwar Ibrahim dijebloskan ke penjara atas kasus yang sangat kontroversial yaitu tuduhan pelecehan seksual atas ajudan pribadinya.

Pada saat peristiwa pemecatan, Anwar Ibrahim merangkap dua jabatan strategis yaitu sebagai Deputy Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Manuver politik Anwar jelas sangat mengkhawatirkan Dr. Mahathir karena mulai mendapat dukungan rakyat. Dr. Mahathir yang juga merangkap jabatan yaitu sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan luar biasa untuk menindak Anwar Ibrahim. Melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri atau *Internal Security Act (ISA)* Anwar Ibrahim ditangkap secara paksa oleh pihak keamanan pada saat melakukan konfrensi press pada 20 September 1998 jam 20.00 waktu setempat. Akibat penangkapan tersebut Anwar Ibrahim terlihat mengalami cedera serius ketika menjali persidangan pada 29 September 1998 (Felker, 1999). Menariknya, peristiwa pemecatan dan

tindakan sewenang-wenang pemerintah Malaysia mendapatkan respons Presiden BJ Habibie yang dikenal sebagai sahabat Anwar Ibrahim. BJ Habibie tampaknya ingin membalas budi Anwar Ibrahim sebagai salah satu tokoh yang membantu BJ Habibie meyakinkan masyarakat internasional untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Persahabatan Anwar Ibrahim-BJ Habibie terbangun sejak Habibie menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Anwar Ibrahim sebagai Ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Salah satu faktor penting kedekatan kedua tokoh tersebut adalah semangat ke-Islaman (Lili Yulyadi Arnakim, 2009).

Dengan demikian tampak bahwa politik dan demokrasi di Malaysia pasca Perang Dingin mengalami dinamika yang luar biasa. Sejak awal demokrasi di Malaysia diartikulasikan dalam politik rasialis di tengah multi-etnis masyarakatnya. Politik identitas menjadi akar demokrasi di Malaysia yang faktanya telah mengubah Malaysia dari negara bekas jajahan, menjadi negara yang sangat pesat pembangunannya. Taraf ekonomi pribuminya juga dijaga dengan baik. Politik identitas di Malaysia tampaknya menjadi landasan politik dan demokrasi yang sudah digagas sejak era penjajahan Inggris di tengah membanjirnya imigran asal Cina dan India.

## **Malaysia Pasca Mahathir Mohamad**

Pasca kegaduhan politik tahun 1997, tampaknya politik dalam negeri Malaysia mengalami perubahan drastis. Mahathir menghadapi tantangan lebih berat pasca pemecatan

Anwar Ibrahim yang akhirnya membentuk partai baru yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan bergabung dengan koalisi oposisi atau di Malaysia dikenal dengan Pakatan Rakyat (PR). Pakatan Rakyat (PR) didominasi oleh beberapa partai oposisi misalnya PKR, *Democratic Action Party (DAP)*, Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan lain-lain. Otomatis konfigurasi pemilih semakin rumit terutama etnis Melayu yang tersebar di tiga partai yaitu UMNO, PKR, PAS dan sebagian DAP. Tentunya sebaran ini semakin menyulitkan kelompok Melayu yang berusaha mempertahankan dominasinya di tengah hantaman kelompok lain terutama Cina dan India.

Mengunduran diri Dr. Mahathir Mohamad diumumkan secara mendadak pada bulan Juni 2002 dan menyatakan akan mengakhiri jabatannya tahun 2003. Tepat setahun pasca pengunduran diri Mahathir, Abdullah Badawi ditunjuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru menggantikan seniornya Mahathir Mohamad. Namun, tantangan Abdullah juga tidak ringan apalagi di tengah geopolitik yang kurang menguntungkan pasca peristiwa Serangan 11 September 2001 di New York. Pemerintah Badawi disibukkan dengan tuntutan internasional terkait kampanye "*global war on terrorism*." Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan konsep yaitu Islam Hadhari. Islam Hadhari ingin menampilkan konsep Islam yang damai, berperadaban dan jauh dari kesan terorisme (Ahmad Fauzi Abdul Hamid, 2010). Dalam konteks politik tidak kalah dinamisnya, Ahmad Badawi menghadapi tantangan yang sangat berat pasca penurunan signifikan prestasi BN pada

pemilihan umum tahun 2008. Mahathir Mohamad sangat kecewa dengan performa Badawi sebagai penggantinya. Mahathir juga mengatakan bahwa penurunan prestasi BN dan UMNO tanggung jawab Badawi sepenuhnya. Hal ini tidak lain karena meskipun masih mengendalikan politik Malaysia, BN menurun penguasaan kursinya akibat kekalahan telak di empat negara bagian yaitu Kedah, Penang, Perak dan Selangor (Norhayati Mohd. Salleh, 2008).

Kegaduhan politik ini segera berakhir pasca transformasi kepemimpinan dari Abdullah Badawi ke Najib Razak pasca tekanan politik yang besar terutama dari kubu Mahathir Mohamad. Najib muncul dengan gagasan baru yaitu “1 Malaysia” yang terkesan ingin mengakomodasi aspirasi politik lintas etnis. Konsep “1 Malaysia” yang digagas Najib Razak juga diserang oleh partai oposisi. Beberapa pihak menuduh konsep “1 Malaysia” meniru konsep “*One Israel*” yang digagas Perdana Menteri Israel Ehud Barak pada dekade 1990-an (Amini Amir Abdullah et.al., 2010). Namun Najib bergeming tidak menghiraukan kritikan tersebut dan terus maju. Untuk mengimplementasikan “1 Malaysia” Najib Razak melancarkan program *Government Transformation Program* (GTP) dan *Economic Transformation Program* (ETP). GTP sendiri merangkumi enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (*NKRA, National Key Result Areas*) yaitu akses kepada pendidikan berkualitas; pengurangan angka kejahatan; pemberantasan korupsi; peningkatan taraf hidup, pembangunan luar kota; dan peningkatan sarana transportasi umum. Walaubagaimanapun, “1 Malaysia” tidak jauh beda



dengan gagasan sebelumnya. Gagasan “1 Malaysia” tidak lebih hanya retorika semata dan masih konsisten sebagai kebijakan yang mengutamakan etnis Melayu. Bahkan gagasan “1 Malaysia” semakin mendapat simpati dari kalangan pemuda Melayu untuk tetap mendukung UMNO-BN yang konsisten mempraktikkan politik rasialis (Chin, 2010).

Secara umum jelas menunjukkan bahwa politik dan demokrasi di Malaysia pasca Mahathir tidak mengalami perubahan signifikan. Namun ada beberapa isu yang sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah Najib. Misalnya semakin meningkatnya dukungan kepada kelompok oposisi dan adanya simpati sebagian kalangan pemuda Melayu mendukung partai yang mengusung konsep pluralisme dan bukannya politik rasialis. Bahkan keberanian kelompok oposisi ditunjukkan dengan gelaran aksi demonstrasi besar-besaran pasca pemilihan umum 2008 yang didominasi oleh pendukung PKR dan PAS termasuk kalangan menengah atas lintas-etnis. Umumnya mereka mendesak komisi pemilihan umum atau Suruhanjaya Pilihan Raya menganulir hasil pemilu 2008 yang dinilai penuh dengan kecurangan. Selain itu, muncul juga beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang cenderung anti pemerintah misalnya *Hindu Rights Action Force* (HINDRAF). Lalu muncul juga gerakan yang dinamakan BERSIH. Tuntutan utama BERSIH adalah pelaksanaan demokrasi di Malaysia terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan bebas termasuk isu kebebasan media, kebocoran anggaran, penyelewengan kekuasaan, korupsi dan ketidakadilan sosial. Media alternatif

terutama *blog* justru mampu memprovokasi golongan menengah terpelajar secara signifikan (Chin & Wong, 2009). Bahkan dalam sebuah survey menunjukkan mayoritas pelajar Melayu di perguruan tinggi di Pahang menginginkan perubahan dan sebagian besar memilih partai oposisi. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 19% responden juga menyatakan bahwa siapa saja layak untuk menjadi Perdana Menteri, apapun etnisnya (Mohd Nasir Haji Ibrahim, 2008).

Di tengah guncangan politik tersebut, tampaknya dominasi UMNO dan BN terus-menerus mendapatkan serangan. Momentumnya tidak lain adalah pilihan umum ke 13 tahun 2013 di mana meskipun masih mendominasi perpolitikan Malaysia, namun suara oposisi semakin terdengar keras. Ini yang sangat tidak disukai oleh UMNO. Pada akhirnya sentiment etnis pun muncul menjadi senjata pemerintah untuk mengembalikan dukungan rakyat. Etnis Cina dianggap sebagai biang keladi dan menjadi kambing hitam friksi politik di Malaysia. Etnis Cina dianggap sebagai motor penggerak masyarakat melawan dominasi UMNO-BN yang mengakui hak keistimewaan etnis Melayu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Malaysia. Hasilnya pasca pelaksanaan pemilu 2013 dan pelantikan Najib Razak sebagai Perdana Menteri terpilih, salah satu harian terkemuka di Malaysia melansir *headline* berita yang sangat provokatif dengan judul “Apalagi lagi Cina mahu?” sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Koran Utusan Malaysia Edisi 7 Mei 2013.



Publikasi di atas jelas mengindikasikan bahwa politik identitas masih sangat kuat di Malaysia. Dari isi pembahasan di harian Utusan Malaysia tersebut jelas tergambar bahwa seolah-olah masyarakat Cina sebagai pemicu utama berkurangnya suara UMNO-BN. Tidak hanya itu, tuduhan tersebut juga mengarah kepada opini bahwa Cina telah menggerakkan secara masif melalui media sosial misalnya Facebook dan Twitter serta blog untuk bergerak di jalan-jalan melawan dominasi UMNO. Terpenting adalah menggugat

hasil pemilu 2013 yang menurut kelompok Cina dituduh tidak bersih dan adil. Menurut elite UMNO, pergerakan etnis Cina tersebut lebih dimotivasi untuk mengalahkan dominasi etnis Melayu melalui slogan-slogan misalnya demokrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Meskipun secara konstitusi, hak pribumi Melayu sudah dinyatakan oleh konstitusi negara Malaysia (Utusan Malaysia, 7 Mei 2013).

### **Seputar Kasus 1MDB dan Implikasinya**

Badai politik pemerintahan Najib Razak tampaknya juga tidak kunjung surut. Pemilu 2013 yang menyisakan penolakan oposisi, kekompakan UMNO juga diuji pasca munculnya dugaan keterlibatan Najib dalam skandal mega korupsi. Adalah isu 1MDB (1 Malaysia Development Bank) menjadi sebuah kemelut politik yang memaksa UMNO mengalami guncangan luar biasa dengan keluarnya sejumlah figur utama yaitu Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyidin Yassin serta sejumlah elite UMNO. Akibat kasus 1MDB, posisi Najib Razak di bawah tekanan sejak pertengahan 2015 menyusul beberapa laporan media internasional terkait kasus tersebut misalnya *Wall Street Journal* (The Wall Street Journal, 2 July 2015). Namun, Najib Razak menolak tuduhan tersebut sebagaimana audit oleh instansi terkait yang kredibel yaitu badan anti-korupsi Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). SPRM percaya bahwa aliran dana ke rekening pribadi Najib Razak berasal dari para donor (The Star, 3 August 2015).

Sementara itu, serangan kuat justru datang dari kalangan UMNO sendiri. Pada bulan Agustus 2015, seorang anggota

UMNO dari cabang Padang Matsirat di negara bagian Kedah, tiba-tiba mengajukan tuntutan perdata kepada Najib mengenai kasus ini (Channel News Asia, 28 July 2015). Namun, tindakan tersebut justru dijawab Najib dengan melakukan reshuffle kabinet besar-besaran. Beberapa pejabat elite UMNO dipecat sepihak secara kontroversial termasuk Deputy Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri seperti Mohd Shafie Apdal (Menteri Urusan Pedesaan), Hasan Malek (Menteri Perdagangan Dalam Negeri) Datuk Seri G. Palanivel (Menteri Lingkungan Hidup dan Alam Sekitar) dan Dr. Ewon Ebin (Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi) dipaksa berhenti dari jabatannya (Channel News Asia 29 July 2015).

Perpecahan tersebut tidak lain dipicu oleh manuver politik rekan Najib yaitu Deputy Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. Salah satunya menyatakan bahwa “jika pemilu diadakan untuk hari esok, kita tidak mungkin menang. Penelitian dan survei telah dilakukan menunjukkan bahwa BN kesulitan untuk menang” (Astro Awani, 27 July 2015). Puncaknya adalah ketika Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai “politisi senior” memutuskan untuk keluar dari UMNO. Keterlibatan Najib dalam skandal 1MDB dan penurunan kepercayaan publik merupakan alasan utama Mahathir untuk tidak mempertahankan keanggotaannya. Mahathir bersikeras bahwa “Saya tidak bisa bergabung dan menjadi anggota partai yang najis. Sejak awal, UMNO telah berjuang untuk mengembangkan negara, dan tidak untuk melayani kepentingan pribadi” (Harian Metro, 29 February 2016). Situasinya menjadi lebih rumit menyusul manuver politik

kontroversial Mahathir dengan bekerja sama dengan “musuh politik” seperti Anwar Ibrahim (pendiri Partai PKR) dan Lim Kit Siang yang merupakan politisi senior Partai DAP (New Straits Times, 12 March 2016). Apa yang pasti, pasca kasus 1MDB, politik dan demokrasi Malaysia semakin kompleks. BN memiliki lawan baru dari kubu Mahathir yaitu Barisan Rakyat serta runtuhnya Pakatan Rakyat yang berubah menjadi Pakatan Harapan. Termasuk munculnya partai-partai baru baik nasional maupun di level lokal. Berikut disajikan data terakhir peta partai politik di Malaysia.

**Tabel 2. Daftar Partai Politik di Malaysia**

<b>BN (Barisan Nasional)</b>	<b>BR (Barisan Rakyat)</b>	<b>PH (Pakatan Harapan)</b>	<b>Gagasan Sejahtera (Gagasan)</b>
1. United Malays National Organization (UMNO)	1. Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu)	1. Partai Keadilan Rakyat (PKR)	1. Partai Islam Se-Malaysia (PAS)
2. Malaysian Chinese Association (MCA)	2. Partai Warisan Sabah (Warisan)	2. Partai Tindakan Demokratik (DAP)	2. Partai Ikatan Bangsa Malaysia (Ikatan)
3. Malaysian Indian Congress (MIC)	3. Partai Harapan Rakyat Sabah (Harapan Rakyat)	3. Partai Amanah Negara (Amanah)	

<b>BN (Barisan Nasional)</b>	<b>BR (Barisan Rakyat)</b>	<b>PH (Pakatan Harapan)</b>	<b>Gagasan Sejahtera (Gagasan)</b>
4. Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan)			
5. Partai Progresif Penduduk (PPP)			
6. Partai Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB)			
7. Sarawak United Peoples' Party (SUPP)			
8. Sarawak Progressive Democratic Party (SPDP)			
9. Partai Rakyat Sarawak (PRS)			
10. United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation (UPKO)			
11. Partai Bersatu Sabah (PBS)			

BN (Barisan Nasional)	BR (Barisan Rakyat)	PH (Pakatan Harapan)	Gagasan Sejahtera (Gagasan)
12. Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBR)			
13. Liberal Democratic Party (LDP) Sabah			

*Sumber: Election Commission of Malaysia (2007)*

Dengan demikian pasca kasus 1MDB ada perubahan drastis dalam peta perpolitikan Malaysia. Hal ini tidak lain karena dipicu oleh perpecahan dan friksi politik yang sangat tajam terutamanya di lingkaran UMNO pasca kasus 1MDB. Muncul semacam perlawanan dari elite-elite UMNO yang tidak puas dengan kinerja politik Najib. Bagaimanapun, perlawanan tersebut berakhir dengan pemecatan sepihak elite-elite UMNO oleh Najib Razak. Najib Razak tampaknya melakukan pembersihan besar-besaran dan hanya menyisakan mereka yang benar-benar loyal kepada kepemimpinan Najib. Hasilnya, para elite yang dikeluarkan dari barisan pemerintahan terutama Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membentuk kekuatan politik baru dan ironisnya malah bergabung dengan koalisi oposisi termasuk Anwar Ibrahim. Seperti penjelasan di bab awal bahwa Anwar Ibrahim adalah musuh politik Mahathir sejak bergolaknya reformasi 1999 yang berujung pemecatan dan penangkapan sepihak Anwar Ibrahim. Di sisi lain, PAS yang selama ini



satu barisan dengan Anwar Ibrahim dan bertolakbelakang dengan Mahathir, UMNO dan Najib justru mendekat ke UMNO pimpinan Najib. Sehingga terbentuklah konfigurasi politik sebagaimana tabel di atas. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dijelaskan posisi terkini terutama terkait PAS, UMNO dan umat Islam di Malaysia.

## **Malaysia dan Politik Umat Islam**

Dampak dari skenario politik di atas tentu berimplikasi kepada nasib umat Islam di Malaysia. Membicarakan umat Islam juga bukan menjadi sesuatu yang tabu dalam perpolitikan di Malaysia. Karena, posisi umat Islam dalam konstitusi Malaysia sudah jelas bahwa Islam yang melekat dalam konteks Melayu mendapatkan hak-hak keistimewaan.<sup>5</sup> Penefinisian Melayu di Malaysia sangat unik. Unik disebabkan Melayu didefinisikan bukan sebuah entitas sosiologis, tetapi entitas politik. Jika di Indonesia, Melayu adalah salah satu etnis/suku yang ada di sebagian besar Pulau Sumatera. Sedangkan di Malaysia, yang dimaksud Melayu adalah warganegara Malaysia yang beragama Islam dan beradat-istiadat Melayu. Artinya tidak terbatas pada satu etnis semata yaitu Melayu, tetapi siapapun dengan latarbelakang apapun sepanjang beragama Islam dan “mengamalkan” budaya Melayu, maka disebut Melayu.

Dalam Perkara 160 (a) Konstitusi Malaysia definisi Melayu adalah:

---

<sup>5</sup> Konstitusi Malaysia

“Orang Melayu” artinya seseorang yang menganut agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan— (a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapaknya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura.”<sup>6</sup>

Secara sosiologi, antara Islam dan Melayu sememangnya tidak bisa dipisahkan sejak Islam menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik yang bertempat tinggal di Sumatera, Malaysia dan di seluruh dunia. Polemik yang mempermasalahkan Islam dan Melayu tentunya berasal dari kalangan post-modernisme. Ideologi post-modernisme yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk ideologi multikulturalisme tentu ingin memisahkan antara agama dan urusan-urusan politik. Meskipun sudah berkembang sejak tahun 1970-an, namun baru berkembang pesat pasca Perang Dingin berikut dengan paham-paham lain misalnya demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lain-lain. Pada akhirnya justru paham multikulturalisme dan varian-variannya ingin memisahkan kehidupan agama dengan negara serta pengakuan kepada semua golongan dan agama termasuk yang tidak beragama. Namun, hujungnya dengan dalih hak asasi manusia dan demokrasi, justru mendiskreditkan Islam yang sudah melekat dalam budaya Melayu (Bustanuddin Agus, 2009). Jika ditelusuri lebih lanjut,

---

<sup>6</sup> Konstitusi Malaysia

paham multikulturalisme dalam konteks politik identitas, tentu ingin agar Melayu tidak mendominasi politik.

Implikasi dari situasi di atas tidak lain adalah munculnya kelompok-kelompok yang mencoba melakukan upaya politik untuk jika tidak bisa secara politis minimal secara gagasan mampu mempengaruhi masyarakat tentang ide multikulturalisme. Dalam hal ini tentu etnis Melayu dan Islam menjadi sasaran agar bisa “melepas dominasi politiknya” kepada kelompok lain. Pasca kemelut reformasi 1998 di Malaysia, muncul beberapa partai politik yang berorientasi multikulturalisme misalnya PKR dan DAP. Hal ini bisa dilihat dalam Anggaran Dasar PKR Pasal 6 ayat 6.2 yang menyatakan bahwa anggota adalah “Mana-mana warganegara Malaysia yang berusia lapan belas (18) tahun ke atas adalah layak menjadi Anggota Biasa.” Demikian juga dengan DAP dalam Pasal III Anggaran Dasar menyatakan terkait keanggotaan bahwa anggota adalah “Seseorang warganegara Persekutuan yang berumur tidak kurang daripada 17 tahun yang bersetuju dengan syarat-syarat keahlian dan tidak menjadi ahli mana-mana Partai politik atau mana-mana organisasi cabang atau bawahannya yang mempunyai matlamat-matlamat dan dasar-dasar yang bertentangan dengan matlamat-matlamat dan dasar-dasar Partai bolehlah menjadi ahli Partai.” Tentu sangat berbeda dengan UMNO yang sangat teguh memegang prinsip politik identitas. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar menyatakan bahwa anggota adalah “Warganegara Malaysia berbangsa Melayu atau Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas.

Munculnya kelompok-kelompok yang berusaha menggugat keistimewaan Melayu dan Islam tentunya juga tidak lepas dari kalangan oposisi yang berpaham multikulturalisme. Puncaknya adalah gelombang besar-besaran demonstrasi yang menamakan dirinya kelompok BERSIH tahun 2015 untuk menggulingkan Najib pasca skandal 1MDB. Meskipun mendapat simpati masyarakat, namun BERSIH sendiri tidak mampu “membersihkan dirinya” dari kepentingan kelompok oposisi dan memurnikan gerakannya sebagai gerakan rakyat serta tidak anarkis. Saat ini gerakan BERSIH tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari elemen masyarakat Malaysia terutama Melayu. Sebagai mayoritas, etnik Melayu dan Islam tampak belum sepenuh hati percaya kepada oposisi yang diduga terlalu kompromistis kepada etnik Cina dan India. Walaupun visi dan misi politik partai oposisi sangat bagus dengan mengkombinasikan berbagai etnik untuk “bersatu” di bawah payung koalisi, namun hal itu masih sangat tabu di mata orang-orang Melayu yang sudah mendarah daging dengan politik identitas dan rasial (Maksum, 2015).

Latar belakang di atas tentunya berimplikasi kepada perbincangan konsep Melayu itu sendiri yang secara otomatis juga berbicara tentang nasib umat Islam. Dalam konteks ini, Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya perubahan politik identitas terutama pasca Pemiluhan Umum Raya 2014 tahun 2018 di Malaysia. Namun tidak bisa dipungkiri, menghadapi cobaan besar terutama pasca menguatnya oposisi. Pasca kasus 1MDB tampaknya terjadi dinamika menarik di Malaysia terkait posisi umat Islam. UMNO dan PAS mulai kekurangan dukungan

pasca mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Bagi Melayu, politik tidak sekadar berbicara tentang “siapa akan mendapat apa, kapan dan bagaimana caranya sebagaimana pendapat Lasswell (1990). Namun, bagi orang Melayu di Malaysia, politik adalah persoalan “*survival*” persis sama dengan konteks “*survival*” dalam politik internasional (Waltz, 1979). Disebabkan tujuan utama politik Melayu adalah “*survival*”, secara teori konsolidasi politik kemungkinan besar akan terjadi (Di Palma, 1990). Koalisi yang paling memungkinkan adalah antara PAS and UMNO membentuk koalisi bernama *Gagasan*. Manifesto politik kedua partai relatif sama. Kedua partai juga berbasis Melayu yang tentunya sangat fokus kepada hak keistimewaan orang Melayu. Selain itu, kedua partai jua setuju bahwa Islam adalah agama resmi Negara Malaysia. Di bawah semangat keistimewaan Melayu dan berprinsip Islam, kedua partai memiliki momentum di tengah mencuatnya isu kalimat “Allah” oleh non- Muslim di Malaysia. Pada akhirnya, mahkamah agung Malaysia memutuskan bahwa penggunaan kalimat “Allah” hanya untuk umat Muslim, sedangkan umat Kristen dilarang menggunakannya untuk menyebut Tuhannya (Liow & Pasuni, 2010; Neo, 2014; Wan Haslan K & Indriaty Ismail, 2014).

Skenario ini muncul karena kedua partai memiliki titik temu yang sama yaitu menegakkan agama Islam. Seorang analis percaya bahwa hal ini merupakan momentum yang pas bagi UMNO dan PAS untuk berkonsolidasi karena UMNO juga telah mengakomodasi Hukum Islam dalam Konstitusi Malaysia (Sinar Harian, 15 August 2016). Ketua Pemuda PAS, Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz, menegaskan

bahwa sebagai perbandingan dua kelompok sekuler - partai non-Melayu dan non-Muslim, yaitu DAP dan MIC - mudah dipersatukan, dan tidak salah jika UMNO dan PAS juga bersatu melawan mereka. UMNO dan PAS juga sedang prihatin dengan maraknya isu yang diperdebatkan seperti LGBT dan penerapan Hukum Syariah di Malaysia yang ditentang oleh DAP dan MIC (Sinar Harian, 12 August 2016). Beberapa indikasi juga menunjukkan bahwa koalisi antara UMNO dan PAS terealisasi dan harus diwaspadai. Misalnya, kedua pemimpin, Najib Razak dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, bertemu di Asosiasi Dunia untuk Lulusan Al-Azhar (WAAG Malaysia). Meski begitu, Wakil Presiden PAS Datuk Mohd Amar Nik Abdullah membantah pertemuan tersebut sebagai indikasi bahwa partainya bersedia bergabung dengan koalisi UMNO. Sebaliknya, Mohd Amar menegaskan kembali bahwa PAS selalu siap untuk bekerja sama dengan partai yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Muslim di Malaysia (The Sun Daily, 6 January 2016). Indikasi lain adalah pengakuan pemerintah Malaysia kepada mantan Mursyidul Am (pemimpin spiritual) PAS, Datuk Dr. Haron Din, sebagai Tokoh Maal Hijrah atau penghargaan Maal Hijrah khusus (The Malay Mail, 2 October 2016). Skenario yang paling mungkin adalah koalisi UMNO dan PAS untuk kepentingan Muslim, dibanding bergabung dengan BN berdasarkan kesepakatan formal. PAS juga cenderung menjaga jarak terhadap BR dan PH. Sebaliknya, ada indikasi kuat PAS dan Gagasan mendekat dengan UMNO karena isu-isu Islam kembali muncul dalam wacana politik. Even terakhir adalah kolaborasi Presiden UMNO Najib Razak dan Presiden

PAS Abdul Hadi Awang saat demonstrasi isu Rohingya di Myanmar dengan sandi “Himpunan Solidaritas Ummah” yang membuktikan menguatnya koalisi UMNO-PAS dalam isu-isu ke-Ummat-an dan ke-Islam-an (The Star, 3 December 2016).

Hasilnya sungguh di luar dugaan karena simpati rakyat berubah drastis, PH akhirnya memenangkan Pemilihan Raya Umum 2018. Konsekuensinya Dr. Mahathir yang sudah berusia 92 tahun kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia ke 7. Koalisi PH sepakat mengangkat Mahathir sebagai ketua koalisi karena Anwar Ibrahim masih dalam tahanan. Pencalonan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebagai wakil PH menantang calon BN benar-benar menjadi senjata ampuh dalam Pemilihan Raya Umum 2018 (The Malaysian Insight, 7 Januari 2018). Menguatnya dukungan kepada PH mau tidak mau disebabkan “faktor Mahathir” yang sangat mempengaruhi dan menentukan pilihan. Bahkan pendukungnya sangat optimis bisa memenangkan kontestasi Pemilihan Raya Umum 2018 dan merebut “Putrajaya” (Borneo Post, 15 April 2018). Apalagi ada semacam kerinduan dan kepercayaan tinggi kepada Mahathir yang telah membawa Malaysia di era keemasan pembangunan. Hal ini juga diprovokasi oleh surat edaran Mahathir kepada masyarakat untuk memilih PH dan ini menjadi pemantik luar biasa yang mengantarkan Mahathir kembali ke pemerintahan.

**DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD**

17 April 2018

Assalamualaikum.

**SURAT TERBUKA TUN DR MAHATHIR KEPADA AHLI UMNO  
SELURUH MALAYSIA**

Saya mendoakan saudara-saudari semua berada dalam keadaan sihat walafiat serta sejahtera.

PRU 14 sudah ditentukan akan diadakan pada 9 Mei 2018.

Pertandingan kali ini sepatutnya diadakan antara Barisan Nasional (BN) dengan Pakatan Harapan (PH) - dua buah gabungan parti-parti politik. Tetapi Kerajaan menolak pendaftaran PH. Kerajaan juga menarik balik pendaftaran Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).

Perbuatan ini boleh halang PH dan PPBM dari bertanding dan BN menang tanpa bertanding.

Tetapi PH dan PPBM akan bertanding juga. Amanah dan DAP secara berasingan dibawah simbol Parti Keadilan Rakyat (PKR), PPBM sebagai calon-calon bebas dengan simbol PKR.

PPBM mencabar UMNO bukan kerana UMNO. Kami menentang kerana ia tidak lagi UMNO. Segala asas perjuangan UMNO sudah dihapuskan oleh

No. 1, Jalan P8H, Presint 8, 62250 PUTRAJAYA  
Tel : 603-8885 8900 Fax : 603-8889 1114

Dato' Sri Najib sehingga parti yang mulia dahulu menjelma menjadi parti yang ditolak dan dibenci oleh sebilangan besar orang Melayu.

Saudara-saudari boleh nafikan kenyataan ini tetapi hakikatnya ialah parti pimpinan Najib bukanlah parti UMNO dahulu. Tugas dan tujuannya sekarang ialah untuk menghalalkan segala jenayah yang dilakukan oleh Najib supaya ia kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia.



Sokongan saudara-saudari kepada Najib akan memburukkan lagi keadaan negara tercinta ini. Takkanlah saudara-saudari tidak sedar bahawa dari sebuah negara yang dikagumi dunia, Malaysia sudah jadi negara rasuah pimpinan penjenayah yang diketawakan dunia.

Rakyat menderita tekanan kos sara hidup yang tinggi, pengangguran, tiada biasiswa, GST, kurang subsidi petrol, pemiagaan kecil ditutup, tidak ada kontrak kecil dan bermacam lagi.

Saudara-saudari tentu tahu bahawa terdapat bukti jelas bahawa Najib telah lesapkan berbillion duit IMDB dan dana-dana lain. Tentulah saudara-saudari tertanya-tanya dari mana wang sebanyak 2.6 billion Ringgit berada dalam akaun peribadi Najib di AmBank. Kenyataan bahawa duit ini diderma oleh seorang Arab tidak masuk akal. Wang sebanyak ini tidak pernah diberi oleh sesiapa kepada sesiapa dalam sejarah manusia.

Jika benar wang ini diderma kenapakah Mesyuarat Agung UMNO tidak dibenar bincang perkara ini dan IMDB.

Saya yakin saudara-saudari tahu semua ini. Sanggupkah saudara-saudari rosakkan negara sendiri kerana wang atau apa sebab sekalipun. Takkanlah saudara-saudari, yang dahulu berjuang bersama saya untuk bangun negara dan agama, sekarang ini bersama Najib perosak negara.

Saya bersama UMNO sejak 1946. Saya tak akan tinggal UMNO jika tidak kerana penyelewengan yang besar. Sesungguhnya kerosakan kepada negara dan UMNO yang dilakukan oleh Najib amat dahsyat sehingga pemulihan menjadi cabaran yang besar.

Sekarang pemulihan masih boleh dibuat. Jika, nauzubillah, Najib dapat teruskan pemerintahannya pemulihan tidak mungkin lagi.

Ini adalah saat terakhir, peluang terakhir bagi saudara-saudari menebus nasib bangsa, negara dan agama.

Oleh itu kalahkanlah Najib dan UMNO songsang yang dipimpinnya.

Jangan undi BN dan parti sekongkol dengannya - PAS.

Kalau sayang bangsa, negara dan agama berilah peluang kepada saya dan rakan dengan mengundi untuk kami.



**DR MAHATHIR BIN MOHAMAD**

Surat inilah yang tampaknya menjadi senjata ampuh untuk menarik sebagian besar pendukung UMNO mengalihkan dukungannya ke PH. Skandal 1MDB yang melibatkan Najib Razak semakin terkuak dan tidak terbendung. Akhirnya, PH berhasil menggulingkan dominasi BN yang sudah mendominasi perpolitikan Malaysia sejak era kemerdekaan. Isu PH akan menghapus “hak keistimewaan orang Melayu” yang menjadi senjata UMNO selama ini, dibantah oleh Anwar Ibrahim sendiri pasca keluar dari penjara. Menurut Anwar, koalisi yang dibangun tidak bisa “membatalkan” kontrak sosial dalam Konstitusi Malaysia. Adalah fakta bahwa etnis Melayu dan bumi putera merupakan kelompok yang paling tertinggal ekonominya. Namun, di sisi lain, Cina dan India tidak mau diperlakukan semena-mena. Anwar Ibrahim memberi catatan bahwa yang diberikan “keistimewaan” adalah mereka yang benar-benar terbelakang ekonominya (Astro Awani, 16 May 2018).

Dengan demikian tampak bahwa posisi umat Islam di Malaysia masih berproses di tengah berbagai spekulasi. Justru pasca reformasi 1998, tantangan justru muncul dari kalangan orang Melayu sendiri yang bermetamorfosis menjadi partai oposisi. Pasca kasus 1MDB juga kecenderungan tersebut semakin meningkat, namun di sisi lain ada indikasi rekonsiliasi politik yang unik. Dulu lawan, sekarang menjadi kawan.

## **Kesimpulan**

Bab ini bisa disimpulkan bahwa politik dan demokrasi Malaysia pasca Perang Dingin, mengalami dinamika yang

menarik. Sebagaimana di Indonesia, pada tahun 1997/1998 Malaysia juga dihantam krisis ekonomi yang berimbas ke krisis sosial dan politik nasional. Namun, Malaysia berhasil keluar dari lubang krisis dan berhasil memulihkan ekonomi nasional bahkan lepas dari cengkraman IMF dan Bank Dunia melalui kebijakan moneter kontroversial. Menguatnya politik identitas di Malaysia tidak lepas dari latar belakang kolonialisme dan membanjirnya imigran Cina dan India atas persetujuan Inggris. Kaum pribumi Melayu di Malaysia termasuk cerdik dan berhasil mengamankan kepentingan politiknya dengan politik rasialis yang bisa “diterima” semua pihak yang tergabung dalam koalisi BN. Namun, semuanya berubah pasca tergulingnya BN oleh PH secara mengejutkan. Dinamika akan terus terjadi di tengah mengendurnya dukungan kepada BN dan masih berprosesnya komunikasi politik di koalisi PH.

## BAB 4

# Demokrasi dan Politik Filipina Pasca Perang Dingin: Kontestasi Antar Elit, *Civil Society* dan Mindanao

FILIPINA bisa dikatakan sebagai salah satu negara paling demokratis di Asia Tenggara setelah Indonesia. Secara umum, Filipina merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem presidensial. Meskipun Filipina merupakan negara kesatuan, namun memiliki satu daerah otonomi khusus yaitu *Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)*. Filipina juga mengalami dinamika yang menarik terkait proses pembentukan negara dan bangsa. Hal ini berlangsung serius terutama sejak pemerintahan Fidel Ramos dengan upaya-upaya mentransformasikan sistem ke pemerintahan berbentuk federal, *unicameral*, dan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan komandan tertinggi angkatan bersenjata Filipina.

Bagi masyarakat Filipina, kehidupan demokrasi bukanlah merupakan barang baru. Sejak tahun 1906, masyarakat Filipina sudah melaksanakan demokrasi melalui sistem

pemilu. Artinya, sejak awal abad 19 masyarakat Filipina, sudah melakukan pemungutan suara. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat Filipina tidak sadar bahwa sistem pemilu di Filipina termasuk yang paling rumit di dunia (Manglapus, 1960). Oleh karena itu, dalam bagian ini akan didiskusikan beberapa hal terkait dengan 1) dinamika politik Filipina pasca Perang Dingin, 2) hubungan Manila dan Filipina Selatan, 3) nasib umat Islam di Filipina, 4) kesimpulan.

## **Filipina dan Geopolitik Pasca Perang Dingin**

Selama era Perang Dingin, secara umum posisi Filipina dan geopolitik sangat jelas yaitu pro-AS. Bahkan bisa dikatakan selama Perang Dingin, tidak ada pengaruh atau intervensi Uni Soviet dalam perpolitikan dalam negeri Filipina disebabkan kuatnya pengaruh AS. Bahkan kedekatan dan kuatnya pengaruh AS telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang selalu dikampanyekan AS. Selama era Perang Dingin, AS tampaknya tidak terlalu mementingkan nilai-nilai demokrasi. Sepanjang suatu negara mendukung AS dalam kancah Perang Dingin maka AS akan terus dibelakangnya meskipun mempraktikkan sistem otoriter dan cenderung diktator seperti era Presiden Ferdinand Marcos di Filipina (Walker, 2016).

Namun, pasca Perang Dingin, kebijakan luar negeri Filipina lebih bervariasi dan terbuka tidak terpacu pada pengaruh AS meskipun tetap besar sebagai mantan penjajah. Perubahan tersebut misalnya terkait hubungan Filipina-China, Filipina-Rusia yang kembali terbuka dalam berbagai

bidang. Isu pertama yang muncul pasca Perang Dingin terkait Filipina dan geopolitik internasional adalah perang melawan terorisme pimpinan AS. Adanya peristiwa Serangan 9/11 2001 menyeret Filipina dalam kampanye keamanan internasional tersebut. Bagaimanapun Filipina menyambut hangat kerja sama keamanan dengan AS dalam “*Global War on Terrorism*” yang juga memberikan peluang bagi Filipina untuk memberantas gerakan di Filipina Selatan. Komitmen Filipina tersebut berbuah manis dengan pemberian bantuan termasuk komitmen latihan perang bersama termasuk kebijakan Filipina mengirim misi militernya ke Iraq. Hal ini wajar karena kedua negara dikenal sangat dekat bahkan AS pernah mempunyai pangkalan militer di Filipina melalui perjanjian “*Philippine-American Military Base Agreement*” yang ditandatangani hanya sebulan pasca proklamasi kemerdekaan Filipina yaitu pada tanggal 14 Maret 1947 (Felix, 2005).

Selain isu di atas, Filipian juga termasuk berani berbeda dalam menyikapi Cina. Mayoritas negara Asia Tenggara misalnya lebih memilih kebijakan “*One-Cina Policy*.” Namun, sebaliknya pada era Perang Dingin, Filipina cenderung mendekati ke Taiwan karena kontribusinya yang besar kepada perekonomian Filipina melalui investasi massifnya. Sehingga, Filipina mengadopsi kebijakan yang dikenal dengan “*Two-Cina Policy*” di sisi lain menguatkan hubungan dengan Taiwan namun di sisi lain juga menjalin hubungan dengan China. Hal ini dilakukan Manila karena untuk menjaga kepentingan ekonomi terutama tingginya investasi Taiwan di Filipina dan di sisi lain ekonomi Cina sedang tumbuh dan

gencar melakukan ekspansi khususnya pasca Perang Dingin. Pihak Manila juga terus membangun komunikasi dengan Beijing karena bagaimanapun mempunyai masalah terkait dengan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang saling diperebutkan (Carino, 1995).

Secara umum, ada empat aspek geopolitik yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina dan berpengaruh kepada dinamika politik dalam negeri. Keempat aspek tersebut adalah masalah tapal batas, pembangunan identitas nasional, perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri dan menjaga eksistensi Filipina di arena internasional. Bagaimanapun Filipina menghadapi persoalan pelik terkait masalah ekonomi, keamanan dalam negeri khususnya di Filipina Selatan dan juga isu kedahulatan di Laut Cina Selatan. Presiden Duterte yang cenderung “retorik-nasionalis” tampaknya juga berisiko tinggi berhadapan dengan AS sekutu dekatnya. Apalagi Cina yang ekspansionis sangat dibutuhkan Cina untuk memperbaiki kondisi ekonominya, namun juga bersitegang di Laut Cina Selatan. Oleh karenanya, muncul apa yang dinamakan dengan kebijakan “*Double Asymmetric Structure*.” Dengan kebijakan ini Manila berusaha mengambil segala peluang di tengah persaingan AS-Cina di Asia Tenggara (Chiang, 2017). Dampaknya terjadi dinamika luar biasa bagaimana kekuatan-kekuatan luar berlomba mempengaruhi dinamika dalam negeri Filipina. Sehingga tidak heran bagaimana politik dan demokrasi dalam negeri Filipina sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut (Baviera, 2012).

## Filipina dan Demokrasi Pasca Perang Dingin

Dinamika politik pasca Perang Dingin di Filipina tidak jauh dari sebelumnya. Budaya politik “nepotisme” akibat dari kerangka politik *patron-client* masih menjadi dominasi dalam diskursus publik. Budaya *patron-client* tersebut nampaknya sudah ada sejak lama dalam budaya politik masyarakat Filipina. Jika ditelusuri lebih jauh, mengakarnya budaya politik *patron-client* tidak lain akibat politik kesukuan atau “*clan politics*” yang tumbuh dalam tradisi politik (Putzel, 1995). Dalam istilah lain, “*clan politics*” yang tumbuh dari tatanan sosial feodalistik mengakibatkan apa yang disebut Benedict Anderson sebagai “*Cacique Democracy*” (Anderson, 1988). Dampaknya pengalaman-pengalaman feodalisme akan selalu tumbuh meskipun telah mengalami pergantian rezim berkali-kali. Artinya ada semacam budaya untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan. Jika tidak berkuasa secara formal, minimal bisa “memelihara” kekuasaannya tidak masalah siapapun yang akan berkuasa. Hal ini tidak lain akibat dampak penjajahan Spanyol dan menjadi budaya yang sama di kalangan negara-negara Amerika Latin (Dove, 2004).

Di awal tahun 1990an, dinamika politik Filipina mulai menggeliat menyusul pesta demokrasi Pemilihan Umum 1992. Tatanan sosial dan politik sejak awal termasuk mendekati Pemilihan Umum 1992, menyaksikan keterlibatan aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat berpengaruh di masyarakat. Pemilihan Umum 1992 yang akhirnya dimenangkan oleh Presiden Fidel Ramos, tidak lepas dari kuatnya peran LSM dalam mempengaruhi hasil



pemungutan suara dan partisipasi politik. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa, dalam konteks Pemilihan Umum 1992, “kampanye” LSM bisa dikategorikan dalam dua narasi. Pertama, LSM yang fokus pada isu pemberdayaan masyarakat dan kedua, menekankan pada isu-isu seputar pendidikan politik bagi masyarakat umum (Rood, 1992). Peran LSM memang sangat penting dalam dinamika politik di Filipina. Masyarakat Filipina juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui LSM. Bahkan bisa dikatakan LSM menjadi tulang punggung pembangunan Filipina (Asian Development Bank, 2007).

Menarik untuk dibahas bahwa LSM di Filipina memang menjadi jangkar pembangunan Filipina di tengah maraknya praktik nepotisme dan korupsi di pemerintahan Filipina. Hal ini tidak lain bersumber dari budaya politik nepotisme sebagaimana dijelaskan di atas yang sangat kuat di Filipina. Di era Presiden Marcos misalnya korupsi sangat masif dan sentralistik di lingkungan kekuasaan sang Presiden (Roumasset, 2008). Dalam perjalanannya, peran serta LSM di Filipina tidak semudah yang dibayangkan. Di tengah masifnya korupsi dan budaya politik klan/nepotisme peran LSM seolah di persimpangan jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran LSM semakin diperhitungkan dan mengambil peran penting dalam proses liberalisasi politik dan ekonomi di Filipina (Reid, 2008). Pada tahun 2013 misalnya tercatat sekitar 60.000 LSM terdaftar termasuk 10.000 kelompok sosial kemasyarakatan/ *civil-society groups*

dan 5.000 kelompok penggerak pembangunan. Hasilnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui U.S. *Agency for International Development* (USAID) menyumbangkan dana sekitar USD 24 Juta untuk LSM di Filipina. Dana tersebut diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi LSM untuk memperbaiki beberapa isu terkait pembangunan ekonomi, keanekaragaman hayati, perdagangan manusia, pendidikan termasuk isu pemerintahan (Santos, 2013).

Dinamika politik Filipina tahun 1990an sangat dinamis pasca amandemen Konstitusi Nasional Filipina tahun 1986. Akibatnya, masa jabatan presiden hanya dibatasi satu kali masa jabatan yaitu enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Tahun 1992 pasca terpilihnya Fidel Ramos, setidaknya ada dua tantangan utama yaitu keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta masalah keamanan dalam negeri (Canlas, 2007). Masalah pertama yaitu hubungan eksekutif-legislatif pasca Pemilihan Umum 1992. Hal ini tidak lain akibat selisih kemenangan Presiden Ramos yang sangat kecil dibanding lawan-lawannya. Adapun total perolehan suara Pemilihan Umum Filipina 1992 seperti tabel berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pemilihan Umum Filipina 1992**

No	Kandidat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	Fidel V. Ramos	People Power– National Union of Christian Democrats	5,342,521	23.58%
2.	Miriam Defensor Santiago	People’s Reform Party	4,468,173	19.72%
3.	Eduardo Cojuangco, Jr.	Nationalist People’s Coalition	4,116,376	18.17%
4.	Ramon Mitra, Jr.	Struggle of Democratic Filipinos	3,316,661	14.64%
5.	Imelda Marcos	New Society Movement	2,338,294	10.32%
6.	Jovito Salonga	Liberal Party	2,302,123	10.16%
7.	Salvador Laurel	Nationalist Party	770,046	3.40%
Total			22,654,195	100 %

*Sumber: (Commission on Elections, 1992).*

Data di atas jelas menunjukkan bahwa tantangan Presiden Ramos sangat berat akibat selisih suara yang tipis hanya sekitar 2% saja. Tentunya Presiden Ramos telah melakukan berbagai terobosan politik untuk mendapatkan dukungan rakyat. Misalnya beberapa program pembaharuan seperti 1) memposisikan pemerintah sebagai regulator yang semula sangat memonopoli segala bidang, 2) deregulasi minyak dan privatisasi air , dan 3) memberikan ruang bagi sektor swasta

untuk menggerakkan pembangunan negara (Bernardo, tanpa tahun). Adanya berbagai perubahan tersebut nyata menjadi senjata Presiden Ramos memperkuat posisi politiknya. Bagaimanapun, meskipun kontestasi politik di parlemen sangat sengit, namun partai Presiden Ramos *People Power-National Union of Christian Democrats* semakin mendominasi perpolitikan Filipina pasca menguasai negara tersebut. Dampaknya tidak saja meningkatnya ekonomi Filipina, tetapi postur kebijakan luar negeri Filipina juga semakin mantap di antara negara-negara Asia waktu itu yang tengah menikmati pertumbuhan ekonomi (Cibulka, 2008).

Tantangan kedua Presiden Ramos adalah masalah keamanan dalam negeri. Isu keamanan dalam negeri muncul tidak lain akibat masih belum kondusifnya kondisi politik di Filipina Selatan terkait dengan adanya gerakan separatis *Moro National Liberation Front* (MNLF). Kekhawatiran Presiden Ramos juga dipengaruhi oleh situasi politik periode sebelumnya ketika Presiden Corazon Aquino seringkali menghadapi ancaman kudeta. Oleh karena itu, Presiden Ramos mengeluarkan beberapa kebijakan penting untuk mengatasi masalah keamanan. Misalnya memberikan amnesti sekitar 4500 tahanan politik dengan berbagai kasus melibatkan mantan tentara, anggota partai komunis, dan anggota separatis MNLF. Selain itu, pemerintah Manila juga mempercepat proses perundingan damai dengan Mindanao termasuk membentuk badan khusus yang menangani perdamaian tersebut. Hasilnya, Mindanao mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah Manila sehingga menjadi provinsi

yang dikenal sekarang sebagai *The Autonomous Region in Muslim Mindanao* (Canlas, 2007).

Pasca Perang Dingin di saat negara-negara Asia Tenggara mendapat sorotan internasional terkait demokrasi, Filipina terlihat selangkah lebih maju. Ketika tahun 1998 menjadi hari-hari terakhir Presiden Ramos, perpolitikan Filipina semakin matang. Setidaknya hal ini terlihat dari hasil Pemilihan Umum 1998 yang menunjukkan prestasi mengagumkan. Pemilihan Umum 1998 dianggap sebagai Pemilihan Umum paling bersih adil dan “kejam” dalam sejarah Filipina. Wakil Presiden era Presiden Ramos yaitu Joseph Estrada menjadi presiden Filipina ke 13 dengan kemenangan mutlak atas lawan-lawannya. Tahun 1998 juga menyaksikan bagaimana kokohnya fondasi sosial politik Filipina yang disokong oleh tingginya partisipasi masyarakat melalui LSM. Hal ini juga menjadi bukti menguatnya tingkat demokrasi Filipina dibanding negara lain pada saat itu. Setidaknya hal ini dibuktikan adanya keterlibatan aktif LSM *Movement for Free Elections (NAMFREL)*, termasuk mulai populernya lembaga-lembaga *survey* seperti *Social Weather Stations (SWS)* yang melakukan *exit-poll* (Montinola, 1999). Adapun hasil lengkap Pemilihan Umum Filipina 1998 seperti berikut:-

**Tabel Perolehan Suara Pemilihan Umum Fipilina 1998**

No	Kandidat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	Joseph Estrada	Force of the Filipino Masses	10,722,295	39.86%
2.	Jose de Venecia	People Power–National Union of Christian Democrats–Union of Muslim Democrats of the Philippines	4,268,483	15.87%
3.	Raul Roco	Democratic Action	3,720,212	13.83%
4.	Emilio Osmeña	Provinces First Development Initiative	3,347,631	12.44%
5.	Alfredo Lim	Liberal Party	2,344,362	8.71%
6.	Renato de Villa	Party for Democratic Reforms–Workers’ Party	1,308,352	4.86%
7.	Miriam Defensor Santiago	People’s Reform Party	797,206	2.96%
8.	Juan Ponce Enrile	Calon Independen	343,139	1.28%
9.	Santiago Dumlao	Movement for National Change	32,212	0.12%
10.	Manuel Morato	Party of Noble Nation	18,644	0.07%
Total			26,902,536	100%

*Sumber: (Commission on Elections, 1998)*

Pasca Pemilihan Umum 1998 dan terpilihnya Joseph Estrada, tantangan pemerintahan baru justru semakin menantang. Keberhasilan demokrasi tahun 1998 diwarnai dengan gejolak jatuhnya ekonomi negara yang sudah dibangun oleh Presiden Fidel Ramos. Hal ini tidak lain akibat jatuhnya nilai mata uang Peso yang juga melanda sebagian besar negara Asia Tenggara. Merosotnya tingkat ekonomi ini dimulai dengan jatuhnya harga saham di Filipina dan negara sekitar pada akhir 1997. Misalnya bursa-bursa saham di Jakarta 40%, Kuala Lumpur 17%, Bangkok 50%, dan Manila 10%. Puncaknya adalah bulan Desember 1997 di mana keadaan ekonomi Filipina benar-benar jatuh ditandai dengan tingginya tingkat inflasi, meningkatnya angka pengangguran, dan melambungnya angka kemiskinan yang menjadikan kehidupan masyarakat semakin sengsara (Montinola, 1999). Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dan politik, transfer kekuasaan dari Fidel Ramos kepada Joseph Estrada berjalan dengan lancar. Fidel Ramos ingin menunjukkan sebagai seorang demokrat dan negarawan. Oleh karenanya, sebuah pawai besar diadakan oleh pemerintahan baru sebagai bentuk perpisahan dan apresiasi kepada jasa-jasa Presiden Fidel Ramos (Montinola, 1999).

Di era Joseph Estrada, keadaan Filipina terlihat tidak mengalami perubahan signifikan pasca terjangan krisis ekonomi Asia yang juga melanda Filipina. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak terlalu memberikan dampak kepada masyarakat luas. Secara umum, ekonomi Filipina di hari-hari terakhir Estrada sebelum dilengserkan mengalami keadaan yang kurang memuaskan. Tercatat hutang negara

semakin besar di mana tahun 2000 saja total keseluruhan hutang Filipina mencapai PhP 2,2 triliun. Jumlah ini setara dengan 65 % dari GDP Filipina pada waktu itu. Selain itu, angka kemiskinan semakin mengkhawatirkan menembus angka 30% atau dengan kata lain satu dari tiga orang Filipina tergolong miskin pada waktu itu (Beja Jr., 2009). Di sisi lain, pemerintahan Presiden Estrada juga menghadapi tantangan besar terkait dengan situasi di Mindanao. Di era Presiden Fidel Ramos, pemerintah Manila menggunakan pendekatan lunak ke MNLF dengan melakukan dialog dan perdamaian. Sebaliknya, Presiden Estrada cenderung menggunakan pendekatan offensif. Alih-alih berdamai, Presiden Estrada justru melancarkan “*all-out war*” untuk menumpas MNLF. Salah satunya menyerang salah satu kawasan basis kuat MILF/MNLF yang dikenal dengan Camp Abubakar di Provinsi Maguindanao. Kebijakan Estrada tersebut jelas sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri AS pasca 9/11 dan kampanye “*war on terror*” (Ferrer, 2001; Quimpo, 2007).

Malangnya, proses demokrasi yang berjalan lancar dan elegan ketika Presiden Estrada terpilih tahun 1998 dinodai dengan skandal korupsi. Akibatnya Presiden Estrada di “*impeach*” oleh Kongres yang berakhir dengan pelengseran mantan artis tersebut. Adanya skandal tersebut seolah membawa level demokrasi Filipina ke tingkat bawah. Dalam kasus tersebut, Presiden Estrada didakwa menerima suap dari sejumlah pihak. Sebuah catatan menyebutkan Estrada menerima suap sebesar PhP10 milyar (US\$200 juta) dalam bentuk uang tunai termasuk sejumlah aset. Lembaga *Transparency International (TI)* bahkan menempatkan Presiden



Estrada antara sepuluh pemimpin paling korup sedunia waktu itu atau *Top 10 Global Corrupt Leaders of all time* (Arugay, 2005). Dampak atas kasus yang menimpa Presiden Estrada, telah memicu “*people power*” Jilid II atau *Second EDSA Revolution (EDSA<sup>7</sup> II)* yang berujung pada tuntutan mundur Presiden Estrada. Pasca demo besar-besaran selama empat hari dan desakan di tataran elit, maka tanggal 20 Januari 2001 Presiden Estrada mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada wakilnya yaitu Gloria Macapagal-Arroyo (Barreveld, 2001). Pada tahap selanjutnya, Presiden Estrada terbukti bersalah menerima suap dan diganjar dengan pidana kurungan seumur hidup. Namun, Presiden Macapagal-Arroyo yang merupakan mantan wakilnya memberikan amnesti kepada Estrada (Reuters, 25 Oktober 2007) dan bahkan akhirnya mendapatkan posisi politik baru sebagai Walikota Manila tahun 2013 (GMA News, 30 Juni 2013).

Di era Arroyo, demokrasi Filipina masih memanas. Hiruk pikuk politik seputar pemerintahan menghiasi hampir setiap hari di media-media utama di Filipina. Naiknya Arroyo pasca pelengseran Estrada nampaknya berbuntut panjang. Penahanan Estrada memicu “*people power*” Jilid III atau *EDSA III/ Tres* terutama di Manila yang dilakukan oleh pendukung Estrada pada April 2003. Demonstran menuntut supaya Arroyo mundur dari jabatan presiden dan mengembalikan mandat kepada Estrada. Tidak ada jalan lain kecuali pemerintah Arroyo melakukan tindakan tegas dengan memberlakukan

---

<sup>7</sup> EDSA (Epifanio de los Santos Avenue) adalah singkatan nama jalan utama yang menghubungkan lima kota utama di Metro Manila yaitu Pasay, Makati, Madaluyong, Quezon City, dan Caloocan.

apa yang disebut dengan “*State of Rebellion.*” Aturan tersebut merupakan bagian dari undang-undang darurat militer yang mengizinkan aparat pemerintah melakukan penindakan berupa penahanan, menginvestigasi, membuka dokumen pribadi dan melakukan penyadapan tanpa proses hukum. Hasilnya gelombang protes yang dilakukan oleh para lalays Estrada bisa dihentikan dan sebagian besar telah ditahan. Bahkan sebagian pendemo mempunyai senjata rakitan tradisional “*Sumpak*” ketika melakukan demonstrasi di depan Istana Malacanang (Philstar, 29 April 2002; Gonzales, 2003).



Senjata Tradisional "Sumpak"

*Sumber: (Impro Guns, 2015)*

Periode pertama pemerintahan Presiden Arroyo terlihat sangat menantang. Pasca “*people power*” Jilid III, Presiden Arroyo terus diuji termasuk ancaman kudeta dari kalangan militer. Percobaan kudeta yang terjadi hanya berselang 3 bulan pasca *People Power* Jilid III tersebut sekitar Juli 2003 terkenal dengan peristiwa “*Oakwood Mutiny.*” Percobaan kudeta tersebut dilakukan oleh sejumlah perwira-perwira muda di Angkatan Darat Filipina yang menamakan dirinya kelompok “*Bagong Katipuneros*” (*The Daily Tribune*, 22 Februari 2006). Para perwira muda tersebut melakukan penududukan sebuah hotel bernama Oakwood Premier Ayala Center (sekarang bernama Ascott Makati). Kelompok ter-

sebut mengklaim bahwa tindakannya bertujuan untuk melakukan “perang” melawan praktik korupsi yang sudah merajalela, kepemimpinan yang lemah, dan rendahnya kemampuan finansial di angkatan bersenjata filipina. Salah satu terdakwa adalah Antonio Trillanes seorang perwira Angkatan Laut Filipina. Namun kemudian diberi amnesti oleh Presiden Benigno Aquino dan bahkan sekarang menjadi senator. Diduga kuat percobaan kudeta tersebut hanya untuk meningkatkan posisi tawar Angkatan Bersenjata Filipina agar anggaran pertahanan dinaikkan terutama masalah kesejahteraan dan kemampuan alutsista (David, Taliaferro, & Hinkle, 2017).

Disebabkan Arroyo meneruskan Presiden Estrada, maka masih layak untuk maju dalam Pemilihan Umum 2004. Hasilnya seperti berikut:-

No	Kandidat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	Gloria Macapagal-Arroyo	People Power-Christian Muslim Democrats	12,905,808	39.99%
2.	Fernando Poe Jr.	Coalition of United Filipinos	11,782,232	36.51%
3.	Panfilo Lacson	Struggle of Democratic Filipinos	3,510,080	10.88%
4.	Raul Roco	Democratic Action	2,082,762	6.45%
5.	Eddie Villanueva	Rise Up Philippines Party	1,988,218	6.16%
Total			32,269,100	100%

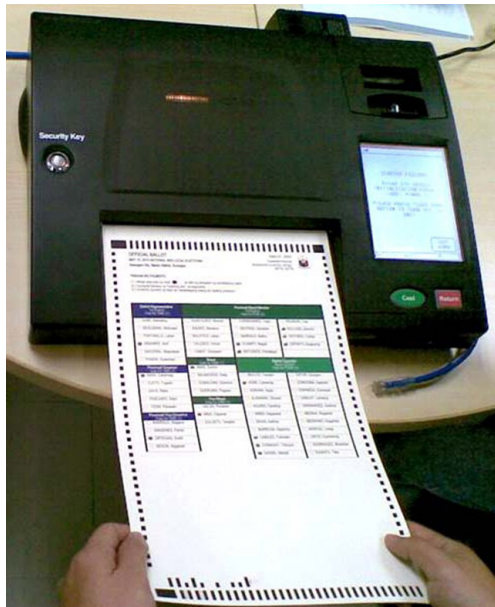
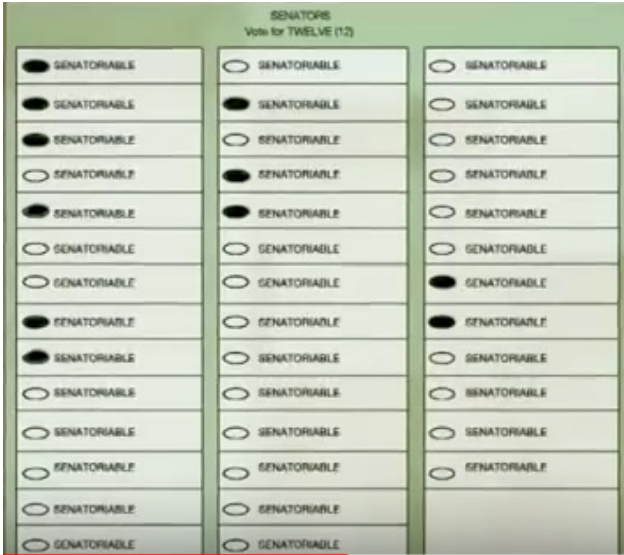
*Sumber: (Commission on Elections, 2004)*

Pada tahun 2006, pemerintahan Arroyo yang memasuki “periode kedua” menjadi presiden Filipina, kembali menghadapi percobaan kudeta. Kali ini dilakukan oleh beberapa oknum perwira pertama dan perwira tinggi dalam Angkatan Bersenjata Filipina. Dengan menggunakan sandi “*Oplan HACKLE*,” kelompok yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Danilo Delapuz Lim juga bekerja sama dengan kelompok separatis. Tujuan Brigadir Jenderal Lim dan kelompoknya tidak lain adalah untuk menggulingkan Presiden Arroyo. Akibat situasi ini, pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat atau *State of Emergency* (Greene & Marsh, 2012). Uniknya, sebagaimana kudeta “*Oakwood Mutiny*”, pemimpin kudeta Brigadir Jenderal Danilo Lim juga bernasib mujur. Karena di bawah pemerintah Presiden Duterte sekarang mendapatkan jabatan sebagai Ketua *Metropolitan Manila Development Authority (MMDA)* sebuah jabatan setingkat gubernur yang mengelola beberapa kota di Manila atau dikenal dengan Metro Manila (GMA News, 22 Mei 2017).

Belum genap setahun peristiwa *Oplan HACKLE*, tepatnya Februari 2007 terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan negara dan internasional. Para terdakwa *Oplan HACKLE* yang menjalani proses hukum termasuk Brigadir Jenderal Lim bekerja sama dengan dalang “*Oakwood Mutiny*” Antonio Trillanes yang sudah menjadi senator dari jalur independen, melakukan sebuah pergerakan yang dianggap mengancam keamanan negara dikenal dengan peristiwa *Manila Peninsula siege*. Sebagai mantan tentara, naluri kedua tokoh tersebut muncul. Di tengah proses persidangan berlangsung, tokoh-tokoh pergerakan tersebut keluar persidangan “*walked out*”

dan bergabung dengan massa demonstran yang sudah siap di jalanan. Bahkan beberapa demonstran yang juga melibatkan warga sipil mempunyai senapan M-16 dan M-14. Para pelaku gerakan melakukan pendudukan Hotel Peninsula Manila, di Makati sebagai pusat komando. Pihak keamanan Filipina langsung mengerahkan sekitar 1500 personel militer untuk menumpas gerakan tersebut dan akhirnya berhasil memadamkan pergerakan dan menangkap semua yang terlibat (AFP, 22 November 2007). Dampak dari berbagai dinamika di atas tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Arroyo sangat rendah. Tujuh bulan menjelang akhir jabatannya, sebuah survey menyebutkan bahwa 50% lebih rakyat Filipina tidak puas dengan pemerintahan Arroyo (GMA News, 23 November 2009).

Pasca Presiden Arroyo lengser setelah Pemilihan Umum tahun 2010, Filipina dipimpin oleh Benigno Simeon “Noynoy” Cojuangco Aquino III atau dikenal sebagai Benigno Aquino III. Di tengah berbagai permasalahan era Presiden Arroyo, Benigno Aquino III menang secara meyakinkan dalam kontestasi Pemilihan Umum 2010. Pada Pemilihan Umum 2010 juga mencatatkan sejarah di mana untuk pertama kalinya menggunakan sistem komputer atau “*automated election system*” sebagaimana visualisasi berikut:-



*Sumber: diolah dari berbagai sumber*

Selengkapnya hasil lengkap Pemilihan Umum 2010 bisa dilihat dalam Tabel berikut:-

**Tabel Perolehan Suara Pemilihan Umum Fipilina 2010**

No	Kandidat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	Benigno Aquino III	Liberal Party	15,208,678	42.08%
2.	Joseph Estrada	Force of the Filipino Masses	9,487,837	26.25%
3.	Manny Villar	Nationalist Party	5,573,835	15.42%
4.	Gilberto Teodoro	People Power– Partner of Free Filipinos– Christian Muslim Democrats	4,095,839	11.33%
5.	Eddie Villanueva	Rise Up Philippines	1,125,878	3.12%
6.	Richard Gordon	New Nation– Volunteers for a New Philippines	501,727	1.39%
7.	Nicanor Perlas	Independent	54,575	0.15%
8.	Jamby Madrigal	Independent	46,489	0.13%
9.	John Carlos de los Reyes	Alliance for the Common Good	44,244	0.12%
			36,139,102	100%

*(Commission on Elections, 2010)*

Pasca terpilih sebagai Presiden Filipina pada Juni 2010, Benigno Aquino III langsung bekerja merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Namun, tantangan juga tidak mudah. Karena, Presiden yang populer dengan nama Pnoy, harus menyelesaikan pekerjaan rumah warisan Presiden Arroyo yang sangat kompleks. Pemerintahan Arroyo disebut sebagai pemerintahan yang korup, penuh dengan huru-hara politik, dan tumbuhnya politik dinasti di lingkaran kekuasaan (Abinales, 2011; Reyes, 2013). Namun, pemerintahan Presiden Pnoy yang baru berjalan dua bulan langsung mendapat ujian. Pada Agustus 2010, publik Filipina dan internasional dikejutkan dengan peristiwa penyanderaan bus pariwisata oleh seorang mantan anggota polisi yang dipecat. Pemerintah Filipina dinilai gagal menyelamatkan para sandera yang kebanyakan warganegara China-Hong Kong. Sembilan orang meninggal termasuk pelaku penyerangan Rolando Mendoza. Tragedi ini langsung mendapat perhatian dunia termasuk berdampak pada hubungan China-Filipina. Pemerintah Manila dinilai “tidak serius” dan “tidak mampu” menangani krisis dengan baik. Apa yang menarik perhatian banyak pengamat adalah kepolisian Filipina dianggap menerjunkan pasukan “tidak terlatih.” Padahal yang dikerahkan adalah pasukan terbaik kontra-terorisme di kesatuan polisi Filipina yaitu *Special Weapons and Tactics (SWAT)* dan *Special Action Force (SAF)* (Avila & Olfato, 2010).

Kapabilitas dan reputasi Presiden Pnoy terus diuji. Pasca tragedi pembajakan bus yang menewaskan sejumlah wisatawan Hong Kong, pemerintahan Presiden Pnoy juga dianggap kurang responsif dalam menangani krisis sebagaimana



terjadi dalam peristiwa pembajakan bus. Hal ini terjadi juga ketika Filipina diterjang bencana Angin Topan Hainan atau *Typhoon Haiyan (Yolanda)* pada November 2013. Lambatnya respons pemerintah atas bencana yang menewaskan 6.300 orang, memicu simpati dan bantuan segera dari berbagai negara. Pemerintah Kanada yang menjadi pihak pertama datang ke lokasi bencana dan menyalurkan bantuan kepada para korban juga mengeluh terkait lambannya pemerintah Manila (Rappler, 14 Januari 2016). Pemerintah Manila juga mengakui kelambanan dalam menangani krisis ini. Namun, respons dan permintaan maaf yang dilakukan oleh Presiden Pnoy juga terlambat karena diucapkan setelah empat bulan pasca badai menerjang sebagian besar kawasan Filipina (GMA News, 13 Maret 2014). Hampir setahun kemudian, tepatnya Januari 2015, pemerintahan Pnoy juga dihujani kritik pasca tragedi bentrokan berdarah “*Mamasapano clash*” di Kota Mamasapano, Mindanao, Filipina Selatan yang menewaskan 44 pasukan polisi anti-terorisme. Padahal tujuan utamanya adalah memburu tokoh Jemaah Islamiyah Asia Tenggara berkewarganegaraan Malaysia yaitu Zulkifli Abdhir. Meskipun target operasi yang diduga kuat melibatkan pasukan khusus AS *United States Army Special Forces* yaitu Zulkifli Abdhir tewas, namun pemerintah Filipina justru dihujani kritik dalam negeri. Justru yang muncul adalah “*Mamasapano clash*” sebagai bahan pencitraan oleh Presiden Pnoy menjelang Pemilihan Umum Presiden 2016 (Abuza, 2015).

Pemilihan Umum Presiden 2016 akhirnya digelar Mei 2016. Peta politik akhirnya berubah, Rodrigo Duterte menjadi

pemimpin baru Filipina dengan berbagai dobrakan dan janji-janji kampanye progresif selama kampanye:-

No	Kandidat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	Rodrigo Duterte	Philippine Democratic Party– People’s Power	16,601,997	39.01%
2.	Mar Roxas	Liberal Party	9,978,175	23.45%
3.	Grace Poe	Independent	9,100,991	21.39%
4.	Jejomar Binay	United Nationalist Alliance	5,416,140	12.73%
5.	Miriam Defensor Santiago	People’s Reform Party	1,455,532	3.42%
			42,552,835	100%

*Sumber: (Commission on Elections, 2016)*

Kemenangan Presiden Duterte nyata berdampak signifikan bagi perpolitikan Filipina. Presiden Duterte muncul sebagai tokoh yang sangat berkarakter, tegas dan semakin populer. Meskipun secara statistik, hasil pemilu tidak terlalu memuaskan, namun keadaan berbaik pasca resmi menjadi pemimpin Filipina. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tertinggi yaitu 91% tertinggi setelah Presiden Ferdinand Marcos tahun 1965-1986 (Parameswaran, 2016). Dua bulan pasca pelantikan sebagai presiden, pemerintahan Duterte mendapat ujian sebuah tragedi ledakan bom di Kota Davao, Mindanao. Tragedi yang dikenal dengan “2016 Davao City Bombing,”

sebenarnya merupakan implikasi dari kebijakan agresif Duterte pasca terpilih menjadi Presiden Filipina. Presiden Duterte memerintahkan militer Filipina menghancurkan basis kelompok Abu Sayyaf di Mindanao pasca terbunuhnya seorang pemuda yang dipenggal kepalanya oleh kelompok tersebut (Manila Bulletin, 28 Agustus 2016). Namun, justru dijawab dengan aksi pemboman di sebuah kawasan pasar malam di tengah Kota Davao pada 2 September 2016. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai “*Maute Group*” atau *Islamic State of Lanao* mengklaim bertanggungjawab atas serangan yang menewaskan 14 orang tersebut (Inquirer, 3 September 2016).

Sejak dipimpin Presiden Duterte, terjadi perubahan-perubahan signifikan kebijakan pemerintahan Filipina. Misalnya lebih persuasif dengan kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dan mendapat perlakuan buruk pemerintah Manila. Dengan strategi persuasif Presiden Duterte, dua kelompok utama yang menginginkan kemerdekaan/otonomi di Mindanao yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) (dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim) dan *Moro National Liberation Front* (MNLF) (dipimpin oleh Nur Misuari). Namun, situasi semakin memburuk akibat perpecahan internal termasuk sebagian bergabung dengan kelompok teroris. MILF tidak lain adalah sempalan MNLF yang keluar dan membentuk barisan perjuangan politik sendiri (Mapping Militant Organizations, 2015).

Kebijakan lain yang sangat mencuri perhatian internasional adalah kebijakan progresif Presiden Duterte memerangi narkoba. Terobosan Presiden Duterte nyata membuat bandar-bandar narkoba kalang kabut dan terus terdesak. Bahkan salah satu harian nasional Filipina memuat daftar yang bandar-bandar narkoba tersebut (Inquirer, 7 Juli 2016). Atas kebijakan Presiden Duterte menuai banyak protes dari berbagai kalangan terutama pegiat hak asasi manusia. Bahkan Senat Filipina juga mengkritik keras kebijakan Presiden Duterte memerangi narkoba dengan caranya tersebut. Tiga bulan pertama kebijakan perang melawan narkoba, menghasilkan catatan yang sangat mencengangkan. Sekitar 3.000 orang terbunuh selama operasi dan kesemuanya terlibat kejahatan narkoba. Ketika komisi hak asasi manusia Filipina atau *Commission on Human Rights*, mengkritik “kekejaman” Presiden Duterte yang dianggap melanggar hak asasi manusia, dijawab dengan nada datar. Presiden Duterte justru mengatakan:-

*“Crime against humanity? In the first place, I’d like to be frank with you. Are they humans? What is your definition of a human being?.*

(Kejahatan atas kemusiaan? Pertama, saya ingin mengatakan yang sebenarnya pada anda. Apakah mereka manusia? Apakah definisi anda tentang kemanusiaan?)

*Human rights? Use it properly in the right context if you have the brains*

(Hak asasi manusia? Gunakahlan sesuai tempat pada konteks yang tepat jika anda mempunyai otak) (Straits Times, 29 Agustus 2016)

Kempemimpinan Presiden Duterte justru semakin meyakinkan. Tidak saja bandar narkoba yang menjadi sasaran kebijakan Presiden Duterte, namun juga kelompok separatis berhaluan komunis bahkan masih berlangsung hingga buku ini ditulis. Presiden Duterte seolah tidak mau membuang waktu dengan pemberontak komunis yang sudah beroperasi sejak 1971. Bahkan pada akhirnya Presiden Duterte memerintahkan aparat keamanan untuk menangkap semua negosiator kelompok komunis yang terdiri dari tiga afiliasi politik yaitu *Communist Party of the Philippines* (CPP), *the New People's Army* (NPA), dan *the National Democratic Front* (NDF). Bahkan pada akhir tahun 2017, Presiden Duterte mendeklarasikan bahwa kelompok komunis tersebut sebagai organisasi teroris (Inquirer, 5 Desember 2017). Selain kelompok komunis, yang menjadi pekerjaan rumah cukup berat Presiden Duterte adalah masalah konflik di Marawi. Krisis di Marawi menjadi konflik terlama sepanjang sejarah Filipina. Namun, usaha Presiden Duterte membuahkan hasil pasca operasi militer besar-besaran yang akhirnya menewaskan tokoh kuncinya yaitu Omar Maute dan Isnilon Hapilon. Kekalahan kelompok militan yang tergabung dalam jaringan *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) menandai berakhirnya krisis Marawi dan bebas dari penguasaan kelompok teroris (Al Jazeera, 19 Oktober 2017). Apa yang pasti politik di Filipina akan selalu dinamis pada waktu-waktu

akan datang. Dalam konteks demokrasi Filipina pasca Perang Dingin, terlihat bahwa Filipina yang sudah lama menjadi sahabat dekat Barat khususnya AS dan fondasi demokrasi kuat maka tidak terlalu menghadapi tekanan asing. Namun, akhir 1990-an internal Filipina terlihat cukup tergoncang diterjang badai krisis ekonomi Asia sebagaimana menimpa negara-negara lain. Menariknya, perlawanan kelompok komunis yang menjadi narasi utama selama Perang Dingin baru saja bisa dihentikan secara signifikan ketika Presiden Duterte memerintah Filipina.

### **Manila dan Islam di Filipina Selatan**

Membicarakan Manila dan Islam di Filipina Selatan, tentu menjadi penting mengingat ada kepentingan umat Islam di kawasan tersebut. Namun, sebagaimana diketahui kawasan Filipina yang menjadi basis umat Islam kondisinya sangat memprihatinkan. Filipina Selatan identik dengan kawasan berbahaya, basis kekerasan, konflik, miskin dan tidak terurus. Bahkan pada tahun 2017 majalah *Financial Review* menempatkan Filipina urutan ke-11 dalam “*the 20 most dangerous countries in the world for tourists*” (Financial Review, 9 Juni 2017). Begitu juga dalam index kebebasan dan keamanan jurnalisme (*impunity index*) tahun 2017, Filipina menduduki urutan ke-5 sebagai negara paling berbahaya bagi wartawan. Hal ini tidak lain akibat memburuknya kondisi di Filipina Selatan. Selengkapnya bisa dilihat dala visualisasi di bawah ini:-

## Impunity Index 2017

CPJ's Impunity Index calculates the number of unsolved journalist murders as a percentage of each country's population. Only those nations with five or more unsolved cases are included.



Sumber: Asian Correspondent (2 November 2017)

Keadaan ini tentunya menjadi pemikiran penting untuk dipecahkan karena banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Muslim di Filipina Selatan dan seluruh negara Filipina umumnya. Pariwisata merupakan salah satu potensi yang menjanjikan di Filipina Selatan. Berbagai potensi pariwisata terdapat di Filipina Selatan misalnya pantai, *scuba diving*, selancar, museum, taman, pendakian gunung, dan arung jeram. Antara tempat yang terkenal di kalangan wisatawan adalah Siargao dengan pantainya dengan menara selancarnya di *Cloud 9*. Termasuk memiliki gua, kolam renang, air terjun, dan laguna (sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya). Namun semuanya tidak muncul dalam diskursus pembangunan

Filipina tatkala kawasan selatan selalu dilanda konflik yang tidak berkesudahan.

Dalam bagian ini penulis ingin memfokuskan pada kondisi terkini Filipina Selatan dan nasib umat Islam pasca Perang Dingin. Inti permasalahan di Filipina Selatan tidak lain seputar isu ketidakadilan ekonomi, politik dan perlakuan buruk Manila atas “Bangsamoro” yang Muslim di Mindanao. Namun, layak untuk diketahui sedikit banyak latarbelakang konflik di Mindanao dan perkembangannya. Semuanya berawal dari sejarah Filipina Selatan sejak era penjajahan Spanyol dan digantikan AS. Kedua penjajah memberlakukan kebijakan yang sama yaitu melakukan serangkaian “pendudukan” secara sistematis dengan “mengerahkan” pribumi Kristen untuk menyerang kawasan pribumi Muslim di Filipina Selatan. Kedua penjajah juga mendorong pembangunan pemukiman-pemukiman Kristen untuk mengimbangi kawasan Muslim. Pemerintah Manila juga memaksa mengintegrasikan Muslim ke dalam kerangka kebangsaan “Filipino” yang Kristen. Kebijakan diskriminatif juga diterapkan untuk menjamin agar kelompok Kristen mempunyai keistimewaan dibanding Muslim. Hal inilah yang kemudian memicu resistensi dan pemberontakan oleh masyarakat Muslim di Filipina Selatan. Oleh karena itu, muncul kemudian kelompok-kelompok separatis yang tidak puas dan menuntut Manila bertindak adil kepada rakyat Muslim di Mindanao. Dimulai tahun 1968 terbentuk *Mindanao Independence Movement* yang kemudian berkembang menjadi MNLF dan terus-menerus dinamis hingga sekarang (Quimpo, 2007).



Beberapa perundingan sebenarnya telah membuahkan kesepakatan antara Manila dan Muslim di Mindanao. Perjalanan menuju perdamaian di Filipina Selatan sangat berliku dan sulit direalisasikan. Dalam tabel berikut bisa dilihat alur dan perkembangan dinamika Manila-Muslim di Mindanao.

Tahun	Perundingan	Hasil
1976	Perjanjian Tripoli 1976 diprakarsai Organisasi Konferensi Islam (OKI), kedua pihak setuju untuk dibentuk kawasan otonomi dengan 13 provinsi (era Presiden Marcos)	Implementasi berbeda dengan isi perjanjian. Mengakibatkan MNLF pecah 1977 dan kembali bergerilya
1987	Perjanjian Jeddah, 1987 setuju melanjutkan diskusi isu otonomi	Presiden Corazon Aquino sepihak membentuk Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM).
1996	Perjanjian Jakarta, 1996, sepakat membentuk “special zone of peace and development” Nur Misuari menjadi Gubernur ARMM dan Ketua Southern Philippines Council for Peace and Development (SPCPD).	Tahun 2001 terjadi kontak senjata antara pemerintah dan pasukan MNLF di Jolo.

*Sumber: Quimpo (2007)*

Di tengah berbagai spekulasi dan perkembangan di Filipina Selatan, trend yang berkembang di kawasan bergejolak tampaknya hampir sama. Ketika konflik di Afghanistan (1979-1989), AS membentuk *proxy* yang berisi orang-orang lokal untuk mengkonter Uni Soviet. Maka lahirlah apa yang kemudian dikenal dengan kelompok mujahidin, taliban dan kemudian muncul al-Qaeda dan pecahan kelompoknya. Tidak bisa dipungkiri, dari titik inilah menyebar apa yang disebut sebagai “global Jihad” dan memicu serangkaian aksi teror internasional (Leake, 2018). Kelompok mujahidin di Afghanistan tidak lain merupakan hasil kolaborasi antara *Central Intelligence Agency* dan *Inter Services Intelligence Agency* milik Pakistan dengan sandi “*Operation Cyclone*” (Tadman, 2013). Ketika “proyek” telah selesai maka muncul masalah baru termasuk dukungan dana yang terhenti dan belum “beresnya” masalah yang sebenarnya misalnya kesejahteraan, pembagian kekuasaan dan lain-lain. Begitu juga dengan di Filipina Selatan, kuat dugaan gerakan Abu Sayyaf yang merupakan sempalan MNLF juga diinisiasi oleh pemerintah Manila bekerjasama dengan CIA (Phil Star, 9 Mei 2000). Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu petinggi MNLF ketika diwawancari oleh salah satu TV swasta Indonesia bahwa “Abu Sayyaf dibentuk oleh (elemen) pemerintah Filipina dan itu sudah menjadi rahasia umum.” Namun, ketika “dana dan dukungan” dihentikan maka muncul menjadi kelompok teror yang tidak segan menculik, meminta tebusan, dan membunuh tawanan agar bisa melanjutkan misinya (Official NET News, 16 Juli 2016).

Apa yang terjadi di Marawi juga tidak lepas dari dampak konflik berkepanjangan dan memicu perpecahan di kalangan pemberontak. Adanya penyusupan kepentingan luar semakin merumitkan permasalahan di Marawi. Keterlibatan “*foreign fighters*” alumni Syria dan Afghanistan terutama dari Indonesia dan Malaysia adalah bukti jelas bahwa konflik di Filipina Selatan semakin rumit dan jauh dari kata akhir. Kebijakan Presiden Duterte yang offensif melakukan operasi militer mungkin dalam jangka pendek telah membuahkan hasil termasuk tewasnya pimpinan kelompok bersenjata tersebut. Namun, dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan dan perlakuan yang adil pemerintah Manila kepada masyarakat Muslim di Mindanao. Akutnya tingkat korupsi di Filipina termasuk yang menjangkiti kawasan bergolak di Mindanao menjadi pekerjaan rumah super berat agar perdamaian bisa terwujud. Budaya nepotisme dan kolusi yang merupakan akar korupsi merupakan hal pertama harus diselesaikan dalam pemerintahan Filipina khususnya di Mindanao (Laut, et al., 2013).

## **Kesimpulan**

Secara umum demokrasi di Filipina sudah sangat matang. Hal ini ditandai dengan berbagai indikator. Pertama, kedewasaan demokrasi di kalangan elite politik meskipun kerap terjadi gejolak. Kedua, peralihan kekuasaan yang relatif mulus dan lancar melalui proses konstitusional. Ketiga, partisipasi pemilih sangat tinggi karena didukung oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam lembaga swadaya masyarakat. Namun, seringnya terjadi huru-hara politik yang melibatkan

militer dalam serangkaian aksi kudeta menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Filipina. Demokrasi di Filipina juga perlu diperbaiki terutama masih timpangnya pembangunan di Filipina Selatan. Perlakuan diskriminatif Manila terhadap komunitas Muslim di Mindanao menjadi catatan buruk proses berdemokrasi. Tetapi, akar permasalahan selain ketidakadilan ekonomi dan politik adalah akutnya penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mengurita di dalam pemerintahan dan masyarakat Filipina termasuk di Filipina Selatan. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang akan terus melakukan perang melawan korupsi.



## BAB 5

# Demokrasi dan Masalah Internal di Thailand Selatan

POLITIK dan demokrasi di Thailand termasuk paling dinamis. Sebagai negara yang tidak pernah dijajah, namun hakikatnya menjadi sekutu para penjajah seperti Inggris, Perancis hingga Jepang dengan “merelakan” sebaian wilayahnya digunakan untuk kepentingan pendudukan. Sebagaimana telah disinggung di bab pendahuluan, politik Thailand hampir tidak pernah berhenti dari hiruk-pikuk kontestasi anta elit. Militer Thailand termasuk aktor politik sangat penting yang setiap saat bisa mengubah konstelasi politik Thailand melalui kudeta. Dominasi militer Thailand dan keterlibatannya dalam berbagai kudeta menjadikan Negeri Gajah Putih lekat dengan ancaman kudeta (Acharya, 1998). Dalam sejarah Thailand modern, sudah terjadi kurang lebih 11 kali kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (Financial Times, 23 Mei 2014). Versi lain menyebutkan, jika digabung dengan jumlah kudeta yang berhasil, gagal dan percobaan kude, maka jumlahnya dari tahun 1932-2014 total sebanyak 20 kali insiden kudeta militer di Thailand (Farrelly, 2011; Farrelly,

2013). Dengan kata lain, dinamika politik yang berkembang akan selalu menghadapi ancaman terjadinya kudeta dari pihak militer Thailand. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa peran militer sangat signifikan dalam perpolitikan Thailand termasuk di Thailand Selatan sebagai basis umat Islam. Terus berlangsungnya pergolakan politik di Thailand Selatan terlihat jelas bagaimana militer Thailand gagal menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan yang mayoritas Melayu-Muslim. Faktanya, ada semacam “proyek” yang bisa dijadikan “sumber pendapatan” pihak militer Thailand dalam kasus di Thailand Selatan. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mencoba membahas latarbelakang politik di Thailand utamanya pasca Perang Dingin termasuk isu umat Islam di Thailand Selatan.

### **Thailand dan Geopolitik Pasca Perang Dingin**

Secara umum sifat kebijakan luar negeri Thailand sangat pragmatis yang merupakan sebuah kewajaran dalam politik internasional untuk menjamin keberlangsungan negara “*survival*” (Waltz, 1979). Artinya dalam konteks geopolitik internasional, Thailand sangat memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi berbagai tekanan dan tuntutan kekuatan besar agar kepentingan nasional tetap terjaga. Bahkan bisa dikatakan Thailand adalah contoh kisah sukses kebijakan luar negeri negara kecil dan berkembang (Suhrki, 1971). Pragmatisme kebijakan luar negeri Thailand tersebut dibungkus dengan istilah “fleksibel” atau “*bamboo in the wind*” yang menuntut kelihaihan dalam berdiplomasi dan menjamin mitra dialognya tidak merugikan serta negara (Kislenko, 2002). Oleh karenanya, buah dari kebijakan tersebut akhirnya

menjadikan Thailand “sukses” sebagai negara yang “tidak pernah dijajah” negara manapun. Ketika Perang Dunia II misalnya kelihaihan diplomasi Thailand mampu menarik perhatian Jepang dan sekutunya yang tergabung dalam *Axis Power (Rome-Berlin-Tokyo Axis)*. Ketika itu Thailand mendeklarasikan “Perang melawan Amerika Serikat” dan sekutunya hingga dijuluki “*Italy of Asia*” (St. John, 1998; Reynolds, 2005).

Demikian halnya dalam era Perang Dingin, kebijakan Thailand masih berlanjut dengan gaya pragmatisme. Ketika Perang Dunia II demi menyelamatkan negara rela “melawan AS” dan “bekerjasama” dengan Jepang untuk memberi jalan pasukan Jepang ke wilayah selatan (St. John, 1998), maka pasca Perang Dunia II dan masuk era Perang Dingin spontan mendukung AS sebagai lawan blok komunis. Alasannya sederhana karena komunis dilihat sebagai ancaman terbesar Negeri Gajah Putih setidaknya kepada tiga aspek yang menjadi urat nadi kehidupan bernegara Thailand. Ketiga aspek tersebut adalah negara, agaman dan raja yang menjadi simbol terbesar Kerajaan Thailand. Selama Perang Dingin, isu komunisme menjadi sangat dominan dalam kebijakan luar negeri Thailand. Hal ini tidak lain dipicu oleh memanasnya situasi di Indo-Cina yang dikuasi kaum komunis hingga memantik konflik Thailand dan negara sekitarnya terutama Kamboja dan Vietnam (Yathip, 2015). Komitmen Thailand mendukung AS dan sekutunya perang melawan komunisme tampak dalam pembentukan South East Asian Treaty Organization (SEATO) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Busbarat, 2014).



Pasca Perang Dingin, kebijakan luar negeri Thailand kembali berubah seiring dengan perubahan geopolitik pasca runtuhnya kekuatan komunis. Prinsip pragmatisme terus dipegang dan tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Hal ini tampaknya menjadi bukti bahwa perubahan sistem internasional terutama dari Perang Dingin ke Pasca Perang Dingin dan seterusnya sangat mempengaruhi konstelasi politik kawasan termasuk merubah kebijakan luar negeri dan percaturan politik nasional negara-negara yang lebih kecil kapasitasnya (Maksum & Bustami, 2013). Tujuan ASEAN yang semula untuk mempersatukan negara-negara Asia Tenggara meredam komunisme sudah berubah. Thailand yang menjadi salah satu inisiator pembentukan ASEAN juga mulai berubah ditunjukkan dengan sikap “kompetisinya” berbagai ambisi untuk memimpin ASEAN di tengah mulai lunturnya kepemimpinan Indonesia. Sikap tersebut tentu bukan tidak baik, tetapi sudah merubah budaya ASEAN yang mengutamakan “musyawarah-mufakat.” Namun, ternyata perubahan tersebut tidak lain akibat tekanan dan pengaruh dinamika politik dalam negeri yang menuntut Thailand bertindak demikian (Busbarat, 2014).

Salah satu aspek yang menjadi fokus pemerintah Thailand pasca Perang Dingin adalah persoalan ekonomi. Hal ini menjadi penting karena geopolitik internasional yang semakin kapitalis dan AS semakin mendominasi politik internasional. Ekonomi, demokrasi dan pasar bebas menjadi isu-isu yang menekan terutama negara Asia Tenggara termasuk Thailand. Akhirnya, kebijakan-kebijakan Thailand juga semakin dinamis seiring dengan banyak aktor-aktor

yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan tidak selalu didominasi elite dan negara. Pasca Perang Dingin, perumusan kebijakan luar negeri Thailand juga semakin dinamis dengan semakin aktifnya keterlibatan aktor-aktor non negara di tengah desakan demokratisasi di kawasan. Namun demikian, meskipun kebijakan-kebijakan luar negeri Thailand sangat pragmatis, namun tidak menjadikan negara tersebut maju lebih jauh apalagi dalam konteks demokrasi dan penegakan hak asasi manusia termasuk pemerintahan yang bersih. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Thailand terus menerus diguncang dengan berbagai masalah dalam negeri hingga sekarang. Setidaknya sikap pragmatis tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian ekonomi dan politik nasional. Thailand menghadapi tiga masalah penting yang menjadi sorotan internasional pasca Perang Dingin yaitu kudeta militer, skandal korupsi, dan pemerintahan junta militer. Ketiga masalah tersebut menghasilkan ribuan orang tewas dalam dua agenda besar yaitu “*War on Drug*” di seluruh negara dan “*War on Terror*” di Thailand Selatan. Kedua agenda tersebut yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra disponsori oleh AS, meskipun Thailand tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik (Regilme Jr, 2018).

## **Demokrasi di Thailand Pasca Perang Dingin**

Pasca Perang Dingin, sebagaimana tradisi demokrasi di Thailand, krisis demi krisis akibat pertarungan antar elit politik semakin menjadi-jadi. Menjelang berakhirnya Perang Dingin, politik Thailand memanas dengan berbagai manuver

politik para elit. Saat itu Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri Chatichai Choonhavan seorang Jenderal Angkatan Darat. Tampaknya persaingan di lingkaran militer sendiri juga menjadi pemicu terjadinya kudeta militer. Di tahun ketiga menjabat Perdana Menteri Thailand, Chatichai dituduh melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Isu tersebut berhembus kencang yang memicu kudeta militer oleh rekan-rekannya di kesatuan angkatan bersenjata Thailand. Tuduhan tersebut bukan tanpa dasar. Pada era Perdana Menteri Chatichai, pemerintahannya dikenal penuh dengan praktik korupsi. Istilah “bagi-bagi kue” atau “aji mumpung” nampaknya juga muncul di pemerintahan Perdana Menteri Chatichai. Media Thailand menyebutnya sebagai “*buffet cabinet*” atau “kabinet prasmanan” dalam bahasa Indonesia. Sebuah praktik korupsi yang sudah menjadi budaya di Thailand termasuk mengkorupsi dana-dana untuk kepentingan publik (Phongpaichit, et al., 1997; Maisrikrod, 2008).

Pemerintahan Perdana Menteri Chatichai akhirnya jatuh pasca kudeta yang dilakukan rekannya di angkatan bersenjata Thailand pada 23 Februari 1991 yaitu Jenderal Sunthorn Kongsompong (AD), Jenderal Suchinda Kraprayoon (AD), Jenderal Issarapong Noonpakdi (AD), dan Marsekal Kaset Rojananil (AU). Kudeta akhirnya berhasil melengserkan Perdana Menteri Chatichai dan memaksanya melarikan diri ke Inggris. Di kalangan militer Thailand, selain tuduhan-tuduhan korupsi di lingkaran Perdana Menteri Chatichai, nampaknya pelengseran tersebut juga erat kaitannya dengan munculnya isu-isu “sumber ekonomi/politik” teman-temannya di militer. Misalnya dugaan akan “menghilangkan

peran” militer dan “tidak mengangggap” sebagai kekuatan yang perlu diperhitungkan dalam percaturan politik Thailand. Semuanya dialamatkan dalam satu tuduhan yaitu “pelanggaran konstitusi negara” (Bhuchongkul, 1992). Kudeta yang ke-18 ini sejak 1932, tidak lain merupakan “persaingan” internal di angkatan bersenjata Thailand. Persaingan internal yang dimaksud tidak lain adalah antar angkatan dan sudah membudaya sebagaimana kudeta-kudeta sebelumnya. Hal ini juga diperkuat bahwa selama terjadinya kudeta, berakhir tanpa pertumpahan darah. Dalam kudeta 1991, yang terjadi sebenarnya Angkatan 5 (*Class 5*) terlalu mendominasi pemerintahan dan menjadikan kecemburuan Angkatan (*Class 8, 9, 11*) dalam Akademi Militer Thailand atau *Chulachomklat Royal Military Academy* (Yoshifumi, 1995).

Kudeta 1991 memunculkan lembaga *ad-hoc* yaitu *National Peace Keeping Council (NPKC)* yang digagas tidak lain oleh teman-teman se-angkatan *Class 5* Perdana Menteri Chatichai untuk mengendalikn negara sementara.<sup>8</sup> Namun, skenario berubah total karena Istana Raja justru dalam keadaan darurat menunjuk seorang yang bukan dari kalangan militer yaitu Anand Panyarachun, pebisnis dan diplomat karier. Sebagai seorang profesional, Panyarachun langsung melakukan gebrakan pembangunan dan ekonomi. Namun, Panyarachun juga menunjukkan ketidaksukaannya kepada langkah-langkah militer termasuk menolak kudeta militer, pemerintahan junta,

---

<sup>8</sup> Teman-teman seangkatan Chatichai tersebut yang menjadi anggota NPKC adalah Jenderal Sunthorn Kongsompong (AD), Jenderal Suchinda Kraprayoon (AD), Jenderal Issarapong Noonpakdi (AD), dan Marsekal Kaset Rojananil (AU).

dan menolak menaikkan anggaran militer (Murray, 1996). Pemerintahan Panyarachun harus terhenti tahun awal 1992 karena ada pemilihan umum parlemen yang merupakan janjinya. Hasil pemilihan umum seperti berikut:-

**Tabel Hasil Pemilihan Umum Maret 1992**

<b>Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
New Aspiration Party	9,980,150	22.4%	72
Justice Unity Party	8,578,529	19.3%	79
Thai Nation Party	7,305,674	16.4%	74
Palang Dharma Party	5,104,849	11.5%	41
Democrat Party	4,705,376	10.6%	44
Social Action Party	3,586,714	8.1%	31
Thai Citizen Party	2,280,887	5.1%	7
Solidarity Party	1,315,075	3%	6
Mass Party	443,568	1%	1
People Party	376,580	0.8%	4
United New Force	337,361	0.8%	0
Thai People Party	158,037	0.4%	1
Local Progress Party	158,808	0.4%	0
Free Agriculture Party	152,692	0.3%	0
United Democracy Party	34,651	0.1%	0
Tidak sah	547,726	-	-
<b>Total</b>	<b>19,216,466</b>	<b>100%</b>	<b>360</b>

*Sumber: Nohlen, et al. (2001).*

Partai-partai koalisi utama yaitu Rassadorn Party, Justice Unity Party, Social Action Party, Thai Citizen Party, dan

Thai Nation Party setuju mengajukan Suchinda Kraprayoon sebagai perdana menteri yang baru. Naiknya Suchinda ke tampuk pemerintahan Thailand menuai protes. Karena, besar kemungkinan rakyat Thailand sadar di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anand yang sipil keadaan ekonomi negara membaik. Banyak penolakan-penolakan yang menginginkan militer menjauh dan tidak terlibat dalam pemerintahan karena justru menimbulkan masalah. Gelombang protes tersebut akhirnya menjadi petaka akibat tindakan represif militer atas demonstran yang berakhir dengan tragedi *Black May* tahun 1992. Tragedi terjadi hanya dua bulan pasca kemenangan Suchinda dalam Pemilihan Umum. Puncak demonstrasi terjadi pada 19 dan 20 Mei 1992 dengan jumlah demonstran mencapai lebih 100,000 orang. Pendemo semakin bertindak beringas dengan menggunakan batu dan bom Molotov karena aparat militer juga menggunakan cara yang sama. Protes yang dipimpin oleh tokoh Partai Palang Dharma, Chamlong Srimueng, benar-benar menjadi tragedi dan catatan kelam politik Thailand. Sebuah investigasi menyatakan bahwa 21 orang meninggal pada 18 Mei 1992, 15 orang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dan 6 orang meninggal di rumah sakit. Pada hari berikutnya 19 Mei 1992, 10 orang meninggal, 8 orang meninggal dalam perjalanan dan 2 meninggal di rumah sakit. Sisanya ada sekitar 8 orang meninggal antara 20-23 Mei 1992. Dari 67% kasus kematian tersebut terjadi ketika korban masih dalam perjalanan ke rumah sakit (Human Rights Watch, 1992). Hasilnya, atas campurtangan Istana, Perdana Menteri Suchinda mengundurkan diri dan untuk kedua kalinya dalam setahun diadakan Pemilihan Umum pada September

1992 (Pemilihan Umum sebelumnya diadakan Maret 1992). Artinya Suchinda menjadi Perdana Menteri hanya satu bulan lebih yaitu 7 April 1992 - 24 Mei 1992 tidak sampai dua bulan. Pasca lengsernya Suchinda maka diadakan Pemilihan Umum yang hasilnya seperti berikut:-

**Tabel Hasil Pemilihan Umum September 1992**

Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
Democrat Party	9,703,672	21%	79
Palang Dharma Party	9,293,457	18%	47
National Development Party	7,332,388	15.9%	60
Thai Nation Party	7,274,474	15.8%	77
New Aspiration Party	6,576,092	14.2%	51
Social Action Party	1,863,360	4%	22
Liberal Party	1,645,776	3.6%	8
Thai Citizen Party	1,413,032	3.1%	3
Solidarity Party	1,067,237	2.3%	8
Mass Party	681,718	1.5%	4
People Party	242,221	0.5%	1
People's Force	73,460	0.2%	0
Tidak sah	503,534	-	-
Total	19,622,332	100%	360

*Sumber: Nohlen, et al. (2001).*

Pemilu September 1992 ini menghasilkan Perdana Menteri baru yaitu Chuan Leekpai, seorang pengacara, aktivis Partai Demokrat keturunan Tionghoa, dan bukan

dari kalangan militer. Tokoh kalangan sipil inilah yang nampaknya menjadi keinginan rakyat Thailand. Terbukti Chuan Leekpai mampu bertahan hingga tahun 2001 Chuan Leekpai harus melalui berbagai drama politik yang sangat menguras tenaga. Bagaimana tidak, periode 1992-2001 tidak lepas dari pertarungan sengit antar elite di Thailand di mana ada dua perdana menteri hasil dari dua kali Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum 1995<sup>9</sup> (Perdana Menteri Banharn Silpa-archa)<sup>10</sup> dan Pemilihan Umum 1996 (Perdana Menteri Chavalit Youngchaiyudh)<sup>11</sup> sebelum akhirnya dikendalikan lagi oleh Chuan Leekpai sampai tahun 2001.

---

<sup>9</sup> Pemilihan Umum 1995 diadakan karena Chuan Leekpai kehilangan kursi di parlemen akibat mosi tidak percaya kepada pemerintahannya akibat adanya skandal korupsi dalam proyek reformasi pertanahan. Ini juga menunjukkan bahwa politik Thailand tidak bisa lepas dari skandal korupsi, kudeta militer, inkapabilitas, dan terkadang pemerintahan yang brutal (The New York Times, 20 May 1995).

<sup>10</sup> Menjadi catatan menarik bahwa terpilihnya Perdana Menteri Banharn Silpa-archa dicerai dengan praktik "*money politics*" yang massif dan bahkan bisa dikatakan paling buruk dalam sejarah Thailand (Callahan , et al., 1996). Pemerintahan Perdana Menteri Banharn Silpa-archa tidak bertahan lama. Pemilihan Umum 1996 diadakan karena desakan mundur kepada Perdana Menteri Banharn Silpa-archa akibat skandal korupsi yang mengakibatkan hilangnya dukungan kepada pemerintahannya. Dugaan kuat lemahnya pemerintahan Perdana Menteri Banharn mengakibatkan Thailand jatuh ke lubang krisis ekonomi Asia 1997 (Sawasdee, 2012).

<sup>11</sup> Pasca Pemilihan Umum 1996 diadakan pada 17 November 1996, Chavalit Youngchaiyudh terpilih menjadi Perdana Menteri ke-22 dan dilantik pada 22 November 1996. Namun, lagi-lagi Chavalit Youngchaiyudh harus mengakui ketidakmampuannya mengatasi problem ekonomi negara di tengah terjangan Krisis Ekonomi Asia 1997. Akhirnya, Chavalit Youngchaiyudh kehilangan dukungan di



Tabel Hasil Pemilihan Umum Juli 1995

Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
Thai Nation Party	12,630,074	22.8%	92
Democrat Party	12,325,423	22.3%	86
New Aspiration Party	6,806,621	12.3%	57
National Development Party	6,612,504	12%	53
Palang Dharma Party	4,209,135	7.6%	23
Leading Thai Party	3,474,142	6.3%	18
Thai Citizen Party	2,476,218	4.5%	18
Social Action Party	2,201,218	4%	22
Liberal Party	1,716,786	3.1%	11
Solidarity Party	1,361,719	2.5%	8
Mass Party	1,309,381	2.4%	3
Safeguard Thai Party	195,835	0.4%	0
Suara tidak sah	678,716	-	-
Total	23,462,746	100	391

*Sumber: Nohlen, et al. (2001)*

---

parlemen dan harus menyerahkan jabatannya kepada Chuan Leekpai pada 6 November 1997. Mundurnya Chavalit juga tidak lepas dari hilangnya kepercayaan Istana kepada Chavalit (McCargo, 2005).

Tabel Hasil Pemilihan Umum November 1996

Partai	Jumlah Suara	Persentasi	Jumlah Kursi
Democrat Party	18,087,006	31.8%	123
New Aspiration Party	16,585,528	29.1%	125
National Development Party	7,044,304	12.4%	52
Thai Nation Party	5,621,890	9.9%	39
Social Action Party	3,036,544	5.3%	20
Thai Citizen Party	2,330,135	4.1%	18
Palang Dharma Party	1,550,170	2.7%	1
Solidarity Party	1,011,299	1.8%	8
Liberal Party	708,430	1.2%	4
Mass Party	680,204	1.2%	2
Thai Party	164,464	0.3%	1
Liberal Democracy Party	56,804	0.1%	0
Labour Party	40,798	0.1%	0
Suara Tidak Sah	632,502	-	-
Total	24,070,750	100	393

*Sumber: Nohlen, et al. (2001)*

Dua pemerintahan yang singkat hasil dari dua pemilihan umum di atas jelas menggambarkan bahwa internal Thailand menghadapi masalah kompleksitas politik dan rumit. Namun, pasca mandat dikembalikan lagi ke sipil yaitu Perdana Menteri Chuan Leekpai keadaan mulai stabil. Artinya, demokrasi di Thailand mau tidak mau harus menjauhkan diri dari keterlibatan militer dan terus memperbaiki semua

bidang. Harus diakui bahwa di bawah kepemimpinan Chuan Leekpai, Thailand mampu lolos dari lubang krisis ekonomi 1998 melalui beberapa program reformasi bidang ekonomi. Tetapi, bukan tanpa cacat, pemerintahan Chuan Leekpai diwarnai dengan isu pelanggaran hak asasi manusia ketika insiden penangkapan 223 demonstran yang melakukan protes di Pak Mun Dam. Selain itu, citra sebagai diktator dan pelanggar hak asasi manusia juga semakin menguat pasca menunjukkan Thanom Kittikachorn seorang Marsyal Angkatan Udara dan mantan Perdana Menteri Thailand ke 10 sebagai anggota barisan kehormatan kawal Istana atau *Honorary Royal Guard*. Penunjukan ini langsung menjadi kontroversi dan memicu protes berbagai pihak mengingat kekejamannya di masa lalu. Bagaimanapun, meskipun dikenal “bersih”, menjelang akhir masa jabatannya Chuan Leekpai didera berbagai rumor dugaan keterlibatan dalam berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang (*The New York Times*, 20 May 1995).

Pasca Chuan Leekpai, Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri terpilih Thaksin Shinawatra hasil Pemilihan Umum 2001 tepatnya 6 Januari 2001. Detail hasil Pemilihan Umum 2001 seperti berikut:-

**Tabel Hasil Pemilihan Umum Januari 2001**

Party	House Seats	Propostional	Total
Thai Rak Thai	200	48	248
Democrat Party	97	31	128
Thai National Party	35	6	41
New Aspiration Party	28	8	36
National Development Party	22	7	29
Seritham Party	14	0	14
Rassadorn Party	2	0	2
Social Action Party	1	0	1
Thai Motherland Party	1	0	1
Total	400	100	500

*Sumber: Observation Mission Report (2001)*

Thaksin Shinawatra yang merupakan seorang konglomerat besar bidang telekomunikasi berhasil menjadi pemimpin Thailand setelah partainya Thai Rak Thai menang meyakinkan untuk pertama kalinya menggunakan Konstitusi 1997. Thai Rak Thai hanya perlu 3 kursi tambahan saja untuk membentuk pemerintahan pasca Pemilihan Umum 2001 yang dianggap paling bersih dalam sejarah Thailand (Albritton, et al., 2004). Namun, Thaksin memilih untuk menambah jumlah kursi dan membentuk koalisi besar demi menjaga legitimasi dan stabilitas politik. Maka beberapa partai bergabung ke koalisi pemerintah dan mendapat tambahan jumlah kursi yang signifikan yaitu Chart Thai Party (41 kursi), New Aspiration Party (36 kursi), dan Seritham Party (14 kursi) (Croissant, et al., 2001). Hasilnya, pemerintahan Thaksin cukup berhasil

dan mendapat apresiasi terutama masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintahan Thaksin bisa dikatakan cukup sukses dibandingkan pendahulunya yang selalu tersandung masalah baik politik, isu korupsi, maupun isu kepemimpinan. Bahkan sebagaimana penjelasan di atas usia pemerintahan Perdana Menteri Suchinda Kraprayoon hanya dua bulan saja. Artinya Thaksin mempunyai kemampuan kepemimpinan yang bagus tentunya didukung dengan program-program populis terutama bagi rakyat kecil. Misalnya soal pemberantasan kemiskinan, jaminan kesehatan untuk golongan miskin pedesaan, pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, dan lain-lain. Termasuk mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melegalkan judi, namun hasilnya untuk kepentingan sosial yaitu pemberian beasiswa melalui program “*One District, One Scholarship*.”<sup>12</sup> Hasilnya ekonomi Thailand tumbuh pesat dan bahkan mampu melunasi pinjaman ke *International Monetary Fund* (IMF) pada yaitu 31 Juli 2003 atau dua tahun lebih awal dari jadwal jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa capaian mikroekonomi dan perimbangan keuangan Thailand semakin mantap (*International Monetary Fund*, 31 July 2003; Hewison, 2010).

---

<sup>12</sup> Program ini mirip dengan SDSB era Orde Baru. SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) adalah pembelian kupon untuk diundi sejenis loterey. Fenomena SDSB era Orde Baru silahkan baca (Eklöf, 2003). Program “*One District One Scholarship*” tampaknya menjadi inspirasi bagi pemerintahan DKI Jakarta melalui program “*OK Oce / One Kecamatan One Center of Entrepreneurship*.”

Apresiasi terhadap pemerintahan Thaksin sungguh luar biasa atas capaian-capaiannya terutama bidang ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat kecil pedesaan. Maka, Thaksin sangat percaya diri sebagai *incumbent* untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Umum 2005. Dengan mengusung slogan “*Four Years of Repair - Four years of Reconstruction and Building Opportunities*,” Thaksin kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand setelah partainya Thai Rak Thai menang mutlak dalam pemilihan umum parlemen. Partai Thai Rak Thai berhasil merebut 376 kursi dari total 500 kursi yang diperebutkan. Artinya Partai Thai Rak Thai menguasai 75% kursi parlemen sedangkan sisanya Democrat Party (DP) (96 kursi), Chartthai Party/Thai National Party (26), dan Great People’s Party (2 kursi). Kebijakan Thaksin yang pro-rakyat memang menjadi andalan dan terbukti di beberapa kawasan yang sebelumnya terpinggir Partai Thai Rak Thai mendulang suara sangat besar terutama di Timur Laut Thailand sebagai daerah paling miskin (Schafferer, 2008).

Periode kedua Thaksin tampaknya semakin berat di tengah serangan lawan-lawan politiknya. Isu skandal korupsi menjadi batu sandungan di periode kedua Thaksin. Meskipun pemerintahan Thaksin termasuk bersih, namun tetap tidak mampu konsisten di tengah mengakarnya budaya korupsi di Thailand. Harus diakui bahwa kepemimpinan Thaksin bisa dikatakan sebagai “*breakthrough*” dalam pentas politik Thailand karena terobosan-terobosannya termasuk hubungan rakyat-Istana, kelas menengah-bawah, negara-bisnis, antar partai politik, dan paling penting sipil-militer (Schafferer, 2008). Pada akhirnya Thaksin tidak bisa berbuat banyak dan

semakin terdesak ketika muncul berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi. Thaksin tidak mampu dan mau memberikan jawaban di depan publik Thailand terkait berbagai tuduhan tersebut termasuk yang melibatkan investasi perusahaan asal Singapura, Temasek. Kasus Temasek seolah menjadi pembelar di antara dugaan kasus lain terutama oleh kalangan kelas menengah untuk mendesak mundur hingga akhirnya benar-benar lengser dari jabatan Perdana Menteri Thailand (Nelson, 2006; Wu, 2008).

Lawan-lawan politik Thaksin terutama *People's Alliance for Democracy (PAD)* yang didominasi kelas menengah di pimpinan Sonthi Limthongkul (seorang aktivis, wartawan dan sahabat Thaksin) “berbalik arah” menjadi anti-Thaksin untuk menggagalkan dukungan publik agar Thaksin turun dari jabatannya. Gelombang protes direspon Thaksin dengan “langkah kuda” membubarkan parlemen dan memajukan jadwal Pemilihan Umum pada 2 April 2006. Namun diboikot oleh partai oposisi yang berdampak pada gagalnya para kandidat Partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin sehingga berakhir dengan krisis politik. Thaksin kemudian menyerahkan mandatnya kepada Deputy Perdana Menteri Chaidchai Vanasatidya untuk mengendalikan pemerintahan sementara. Raja memerintahkan mahkamah untuk menyelesaikan masalah. Mahkamah akhirnya juga menolak hasil Pemilihan Umum tersebut. Pasca Mahkamah menolak hasil pemilu, Thaksin justru mengambil alih kendali pemerintahan karena takut terjadi kekosongan kepemimpinan sebelum

diadakan Pemilihan Umum ulang pada Oktober 2006 (Hearn, 2008). Jeda waktu ini tampaknya menjadikan kondisi politik Thailand memanas hingga akhirnya sebelum digelar pemilihan pada Oktober 2006, pada bulan September 2006 militer Thailand melakukan kudeta dan merebut kekuasaan (Unger, 2009).

Kudeta terjadi ketika Thaksin sedang melakukan lawatan kenegaraan ke New York untuk berpidato di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelum berangkat ke New York, berbagai serangan politik dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Menjelang kudeta militer setidaknya terjadi 20 insiden pemgeboman dan penyerangan kelompok Muslim atas kelompok Budha di Thailand Selatan. Tentunya ini menjadi “tamparan keras” kepada pemerintahan Thaksin sekaligus “pembenar” untuk mendorong Thaksin lengser dari kursi Perdana Menteri. Namun, Thaksin tidak bergeming sebelum akhirnya langkahnya terhenti oleh kudeta tidak berdarah tahun 2006. Adalah Jenderal Sonthi Boonyaratglin dari Angkatan Darat Thailand yang juga seorang Muslim menjadi pemimpin kudeta tersebut. Jenderal Sonthi juga menjadi Muslim pertama yang menduduki elite paling atas dalam sejarah Thailand yaitu elite di Angkatan Darat Thailand dan pasca kudeta menjadi Deputi Perdana Menteri. Pasca kudeta, pemerintahan militer di bawah kendali badan *Council for Democratic Reform (CDR)* lalu berubah menjadi *The Council for National Security (CNS)* membekukan semua kegiatan politik Partai Thai Rak Thai dan kelompok Thaksin selama lima tahun (Hearn, 2008; Unger, 2009).



Hari-hari pasca kudeta memaksa Thaksin tidak kembali ke Thailand dan memilih menjadi pelarian di Inggris. Namun tidak mematahkan semangat para pengikutnya sehingga meskipun dilarang berpolitik, Partai Thai Rak Thai memilih bergabung dengan *People's Power Party (PPP)*. Di tengah perjalanan, CNS membubarkan Konstitusi 1997 dan menggantinya dengan Konstitusi 2007. Berbagai gejolak dan aksi kekerasan terjadi di mana-mana sebelum pembentukan Konstitusi 2007 melalui proses referendum. Penggantian Konstitusi 1997 merupakan tujuan akhir kudeta militer. Karena, bagi militer Konstitusi 1997 sudah tidak relevan lagi (McCargo, 2006). Pasca referendum untuk mengganti Konstitusi 1997, pemerintahan junta juga menjanjikan pemilihan umum yang demokratis tahun 2007. Menariknya, Partai Thai Rak Thai yang telah melebur dengan *People's Power Party (PPP)* justru memenangkan Pemilihan Umum 2007 karena basisnya masih kuat di bawah pimpinan politisi kawakan dan berpengalaman Samak Sundaravej. Partai PPP mendapatkan 233 kursi parlemen dan mengantarkan Samak Sundaravej menjadi Perdana Menteri Thailand ke-25 di bawah Konstitusi 2007 yang baru (Schafferer, 2008).

Pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundaravej juga tidak bertahan lama. Lima bulan pasca memerintah, berbagai serangan politik terus bertubi-tubi menghantam Samak Sundaravej. Termasuk mundurnya beberapa tokoh elite di PPP. Gelombang protes terus-menerus terjadi menuntut Samak mundur terutama dari partai oposisi yang dimotori oleh *People's Alliance for Democracy (PAD)*. Di tengah ketegangan politik muncul dua kelompok yang saling

berhadapan-hadapan yaitu pendukung Thaksin/PPP *United Front for Democracy against Dictatorship of Thailand* (UDDT) dikenal dengan “*Red Shirts*” dan kelompok anti-Thaksin yang dikenal dengan “*Yellow Shirts*” mayoritas dari Partai PAD. Masing-masing kelompok saling melakukan demonstrasi. Namun pendukung PAD lebih agresif dengan menduduki beberapa obyek vital misalnya gedung parlemen dan yang paling fenomenal menduduki *Don Mueang International Airport, Suvarnabhumi Airport, Phuket International Airport* termasuk bandara di Krabi dan Hat Yai. Keadaan ini memaksa pemerintah memberlakukan negara dalam keadaan darurat (Reuters, 14 September 2008)

Setelah melalui perdebatan dan dinamika politik yang tajam di internal PPP, maka partai setuju dengan keputusan mundur Perdana Menteri Samak Sundaravej dan menggantikannya dengan elite PPP lain yaitu Somchai Wongsawat sebagai perdana menteri Thailand ke-26 pasca keadaan darurat dicabut. Namun usia pemerintahannya juga tidak lama hanya sampai Desember 2008. Pasca dilantik sebagai perdana menteri, pemerintahan transisi Somchai langsung disambut dengan gelombang protes kelompok PAD. Bahkan lebih ekstrim, para demonstran menduduki kantor perdana menteri dan termaksa harus memindahkan urusan administrasi ke Bandara Don Mueang. Somchai memerintahkan aparat untuk menindak demonstran. Akibatnya dua orang demonstran tewas terkena ledakan granat aparat dan ribuan orang mengalami luka-luka (The Age, 7 October 2008). Setelah melalui berbagai dinamika antar elite di Bangkok, Somchai mengundurkan diri dan digantikan oleh

Chaovarat Chanweerakul yang merupakan elite PPP sebagai Plt. Perdana Menteri. Situasi politik menjadi kacau karena banyak anggota PPP yang akhirnya terpaksa mencari payung politik ditambah proses peradilan yang buruk hingga PAD akhirnya berhasil mendapatkan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Usia pemerintahan Plt. Perdana Menteri Chaovarat Chanweerakul praktis hanya 15 hari. Maka, digantikan oleh Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri Thailand ke-27. Pemerintahan Abhisit Vejjajiva bertahan lebih lama namun hanya sekitar 2 tahun 7 bulan. Di akhir masa jabatannya Abhisit Vejjajiva dihantam dengan isu sebagai seorang “hiporkit” dalam pemerintahan Thailand. Hal ini terkuak dalam sebuah surat somasi yang dilayangkan oleh peneliti hubungan internasional Lee Jones dari Oxford University terkait dengan undangan St John’s College, University of Cambridge kepada Abhisit Vejjajiva untuk memberikan kuliah umum. (The Nation, 17 March 2009).

Kejengkelan salah satu staff di Oxford University tersebut karena Abhisit Vejjajiva dianggap tidak layak memberikan kuliah di civitas akademika Universitas Cambridge tentang demokrasi. Sedangkan Abhisit Vejjajiva menjadi perdana menteri Thailand melalui proses tidak demokratis, manipulatif dan kotor. Akibatnya, desakan mundur kepada Abhisit Vejjajiva terus menggelora terutama di Kota Bangkok. Puncaknya terjadi pada bulan April 2010 menjadi hari berdarah di Kota Bangkok. Pemerintah bertindak represif kepada demonstran yang menuntut mundur pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Aparat sangat beringas berhadapan dengan demonstran

hingga akhirnya mengakibatkan 23 orang demonstran tewas dan ratusan luka-luka. Abhisit Vejjajiva namanya menuai buah yang sama ketika naik menjadi perdana menteri setelah kelompok “*Yellow Shirts*” menjadi korban. Kali ini giliran 23 orang anggota “*Red Shirts*” yang kehilangan nyawanya dalam bentrokan berdarah tersebut. Harus diakui Thaksin sangat populer di kalangan kaum miskin pedesaan sedang oposisi didominasi oleh kelompok pro-militer dan menengah atas perkotaan (The Economist, 15 April 2010).

Hari-hari terakhir Abhisit Vejjajiva terus-menerus diwarnai dengan aksi protes dari kelompok pro-Thaksin. Pemerintah berkuasa berkolaborasi dengan pihak militer Thailand semakin menjadi-jadi. Insiden April 2010 tampaknya tidak membuat aparat menurunkan tingkat agsivitasnya. Sebaliknya semakin menekan massa pro-Thaksin yang tidak kenal menyerah. Panglima Angkatan Darat Thailand Prayuth Chan-ocha (Perdana Menteri sekarang) menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas tewasnya lebih dari 90 orang demonstran “*Red Shirts*” oleh anak buahnya (BBC, 23 August 2012). Bahkan pihak militer juga mengerahkan “Penembak Jitu” untuk mengatasi gelombang protes hingga mengakibatkan beberapa orang terutama pro-Thaksin tewas tertembus pluru sniper. Bangkok benar-benar menjadi negara pada hari-hari tersebut (Human Rights Watch, 2011).

Memasuki bulan Mei 2010, situasi semakin mencekam. Tawaran mengadakan pemilihan umum ditolak demonstran karena yang ditunggu adalah pembubaran parlemen diikuti mundurnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Namun, baru

dijanjiikan September 2010 dan itu terlalu lama. Aksi teror pun muncul dengan tewasnya dua orang anggota kepolisian Thailand dan beberapa orang sipil akibat ledakan granat oleh orang tidak dikenal (BBC, 8 May 2010). Pendukung Thaksin masih bertahan, tidak kenal menyerah, dan terus-menerus melakukan demonstrasi hingga akhirnya memuncak pada kerusuhan di pertengahan Mei 2010. Ketegangan semakin meningkat dipicu oleh tewasnya salah satu tokoh demonstran yang juga elite militer Thailand pro-Thaksin Mayor Jenderal Khattiya Sawasdipol atau “*Seh Daeng*” tertembus peluru sniper ketika diwawancarai *New York Times*. Pasca insiden tersebut, puluhan orang tewas tertembus peluru aparat Thailand yang dengan undang-undang baru mengizinkan menggunakan peluru tajam. Tidak hanya itu, banyak warga sipil termasuk wartawan menjadi korban kebrutalan aparat Thailand pada Mei berdarah tersebut. Eskalasi konflik tidak hanya berpusat di Bangkok, namun hampir di seluruh negara Thailand (Human Rights Watch, 2011).

Kerusuhan disertai bentrokan antara demonstran pro-Thaksin dengan aparat keamanan Thailand terus terjadi sampai akhirnya Perdana Menteri mengumumkan akan mengadakan pemilihan umum pada Mei 2011 yang akhirnya baru terealisasi pada Juli 2011. Hasilnya Pheu Thai Party<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pheu Thai Party adalah partai baru yang merupakan penjelmaan dari *People's Power Party (PPP)* yang dibubarkan di bawah Konstitusi 2007. Pheu Thai Party sebagaimana PPP juga merupakan partai pendukung Thaksin Shinawatra. Kali ini dipimpin Pheu Thai Party dipimpin oleh Yingluck Shinawatra yang tidak lain adalah adik kandung Thaksin Shinawatra. Pembentukan Partai Pheu Thai pada dasarnya merupakanantisipasi jika PPP dibubarkan pemerintah berkuasa dan memang

menang mutlak dengan memperoleh 265 kursi dari 500 atau 48% lebih dari jatah kursi parlemen. Kemenangan Pheu Thai Party mengantarkan adik kandung Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand ke-28 setelah melalui perjuangan berdarah-darah dari pendukungnya. Perdana Menteri Yingluck resmi memulai kerjanya tanggal 5 Agustus 2011.

Meskipun telah melalui peralihan kekuasaan yang konstitusional, pemerintahan Perdana Menteri Yingluck tidak berjalan mulus dan normal. Tantangan pertama adalah bencana banjir yang sudah melanda Thailand seminggu sebelum pelantikan Yingluck. Namun, Yingluck menolak untuk menyatakan sebagai keadaan darurat sebagaimana desakan oposisi (The Nation, 21 October 2011). Akhir 2012, pemerintahan Yingluck dilanda protes besar-besaran dari kelompok oposisi yang tidak puas dengan kinerjanya. Perdana Menteri Yingluck kemudian membubarkan parlemen dan akan mempercepat pemilihan umum pada Februari 2014. Pemimpin demonstrasi tersebut adalah Suthep Thaugsuban yang tidak lain adalah Deputy Perdana Menteri era Abhisit Vejjajiva. Sekitar lima orang meninggal dan ratusan luka-luka dalam aksi demonstrasi disertai bentrokan tersebut (NPR, 9 Desember 2013). Gelombang protes terus bergelora termasuk aksi pendudukan obyek-obyek penting. Aksi protes menjurus ke tindakan anarkhis termasuk baku tembak, ancaman bom, hingga beberapa kali ledakan granat yang menewaskan

---

akhirnya dibubarkan pengadilan di bawah instruksi penguasa. Lebih lanjut silahkan baca (Saneyha, 2015).

puluhan orang dan ratusan luka-luka. Keadaan ini memaksa Yingluck menyatakan negara dalam keadaan darurat (Reuters, 20 January 2014).

Kegundahan para demonstran kalangan oposisi akhirnya terjawab dengan diadakannya Pemilihan Umum 2014. Namun, pertarungan masih sengit termasuk aksi boikot dari pihak oposisi yang berakhir dengan keputusan pengadilan menolak hasil Pemilihan Umum 2014 setelah komisi pemilihan umum juga menolak mengumumkan hasilnya. Menariknya, hasil sementara dimenangkan Partai Pheu Thai pimpinan perdana menteri *incumbent* Yingluck (Saneyha, 2015). Pengadilan akhirnya memecat Yingluck dan beberapa orang anggota kabinet dan secara kontroversial menyerahkan mandat kekuasaan kepada petinggi kepolisian yaitu Jenderal Polisi Priewpan Damapong sebagai Kepala Kepolisian Thailand. Jenderal Polisi Priewpan Damapong masih merupakan kerabat dekat Yingluck (Bangkok Post, 7 May 2014). Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan maka Niwatthamrong Boonsongpaisan, mantan Menteri Perdagangan dan Deputi Perdana Menteri era Yingluck dilantik menjadi Plt. Perdana Menteri (The Star, 7 May 2014).

Pemerintahan transisi pimpinan Niwatthamrong Boonsongpaisan tidak berlangsung lama hanya 16 hari pasca dilantik tanggal 7 Mei 2014 sebelum akhirnya tumbang oleh kudeta militer pada 22 Mei 2014. Kekacauan demi kekacauan yang tidak pernah berhenti menjadi alasan militer melakukan kudeta dan mengklaim tindakannya dibenarkan oleh Undang-Undang Darurat Militer atau *Martial Law*, BE 2457 (1914).

Maka, pada tanggal 20 Mei 2014, Angkatan Darat Thailand di bawah pimpinan Jenderal Prayut Chan-o-cha secara sepihak memberlakukan darurat militer dan mengumumkan negara diambil alih oleh pihak militer. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membubarkan lembaga ad-hoc yang dibentuk Plt. Perdana Menteri Niwatthamrong Boonsongpaisan yaitu *Centre for Administration of Peace and Order (CAPO)* dan menggantinya dengan *Peace and Order Maintaining Command (POMC)* yang dipimpinnya sendiri. Selain itu, Jenderal Prayut Chan-o-cha juga mengumumkan sebuah badan yang akan menjalankan pemerintahan yaitu *National Council for Peace and Order (NCPO)* dengan susunan anggota sebagai berikut:-

Nama	Jabatan Militer	Jabatan di Pemerintahan
Jenderal Prayuth Chan-ocha	Komandan Angkatan Darat	Ketua NCPO / setingkat Perdana Menteri
Jenderal Udomdet Sitibutr	Wakil Komandan Angkatan Darat	Sekretaris NCPO
Jenderal Paiboon Khumchaya	Asisten Komandan Angkatan Darat	Kepala Bagian Hukum NCPO
Jenderal Aksara Kerdphol	Kepala Staff Angkatan Darat	Wakil Ketua
Jenderal Teerachai Nakwanich	Komandan Angkatan Darat I	Wakil Ketua
Jenderal Chanchai Putong	Komandan Angkatan Darat II	Wakil Ketua



<b>Nama</b>	<b>Jabatan Militer</b>	<b>Jabatan di Pemerintahan</b>
Jenderal Preecha Chan-ocha (adik kandung Jenderal Prayuth Chan-ocha)	Komandan Angkatan Darat III	Wakil Ketua
Jenderal Walit Rojanapakdi	Komandan Angkatan Darat IV	Wakil Ketua
Jenderal Tanasak Patimaprakorn	Panglima Angkatan Bersenjata	Wakil Ketua
Marsekal Prajin Jantong	Komandan Angkatan Udara	Wakil Ketua
Laksamana Narong Pipattanasai	Komandan Angkatan Laut	Wakil Ketua
Jenderal Polisi Watcharapol Prasarnrajkit	Kepala Kepolisian	Wakil Ketua

*Sumber: New Mandala (2 June 2014)*

Meskipun kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha mendapat penolakan dari dalam negeri dan luar negeri, namun akhirnya Raja Bhumibol Adulyadej mengakui dan memberikan mandat untuk mengendalikan pemerintahan Thailand pada 26 Mei 2014 (BBC, 26 May 2014). Jenderal Prayuth Chan-ocha mengklaim bahwa yang dilakukannya bukan sebuah kudeta militer, namun sebuah upaya penyelamatan negara dari kekacauan politik dan untuk menciptakan stabilitas keamanan negara (CNBC, 19 May 2014). Bagaimanapun, pasca status keadaan darurat, pihak militer langsung melakukan serangkaian penangkapan-penangkapan

terhadap tokoh-tokoh yang anti-kudeta. Misalnya Plt. Perdana Menteri Niwatthamrong Boonsongpaisan, mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, termasuk semua anggota keluarga Shinawatra (BBC, 23 May 2014). Pemerintah junta juga melakukan pengawasan ketat terhadap media dan pemakaian internet termasuk media sosial. Selain itu, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengarahkan pembentukan Konstitusi sementara yaitu *Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014* yang berlaku sampai tahun 2017. Tahun 2017 pemerintah junta mengeluarkan konstitusi baru yaitu Konstitusi 2017. Salah satu poin menarik adalah pengurangan kekuasaan partai politik dan mengakomodasi militer dalam kursi parlemen sebanyak “6 kursi wajib.”<sup>14</sup> Sehingga sampai tahun 2017, konstitusi Thailand sudah diubah sebanyak 20 kali sejak sistem monarki konstitusional berdiri tahun 1932 (Straits Times, 6 April 2017).

Dengan demikian, politik dan demokrasi di Thailand pasca Perang Dingin tidak terlalu berbeda dengan era sebelumnya. Kondisi internal selalu diwarnai dengan kontestasi politik antar elite yang sangat tajam bahkan cenderung brutal diwarnai dengan beberapa kali aksi kudeta militer. Militer selalu memaksakan turun tangan jika kondisi negara dalam keadaan kacau meskipun ada raja. Demokrasi selalu tercederai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat Thailand dengan memakan korban jiwa rakyat sipil. Selain menimbulkan pro dan kontra atas keterlibatan militer

---

<sup>14</sup> Di Era Orde Baru, TNI/Polri mendapat jatah kursi di DPR yaitu Fraksi ABRI.

dalam arena politik Thailand, dunia luar juga mengkritik habis-habisan langkah militer menggulingkan pemerintahan yang sah melalui proses demokratis yaitu pemilihan umum. Meskipun mendapat kritik dan sorotan internasional, faktanya pemerintahan junta militer Thailand masih eksis hingga sekarang. Bagaimana dampaknya kepada masyarakat Muslim khususnya di Thailand Selatan? Pada bagian berikut akan dibahas terkait implikasi politik nasional yang didominasi Buddha terhadap Muslim di Thailand Selatan.

### **Bangkok dan Islam di Thailand Selatan**

Hubungan antara pemerintah Bangkok dan umat Islam khususnya di Thailand Selatan selalu diwarnai dengan berbagai insiden berdarah-darah. Dalam sejarahnya, masyarakat Muslim di Thailand di bawah kekuasaan Kesultaan Patani yang kemudian dikuasai Kerajaan Siam sampai ada perjanjian *Anglo-Siamese Treaty* tahun 1909. Adanya perjanjian itu, mengharuskan Kerajaan Siam menyerahkan daerah Melayu di Selatan (Patani) kepada kolonial Inggris. Tahun 1933 wilayah Patani dipecah menjadi tiga provinsi yaitu Pattani, Narathiwat, dan Yala. Ketika Jepang melakukan invasi ke Asia Tenggara, dimanfaatkan Thailand untuk merebut kembali wilayah Patani dari pendudukan Inggris sebagai balasan atas persekutuannya dengan Jepang. Namun, pasca Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Inggris kembali merebut wilayah Thailand Selatan berdasarkan perjanjian 1909 (Mohd Mizan Aslam, 2008).

Apa yang terjadi di Thailand Selatan tampaknya mirip dengan di Filipina Selatan. Munculnya perlawanan juga

disebabkan perlakuan tidak adil dan pemberlakuan kebijakan memaksa pemerintah Bangkok yang Bhudda kepada mayoritas masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Secara umum, perlakuan tersebut dalam bidang politik, ekonomi dan sosial termasuk yang dilakukan oleh aparat keamanan Thailand. Serangkaian penangkapan dan aksi brutal dilakukan pemerintah Bangkok dengan alasan untuk mengejar aktivis-aktivis anti-pemerintah di Thailand Selatan (US Department of State, 2016). Dalam sebuah laporan investigasi menyebutkan bahwa perlakuan buruk pemerintah Bangkok nyata dirasakan masyarakat Muslim di Selatan. Muslim Thailand terutama di Selatan diperlakukan sangat diskriminatif di tengah negara mayoritas Bhudda. Warganegara Bhudda akan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang bagus, manakala warganegara Muslim tidak akan mendapat fasilitas tersebut (Journeyman Pictures, 10 December 2013). Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan serangkaian insiden kekerasan di Thailand Selatan. Pertama, faktor agama sebagai pemicu terjadinya perlawanan akibat pembatasan dan pelarangan kegiatan keagamaan terutama yang dilakukan oleh ulama di Thailand Selatan. Unikinya, para kelompok bersenjata tersebut tidak hanya menyerang Bhudda, namun juga umat Islam yang “dituduh” bekerjasama dengan militer Thailand. Faktor kedua, kelompok bersenjata di Thailand Selatan juga mempunyai jaringan dengan kelompok separatis di sekitarnya yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Moro National Liberation Front di Filipina. Adanya jaringan ini seolang menjadi pendukung utama atas aksi-aksi kekerasan yang merupakan bagian dari visi-misi bersama melawan

pemerintahan zalim. Ketiga, serangkaian tindak kekerasan juga dipengaruhi fakta bahwa sebagian besar anggota kelompok bersenjata di Thailand Selatan mempunyai pengalaman tempur di medan laga seperti Afghanistan dan Lybia serta wilayah bergejolak lainnya (Mohd Mizan Aslam, 2008).

Muncul beberapa kelompok perlawanan di Thailand Selatan. Pertama, Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang didirikan oleh Ustadz Haji Abdul Karim Hassan tahun 1960 sebagai respon atas kebijakan Bangkok memaksanakan sistem pendidikan pemerintah (sekuler) dan menekan sistem pendidikan Islam (Pondok). Kedua, *Patani United Liberation Organization (PULO)* yang didirikan oleh Tengku Bira Kotanila alias Kabir Abdul Rahman tahun 1968 dengan menggunakan strategi militer dan non-militer. Ketiga, karena perpecahan internal maka muncul New-Patani United Liberation Organization (New-PULO) yang didirikan oleh Arrong Moo-reng dan Hayi Abdul Rohman Bazo tahun 1995. New-PULO komitmen dengan strategi militer dan menolak segala upaya non-militer. Keempat, ketiga kelompok akhirnya bersatu di bawah payung pergerakan “Bersatu” untuk melakukan perlawanan terhadap Bangkok pada tahun 1997 (Chalk, 2008).

Berbagai aksi sebenarnya dilakukan lama sejak muncul bibit-bibit separatisme akibat kebijakan represif Bangkok. Namun, eskalasi perlawanan meluas pasca tahun 2001. Konflik dimulai pasca Perdana Menteri Thaksin Shinawatra membubarkan lembaga *Southern Borders Provinces Administrative Centre (SBPAC)* yang didirikan sejak tahun 1981 sebagai

bagian solusi permasalahan kawasan tersebut. Pembubaran tersebut diikuti serangkaian aksi kekerasan terkoordinir di tiga provinsi yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat menewaskan lima orang aparat dan seorang relawan. Kelompok bersenjata juga melakukan serangan terhadap pos-pos pasukan keamanan Thailand dan merampas senjata dan amunisi misalnya di Narathiwat di daerah Muang Yala (Chalk, 2008). Tahun 2004 menjadi masa kelabu bagi masyarakat di Thailand Selatan khususnya di Provinsi Pattani. Peristiwa tersebut dikenal dengan insiden Krue Se Mosque di sebuah masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Gresik.<sup>15</sup> Pemerintah Thailand beralasan, aksi aparat Thailand di masjid tersebut adalah untuk mengejar para militan yang masuk ke masjid dan menyamar sebagai penduduk sipil. Hal ini dilakukan pasca serangkaian aksi teror terkordinasi yang dilakukan kelompok bersenjata di Pattani, Yala dan Songkhla. Menurut pemerintah Thailand, dalam bentrokan tersebut, 107 warga sipil dan lima aparat keamanan tewas. Namun, temuan *Human Rights Watch* menyatakan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak berdosa sedang kelompok militan jumlahnya sedikit berbeda dengan klaim pemerintah Thailand (*Human Rights Watch*, 28 April 2006).

Sebuah analisa juga menyebutkan antara Januari 2004 sampai akhir Agustus 2007 tercatat sebanyak 7,743 insiden kekerasan terjadi di Thailand Selatan. Total korban diketahui sebanyak 2,566 atau rata-rata 58 kejadian dalam sebulan atau

---

<sup>15</sup> Gresik adalah nama sebuah Kabutaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai tempat penyebaran agama Islam di awal sejarah kedatangan Islam di Nusantara.

setara dengan dua hari sekali terjadi aksi teror. Kebanyakan korban adalah penduduk sipil (70%), disusul aparat kepolisian (711 korban jiwa) dan tentara (689 korban jiwa). Sedangkan dari tipologi serangan misalnya serangan bersenjata dan pembunuhan (3,253 kasus), membakar (1,298 kasus), dan pengeboman (1,189 kasus) (Chalk, 2008). Sementara perkembangan terakhir menyebutkan selama rentan waktu 2004-2015 tercatat ada 15,374 insiden penyerangan yang menyebabkan jumlah korban sangat banyak. Dalam sebuah investigasi yang dilakukan *Deep South Watch (DSW)*, *Prince of Songkla University*, *Pattani Campus* menyatakan total kematian sebanyak 6,543 orang dan luka-luka sebanyak 11,919 orang yang tersebar diberbagai tempat merata di Thailand Selatan (Bangkok Post, 4 Januari 2016).

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Bangkok untuk meredam gejolak di Selatan. Misalnya mendirikan *National Reconciliation Commission* tahun 2006 untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Muslim seperti pemberlakuan hukum Islam, pemakaian Bahasa Jawi, pembentukan pasukan relawan tidak bersenjata, dan pembentukan *Peaceful Strategic Administrative Centre for Southern Border Provinces*. Namun, rencana tersebut gagal karena pihak Istana melalui salah satu staffnya menolak proposal tersebut karena Bahasa Thai adalah bahasa nasional negara (The Nation, 25 June 2006). Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa badan *Peaceful Strategic Administrative Centre for Southern Border Provinces* tidak berjalan dengan baik akibat keterbatasan hak dan wewenang yang diberikan. Implikasinya pergolakan di Thailand Selatan sangat sulit diselesaikan (Kaewsom,

2015). Masalah utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang melanda di Thailand Selatan (Jitpiromsri & Panyasak, 2006; Storey, 2007).

## **Kesimpulan**

Dengan demikian, bab ini menggambarkan bahwa demokrasi dan politik di Thailand sangat kompleks. Ada beberapa elemen yang menjadikan demokrasi di Thailand tidak berjalan sesuai lajunya. Pertama, elite dan kelas menengah cenderung pro-status quo di mana kuatnya pengaruh monarki yang sangat menguntungkan kelas menengah. Kelas menengah juga menikmati relasi dengan militer dan setiap saat bisa menggulingkan pemerintahan yang “mengancam” kedudukan kelas menengah. Selain itu, bangunan Partai politik di Thailand juga sangat lemah akibat tidak adanya kematangan ideologi sehingga bisa berubah setiap saat selagi kepentingan berubah. Di samping itu, tingkat kepedulian masyarakat juga sangat rendah terutama melalui lembaga swadaya masyarakat (Chachavalpongpun, 2007). Artinya, kehidupan demokrasi di Thailand sangat feodal di tengah mengakarnya pengaruh Istana dan dominasi kelas menengah-militer. Akibatnya, kelompok-kelompok yang menjadi minoritas termarginalkan secara ekonomi dan politik semakin tersisih dan aspirasinya terabaikan termasuk kelompok Islam di Thailand Selatan.

Begitu juga dengan situasi di Thailand Selatan, ada korelasi antara budaya primordialisme di lingkaran Istana dan pemerintahan yang Bhudda dengan sikap yang diterima minoritas Muslim di Selatan. Meskipun lambat laun berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam gejolak di



Selatan, namun belum terlihat hasilnya. Bahkan dalam sebuah diskusi antara penulis dengan seorang teman asal Thailand yang suaminya adalah perwira menengah Angkatan Darat Thailand melontarkan sebuah fakta mengejutkan. Menurutny, konflik di Thailand Selatan “sengaja dipelihara” untuk tetap ada karena akan berdampak pada “pemasukan ekonomi” aparat keamanan Thailand. Karena, jika seorang personil ditugaskan ke Selatan, maka secara otomatis akan ada “tambahan tunjangan” yang tidak akan bisa diperoleh jika dalam keadaan damai. Oleh karenanya, ini perlu dicarikan jalan keluar terutama pemerintah Bangkok untuk memerangi ketimpangan ekonomi termasuk akutnya budaya korupsi di pemerintahan Thailand.

## BAB 6

### Penutup

BERDASARKAN pembahasan pada bab sebelumnya, menunjukkan dinamika yang menarik terkait iklim demokrasi dan korelasinya dengan nasib umat Islam di empat negara penting di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Di empat negara tersebut demokrasi mengalami pasang dan surut yang ternyata berdampak pada nasib umat Islam secara umum. Di dua negara yaitu Filipina dan Thailand, umat Islam menjadi minoritas yang mengalami diskriminasi ekonomi, sosial dan politik. Di Filipina, dari segi demokrasi negara tersebut bisa dikatakan kampiun demokrasi di Asia Tenggara. Pasca Perang Dingin, semua peralihan kekuasaan berlangsung dengan lancar, demokratis dan tanpa kekerasan. Semua kontestan juga menunjukkan kedewasaannya dalam menjalankan demokrasi. Namun, dalam konteks pemerataan pembangunan, Filipina masih harus berbenah terutama terkait dengan isu Filipina Selatan mayoritas umat Islam. Tingginya tingkat korupsi menjadi salah satu pekerjaan rumah sangat berat pemerintah Filipina. Hal ini juga berimplikasi kepada bentuk hubungan Manila-Mindanao yang selalu berjalan transaksional. Apalagi, diperparah dengan sentimen

keagamaan yang tinggi menjadikan jurang pemisah dan komunikasi semakin lebar. Tetapi, berbagai inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Duterte sedikit banyak telah membuahkan hasil minimal ditunjukkan dengan tingginya dukungan masyarakat. Presiden Duterte yang berasal dari Filipina Selatan menjadi faktor penting dibalik kuatnya dukungan masyarakat termasuk di Mindanao kepadanya. Bagaimanapun, Filipina Selatan tidak henti-hentinya bergejolak setelah dihantam konflik di Marawi. Sekali lagi, umat Islam diuji dengan sentimen agama yang semakin tajam. Bahkan, memanasnya situasi di Marawi memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik ke wilayah Asia Tenggara yang lain.

Sedangkan di Thailand, khususnya di kawasan selatan, situasinya tidak jauh beda. Umat Islam mengalami diskriminasi yang serius baik bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini juga berkorelasi positif dengan pencapaian demokrasi di Bangkok yang sangat dinamis bahkan cenderung brutal. Kebrutalan demokrasi di Thailand tidak lain akibat pertarungan sengit antara kelas menengah dan kelas bawah diperparah dengan campurtangan militer akibat persaingan internal mereka. Adanya 20 kali kudeta menunjukkan demokrasi di Thailand masih perlu berbenah. Akutnya permasalahan korupsi dan feodalisme di lingkaran elite Thailand menjadi tantangan yang sangat berat. Implikasinya perlakuan terhadap umat Islam khususnya di Thailand Selatan juga semakin keras dan menekan di tengah dominasi Bhudda di Thailand.

Di dua negara lain, Indonesia dan Malaysia terjadi dinamika yang menarik. Pasca berakhirnya Perang Dingin di Indonesia misalnya, dinamika demokrasi mengalami pertumbuhan signifikan pasca Reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945. Demokrasi yang awalnya terbatas akibat kekangan selama Orde Baru, berubah secara drastis, radikal dan liberal. Bahkan nilai-nilai yang selama ini dianut misalnya “musyawarah dan mufakat” menjadi luntur dan kalah oleh kekuatan modal. Implikasinya, umat Islam semakin terpinggir bahkan ada upaya-upaya untuk mendegredasi umat Islam yang berujung pada munculnya rasa ketidakadilan. Momentum Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 menjadi pembuka “dialog” antara Islam dan kebangsaan kembali muncul. Persoalan ekonomi, sosial, dan politik semakin akut di tengah maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil terlebih umat Islam. Sedangkan di Malaysia, keadaannya semakin dinamis. Demokrasi yang hendak bangkit tahun 1997/8 gagal, namun akhirnya berhasil 20 tahun kemudian tahun 2018 setelah Pakatan Harapan secara mengejutkan memperoleh kemenangan dalam Pilihan Raya Umum. UMNO dan BN tumbang menjadi oposisi. Di sisi lain umat Islam masih menunggu perkembangan yang menarik terkait munculnya rezim baru di Malaysia pasca naiknya Pakatan Harapan mengendalikan pemerintahan.

Dengan demikian, potret demokrasi di Asia Tenggara cukup beragam dengan dinamika yang berbeda. Namun, di empat negara yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand, demokrasi sudah berusaha dilaksanakan dengan

tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Di Filipina misalnya sebagai salah satu kampiun demokrasi, dinilai berhasil dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Namun, ternyata tidak sejalan dengan keadaan negara yang makmur dan sejahtera sebagaimana tujuan demokrasi. Sebaliknya, terjadi sebuah situasi di mana korupsi dan pemerintahan yang kurang bersih menjadi realitas di tengah masyarakat Filipina. Demikian halnya, adanya demokrasi masih menyisakan tindakan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi terutama terhadap Muslim di Filipina Selatan.

Sedangkan di Thailand, iklim demokrasi menjadi rumit tatkala terjadi hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat di tengah kuatnya feodalisme dan pengaruh Istana. Bahkan sering terjadinya kudeta militer menunjukkan bahwa, demokrasi tidak lebih sebagai seremonial belaka sebagai pembenar sistem monarki-konstitusional yang dianut Thailand. Sebaliknya, Istana akan selalu menyetujui siapa saja yang bisa “mengendalikan” pemerintahan demi kestabilan negara meskipun dengan cara-cara tidak demokratis. Proses pemilihan umum tidak lebih hanya dijadikan ajang kontestasi jangka-pendek demi merebut kekuasaan/kepentingan pribadi/golongan. Sedangkan hak-hak rakyat bawah terus terabaikan. Tidak segan juga militer dengan segala kekuasaannya mengganti konstitusi negara menurut kepentingan kelompoknya. Indikasi praktek demokrasi imajiner juga ditunjukkan dengan terpinggirnya masyarakat Islam di Thailand Selatan akibat tertutupnya ruang dialog yang sehat dan sejajar untuk menemukan solusi. Apa yang terjadi adalah upaya-upaya mendominasi dan pemaksaan kehendak

pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kedaerahan misalnya agama, bahasa dan budaya.

Di Malaysia, demokrasi yang awalnya “mati” kebalikan hidup pasca kemenangan Pakatan Harapan dan kembalinya Dr. Mahathir ke pemerintahan. Publik masih menunggu gebrakan dan janji-janji selama kampanye yang akan meng-  
usung agenda-agenda reformasi. Misalnya kebebasan pers, penghapusan pajak barang kebutuhan pokok, dan lain-lain. Ada harapan demokrasi semakin sehat di Malaysia, namun juga ada berbagai isu terkait belum terujinya koalisi Pakatan Harapan di tengah berbagai perbedaan ideologis di dalam koalisi tersebut. Sedangkan di Indonesia, demokrasi lebih sehat. Namun, justru muncul pekerjaan rumah yang besar yaitu keadilan dan pemerataan pembangunan. Jurang ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar di tengah bobroknnya penegakan hukum. Di sisi lain adanya upaya-upaya mendegradasi umat Islam dengan berbagai stigma dan skenario menunjukkan demokrasi di Indonesia perlu perbaikan total. Kebebasan media, sosial, ekonomi dan politik cenderung di “tanggung” oleh pemilik modal yang sangat merugikan semua pihak terutama umat Islam dan semua anak bangsa dari golongan sosial-ekonomi lemah.

Dengan demikian, memotret demokrasi di Asia Tenggara yang diwakili empat negara yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai berikut. Pertama, bahwa gelombang demokrasi tidak lain adalah dampak berakhirnya Perang Dingin dan masuk era pasca Perang Dingin yang menuntut negara-negara di dunia “menyesuaikan” dengan konstelasi

politik internasional akibat dominasi AS dan runtuhnya komunisme. Demokrasi di Asia Tenggara tidak lain merupakan respon atas desakan AS dan sekutunya dalam mengkampanyekan demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan bersih, pasar bebas, dan lain-lain. Jika situasinya masih sama seperti era Perang Dingin besar kemungkinan hal itu tidak akan terjadi dan rezim-rezim “pro Barat dan anti-demokrasi” akan tetap hidup seperti Suharto, Mahathir, Lee Kwan Yew, Ferdinand Marcos, dan lain-lain.

Kedua, tampak bahwa desakan demokrasi hanya mengguncang dalam waktu sepuluh tahun saja yaitu 1990-an sampai 2001 pasca Peristiwa 11 September di New York. Isu-isu internasional bukan lagi demokrasi namun berganti “Perang Melawan Terorisme.” Artinya Barat (AS dan sekutunya) tidak melihat lagi demokrasi sebagai instrumen utama dalam melakukan kerjasama dengan banyak negara. Tetapi terpenting adalah negara tersebut komitmen dengan kampanye tersebut terlepas demokratis dan patuh hak asasi manusia apa tidak. Ketiga, demokrasi di Asia Tenggara tidak lain justru menghancurkan nilai-nilai lokal yang sangat demokratis yaitu musyawarah dan mufakat. Sebagai gantinya yang berkuasa adalah modal dan uang dibungkus dengan istilah demokrasi yaitu voting. Seharusnya, jika negara-negara Asia Tenggara sadar, maka akan melaksanakan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini dipegang dan sudah sangat demokratis dan menjunjung tinggi etika. Bukan sebaliknya demokrasi diterjemahkan dengan politik transaksional yang akhirnya yang berkuasa tidak lain adalah pemilik modal

dan kapitalis serakah. Namun semuanya menjadi tantangan sendiri termasuk umat Islam sendiri apakah mampu dewasa dalam berpolitik dan mengutamakan kepentingan umat atautkah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan atau golongan.

Demokrasi di Asia Tenggara tampaknya belum bisa dilaksanakan sepenuhnya akibat masih kuatnya pengaruh nilai-nilai yang selama ini menancap kuat sebagai konsekuensi negara terjajah. Misalnya primordialisme, patron-klien, politik dinasti, budaya korupsi, dan mentalitas tidak bermartabat lainnya. Mungkin demokrasi di manapun akan bisa berjalan dengan baik (meskipun tidak demokratis sekalipun) tatkala para pemimpinnya bisa menauladani misalnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang 1) hidup sederhana, 2) mampu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu (bahkan jika pelaku keluarganya akan dihukum lebih berat), 3) memisahkan kepentingan negara dan keluarga, 4) menjauhkan keluarga dari kekuasaan (bukan mempromosikan), dan 5) taat menjalankan perintah Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, demokrasi di Asia Tenggara belum bisa berjalan dengan baik karena di Indonesia misalnya institusi demokrasi telah “dibajak” para elite demi kepentingan kelompoknya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Abinales, P. (2011). The Philippines in 2010 Blood, Ballots, and Beyond. *Asian Survey*, 51(1), 163-172.
- Abuza, Z. (2015). Politicking and the Philippine Peace Process. *Policy Brief No. 176*. Stockholm: The Institute for Security and Development Policy. Dalam <http://isdpeu/content/uploads/publications/2015-abuza-politicking-and-the-philippine-peace-process.pdf> (diakses 12/5/2018)
- Acharya, A. (1998). Democratising Southeast Asia: Economic Crisis and Political Change. *Workin Paper no. 87*. Perth, Western Australia: Asia Research Centre, Murdoch University.
- AFP. (22 November 2007). Philippine rebel troops demand Arroyo step down. Dalam <https://web.archive.org/web/20120306054205/http://afp.google.com/article/ALeqM5jBBgGs10KZjJlAooEaCHUkBaA83w> (diakses 11/5/2018)

- Ahmad Ali Seman, Nordin Hussin, & Uqbah Iqbal. (2016). *Sejarah Perkembangan Nasionalisme Melayu Sebelum Kemerdekaan*. Kuala Lumpur: BookRix.
- Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2010). Politically Engaged Muslims in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–2009). *Asian Journal of Political Science*, 18(2), 154-176.
- Ahmad, T. (2014). Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920. *Sejarah dan Budaya*, 8(2), 225-231.
- Albritton, R., & Bureekul, T. (2004). Developing Democracy under a New Constitution in Thailand. *Working Paper Series: No. 28*. Taipei: Asian Barometer Project Office National Taiwan University and Academia Sinica.
- Al Jazeera. (19 Oktober 2017). Duterte: Marawi 'liberated' from ISIL-linked fighters. Dalam <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/duterte-marawi-liberated-isil-linked-fighters-171017071213300.html> (diakses 12/5/2018)
- Amini Amir Abdullah et.al. (2010). The Concept of 1malaysia from Islamic Perspectives. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 12(2), 1-12.
- Anderson, B. (1988). Cacique democracy in the Philippines. *New Left Review*, 169.
- Argama, R. (2005). Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia. Makalah disampaikan di Universitas Indonesia. Dalam <http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/makalah/Makalah%20Otonomi%20Daerah%20dan%20Pemekaran%20Wilayah.pdf> (diakses 2/10/2017).

- Aristotle, Barker, E., & Stalley, R. (1995). *The politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Arugay, A. (2005). Societal Accountability and Democratization in the Philippines. *Politikon: The International Association of Political Science Students (IAP\$S) Journal*, 9, 71-85.
- Asian Correspondent. (2 November 2017). Philippines remains one of the most dangerous places on earth for journalists. Dalam <https://asiancorrespondent.com/2017/11/philippines-remains-one-dangerous-places-earth-journalists/#kKWUIE7fLOScImKl.97> (diakses 12/5/2018)
- Asian Development Bank. (2007). Overview of NGOs and Civil Society: Philippines . *Policy Brief*. Mandaluyong, Philippines: Asian Development Bank.
- Astro Awani. (16 May 2018). #MalaysiaBaharu: Temubual Eksklusif Astro Awani bersama Anwar Ibrahim. *Online-Resource*. Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=EVdXk7qvR7M&t=815s>
- Astro Awani (27 July 2015). Jika PRU esok, BN akan kalah - Muhyiddin Yassin.
- Avila, A., & Olfato, J. (2010). Manila Hostage Tragedy: A Lesson in Crisis Management. *RSIS Commentaries No. 109/2010*. Singapore: S.Rajaratnam School of International Studies, NTU.
- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Solstice Publishing.

- Bangkok Post. (4 Januari 2016). Insurgency claimed 6,543 lives in last 12 years. Dalam <https://www.bangkokpost.com/news/security/815372/insurgency-claimed-6543-lives-in-last-12-years> (diakses 17/5/2018)
- Bangkok Post. (7 May 2014). Yingluck, 9 ministers removed from office. Dalam <https://www.bangkokpost.com/news/politics/408549/yingluck-9-ministers-removed-from-office> (diakses 15/5/2018)
- Basalim, U. (2002). *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Barreveld, D. (2001). *Philippine President Estrada Impeached!: How The President Of The World's 13th Most Populous Country Stumbles Over His Mistresses, A Chinese Conspiracy And The Garbage of His Capital*. Bloomington, Indiana: iUniverse.
- Baviera, Aileen S.P. (2012). The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy: The case of Philippines-Cina relations since 2004. *RSIS Working Paper No. 241*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies Singapore
- BBC. (23 August 2012). Rights group criticises 'interfering' Thai army chief. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-19355065> (diakses 15/5/2018)
- BBC. (23 May 2014). Thailand's coup leaders detain former PM Yingluck. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-27544972> (diakses 16/5/2018)

- BBC. (26 May 2014). Thai coup: Leader Gen Prayuth receives royal endorsement. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-27572726> (diakses 16/5/2018)
- BBC. (8 May 2010). Thailand policemen targeted in Bangkok attacks. Dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8669394.stm> (diakses 15/5/2018)
- Beja Jr., E. (2009). The Philippines on Debt Row. *MPRA Paper No. 16553, posted 3. August 2009*. München: Universität München. Dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.558.6617&rep=rep1&type=pdf> (diakses 10/5/2018)
- Bernardo, R. (t.thn.). Philippine case study: Ramos Administration (1992-98). *Presentation Slides*. Washington DC: The World Bank. Dalam [http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth\\_Commission\\_Workshops\\_Country\\_Case\\_Studies\\_Bernardo\\_Presentation.pdf](http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Workshops_Country_Case_Studies_Bernardo_Presentation.pdf) (diakses 9/5/2018)
- Bhuchongkul, A. (1992). Thailand 1991: The Return of the Military. *Southeast Asian Affairs*, 313-333.
- Borneo Post. (15 April 2018). 'Mahathir factor' makes GE14 most intense election ever – Palawan rep. Dalam <http://www.theborneopost.com/2018/04/15/mahathir-factor-makes-ge14-most-intense-election-ever-palawan-rep/>
- Boix, C. (2006). Root of Democracy. *Policy Review*, 1-19.
- Busbarat, P. (2014). Thailand's Foreign Policy: The Struggle for Regional Leadership in Southeast Asia. In B. Guan Teh, S. Tong, L. Jie, Y. Chi-jen, & L. Jieli, *Globalization*,

*Development and Security in Asia*. Singapore: World Scientific Pub Co Inc.

- Bustami, R., Nasruddin, E., & Samat, N. (2006). Religious Pluralism: Mapping the Complexity in Malaysia. Dalam G. Collste, & G. Collste (Penyunt.), *Religious and Ethnic Pluralism in Malaysia. Linkoping Studies in Identity and Pluralism No. 4*. Linkoping: Linkoping University Press.
- Bustanuddin Agus. (2009). Islam-Melayu di Era Multikulturalisme. Dalam Mohamad Redzuan Othman, et.al. , *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. Shah Alam: Arah Publications.
- Bustamam-Ahmad,, K. (2003). *Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations: Membongkar Politik Amerika di Pentas Dunia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Callahan , W., & McCargo, D. (1996). Vote-Buying in Thailand's Northeast: The July 1995 General Election. *Asian Survey*, 36(4), 376-392. doi:10.2307/2645405
- Canlas, D. (2007). Political Governance, Economic Policy Reforms, and Aid Effectiveness: The Case of the Philippines with Lessons from the Ramos Administration. *Public Lecture*. Tokyo: National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Dalam <http://www.grips.ac.jp/forum/pdf07/07june07/canlas1.pdf> (diakses 9/5/2018).
- Carino, Theresa (1995). Philippine-Cina relations in the post-Cold War. *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia*, vol. (31-32): 50-63.

- Cellos, A. (1997). *Ferdinand Marcos and the Philippines: The Political Economy of Authoritarianism*. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group.
- Chachavalpongpun, P. (2007). Why is Thailand's middle class so quick to reject democracy? *Opinion in Japan Times*, 9 January. Dalam <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/01/09/commentary/world-commentary/thailands-middle-class-quick-reject-democracy/> (diakses 17/5/2018)
- Chalk, P. (2008). The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict's Evolving Dynamic. *RAND Corporation Occasional Paper Series No. 5*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Dalam [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional\\_papers/2008/RAND\\_OP198.pdf](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf) (diaksesn17/5/2018)
- Channel News Asia (28 July 2015). PM's move to drop Muhyiddin 'drastic but bold', say analysts.
- Channel News Asia (2015, July 29). Bersih calls for August rallies in 3 states to demand PM Najib's resignation.
- Cheah, B. (2002). *Malaysia: The Making of the Nation*. Singapore: ISEAS.
- Chiang, Jeremy. (2017). Philippine Foreign Policy in the 21st Century: the Influence of Double-Asymmetric Structure. *Conference Proceeding*. International Studies Association Conference, Hong Kong. Dalam <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/e35950e1-db89-4726-b72e-671a86b59ca3.pdf> (diakses 11 Juli 2018).



- Chin, J. (2010). Malaysia: The Rise of Najib and 1 Malaysia. *Southeast Asian Affairs*, 165-179.
- Chin, J., & Wong, C. (2009). Malaysia's Electoral Upheaval. *Journal of Democracy*, 20(3), 71-85.
- Chua, B. (2008). Southeast Asia in Postcolonial Studies: an introduction. *Postcolonial Studies*, 11(3), 231-241.
- Cibulka, F. (2008). The Philippine foreign policy of the Ramos administration: The quest for security of a weak state. *Asian Journal of Political Science*, 7(1), 108-134. doi:10.1080/02185379908434139
- CNBC. (19 May 2014). Thailand's army declares martial law, says not a coup. Dalam <https://www.cnn.com/2014/05/19/rmy-declares-martial-law-says-not-a-coup.html> (diakses 16/5/2018)
- Conant, S. (Penyunt.). (2015). *The Gettysburg Address: Perspectives on Lincoln's Greatest Speech*. New York: Oxford University Press.
- Commission on Elections. (1992). Election Result.
- Commission on Elections. (1998). Election Result.
- Commission on Elections. (2004). Election Result.
- Commission on Elections. (2010). Election Result.
- Commission on Elections. (2016). Election Result.
- Croissant, A., & Dosch, J. (2001). Old Wine in New Bottlenecks? Elections in Thailand under the 1997 Constitution. *Leeds East Asia Papers* 63. Leeds, UK.
- David, S., Taliaferro, A., & Hinkle, W. (2017). Defense Governance and Management: Implementing the

- Philippine Defense Reform Program through the Defense System of Management. *IDA Paper NS P-8589*. Virginia: The Institute for Defense Analyses (IDA) .
- Department of Statistics Malaysia. (2018). Press Release: Current Population Estimates, Malaysia, 2016-2017. Kuala Lumpur: Department of Statistics Malaysia.
- Detik. (6 September 2014). SBY Anggap Jokowi Beruntung Bisa Alami Masa Transisi Kepemimpinan. Dalam <https://news.detik.com/berita/2682649/sby-anggap-jokowi-beruntung-bisa-alami-masa-transisi-kepemimpinan> (diakses 4/10/2017).
- Di Palma, G. (1990). *To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions*. California: University of California Press.
- Dove, P. (2004). *The Catastrophe of Modernity: Tragedy and the Nation in Latin American Literature*. Lewisburg, Penn: Bucknell University Press.
- Election Commission of Malaysia. (2007). Partai Yang Berdaftar Dengan SPR. Dalam <http://www.spr.gov.my/index.php/penjalanan-pilihan-raja?layout=edit&id=20#Partai-yang-berdaftar> (19/12/2017).
- Eklöf, S. (2003). *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia*. Copenhagen: NIAS Press.
- Farrelly, N. (2011). 'Counting Thailand's Coups. New Mandala. Dalam <http://www.newmandala.org/counting-thailands-coups/> (diakses 13/5/2018)

- Farrelly, N. (2013). Why democracy struggles: Thailand's elite coup culture. *Australian Journal of International Affairs*, 67(3), 281-296. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2013.788123>
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Felix, Victor. (2005). Philippine-U.S. Security Relations Challenges and Opportunities After 9/11. *USAWC Strategy Research Project*. Carlisle Barracks, Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Felker, G. (1999). Malaysia in 1998: A Cornered Tiger Bares Its Claws. *Asian Survey*, 39(1), 43-54.
- Ferrer , M. (2001). Framework for Autonomy in Southeast Asia's Plural Societies. *Working Paper on Non-Traditional Security Issues in Southeast*. Singapore: The Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University.
- Financial Times. (23 May 2014). Timeline: Thailand's coups.
- Financial Review. (9 Juni 2017). The 20 most dangerous countries in the world for tourists. Dalam <http://www.afr.com/lifestyle/travel/world/the-20-most-dangerous-countries-in-the-world-for-tourists-20170608-gwnsff> (diakses 12/5/2018)
- Fitriyah. (Tanpa Tahun). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Online-Journal*. Dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373> (diakses 29/9/2017).

- Funston, J. (2001). *Malaysia: Developmental State Challenged*. Singapore: ISEAS.
- George, C. (2016). Remembering the Philippines's People Power Revolution. *Media Asia*, 43(1), 1-6.
- Glaser, C. (2003). Structural Realism in a More Complex World. *Review of International Studies*(29), 403–414.
- GMA News. (13 Maret 2014). After 4 months, PNoy apologizes for slow govt response to Yolanda victims. Dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/352359/after-4-months-pnoy-apologizes-for-slow-govt-response-to-yolanda-victims/story/> (diakses 12/5/2018)
- GMA News. (22 Mei 2017). Duterte signs Danilo Lim's appointment papers as MMDA chief. Dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/611729/duterte-signs-danilo-lim-s-appointment-papers-as-mmda-chief/story/> (diakses 11/5/2018)
- GMA News. (23 November 2009). Most Filipinos distrust, dissatisfied with Arroyo - survey. Dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/177633/most-filipinos-distrust-dissatisfied-with-arroyo-survey/story/> (diakses 11/5/2018)
- GMA News. (30 Juni 2013). Erap takes oath as new mayor of Manila. Dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/metro/315265/erap-takes-oath-as-new-mayor-of-manila/story/> (diakses 10/5/2018)
- Gomez, C. L. (2007). Globalisation, state and g/local human rights actors Contestations between institutions and civil

- society. Dalam E. T. Gomez, *Politics in Malaysia The Malay dimension*. London: Routledge.
- Gonzales, E. (2003). People Power in the Philippines: Between Democratic Passions and the Rule of Law. *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia*, 39(1-2), 149-163.
- Gordon, N. (2010). Democracy and Colonialism. *Theory & Event*, 13(2). Dalam <https://muse.jhu.edu/article/384020> (diakses 18 Juli, 2017)
- Greene, O., & Marsh, N. (2012). *Small Arms, Crime and Conflict: Global Governance and the Threat of Armed Violence*. London and New York: Routledge.
- Habibie, B. J. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Harian Metro (29 February 2016). Tun Mahathir keluar UMNO
- Hasan, M. (2013). Masyarakat Diam-Diam Merindukan Pemimpin Gaya Orba,. *Pledoi*, 28-33.
- Hearn, S. (2008). The 2006 Coup in Thailand: Lessons for Emerging Democracies. *Strategy Research Project*. Carlisle,PA: U.S. Army War College.
- Hewison, K. (2010). Thaksin Shinawatra and the reshaping of Thai politics. *Contemporary Politics*, 16(2), 119-113.
- Hoffstaedter, G. (2012). Student Activism in Malaysia: Crucible, Mirror, Sideshow. *Asian Studies Review*, 36(4), 583-584.

- Hood, S. (1998). The Myth of Asian-Style Democracy. *Asian Survey*, 3(9), 853-866.
- House of Congress. (2016). Selection and Proclamation of National Heroes and Laws Honoring Filipino Historical Figures. Manila: Reference and Research Bureau Legislative Research Service, House of Congress. Dalam [https://web-beta.archive.org/web/20160419232121/http://www.congress.gov.ph/download/researches/rrb\\_0301\\_1.pdf](https://web-beta.archive.org/web/20160419232121/http://www.congress.gov.ph/download/researches/rrb_0301_1.pdf)
- Human Rights Watch. (1992). Bloody May: Excessive Use of Lethal Force in Bangkok The Events of May 17-20, 1992. *A Report by Asia Watch and Physicians for Human Rights*. New York: Asia Watch. Dalam <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/THAILAND.PDF> (diakses 14/5/2018)
- Human Rights Watch. (2011). Descent into Chaos Thailand's 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (28 April 2006). Thailand: Investigate Krue Se Mosque Raid. Dalam <https://www.hrw.org/news/2006/04/28/thailand-investigate-krue-se-mosque-raid> (diakses 17/5/2018)
- Huntington, S. (1991). *The third wave: democratization in the late twentieth century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. (1997). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Touchstone.

- Hussain Mohamed. (1986). *Gerakan Belia di Malaysia*. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House.
- Ikrar Nusa Bhakti. (2004). The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems. Dalam J. Rofle, *The Asia-Pacific: A Region in Transition*. Honolulu, HI: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Impro Guns. (2015). Dalam <https://homemadeguns.wordpress.com/tag/sumpak/> (diakses 11/5/2018)
- International Monetary Fund. (31 July 2003). Press Release: Thailand Completes Early Repayment of 1997 Stand-By Arrangement. *Press Release No. 03/131*. Dalam <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr03131> (diakses 14/5/2018)
- Inquirer. (3 September 2016). Abu Sayyaf disowns Davao explosion, says ally was behind attack. Dalam <http://newsinfo.inquirer.net/812451/abu-sayyaf-disowns-davao-explosion-says-ally-was-behind-attack> (diakses 12/5/2018)
- Inquirer. (5 Desember 2017). Duterte declares CPP, NPA as terrorist organizations. Dalam <https://newsinfo.inquirer.net/950017/duterte-declares-cpp-npa-as-terrorist-organizations> (diakses 12/5/2018)
- Inquirer. (7 Juli 2016). The Kill List. Dalam <http://newsinfo.inquirer.net/794598/kill-list-drugs-duterte> (diakses 12/5/2018)
- Jitpiromsri, S., & Panyasak, S. (2006). Unpacking Thailand's southern conflict: The poverty of structural

- explanations. *Critical Asian Studies*, 3(1), 95-117. doi:10.1080/14672710600556478
- Journeyman Pictures. (10 December 2013). Thailand's Simmering Buddhist-Muslim Tensions (online-video). Dalam [https://www.youtube.com/watch?v=a5TO1H5rD\\_g&t=1137s](https://www.youtube.com/watch?v=a5TO1H5rD_g&t=1137s) (diakses 17/5/2018)
- Kartasmita, G. (Penyunt.). (1981). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta.
- Kaunda, J. (1995). Malawi: The Post-Colonial State, Development, and Democracy. *Africa: Rivista Trimestrale Di Studi E Documentazione Dell'Istituto Italiano per L'Africa E L'Oriente*, 50(3), 305-24. Dalam <http://www.jstor.org/stable/40761017>
- Kaewsom, C. (2015). The Effectiveness of the Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC) in Managing the Deep South Conflict in Thailand 2006-2012: An Organizational Approach. *PhD Thesis*. Sintok, Kedah: Universiti Utara Malaysia.
- Khan, A. (2003). *A Theory of Universal Democracy: Beyond the End of History*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kislenko, A. (2002). Bending with the Wind: The Continuity and Flexibility of Thai Foreign Policy. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 57(4), 537 - 561. doi:<https://doi.org/10.1177%2F002070200205700403>
- Koh, T., & Chang, L. (Penyunt.). (2005). *The Little Red Dot: Reflections By Singapore's Diplomats*. Singapore: World Scientific.



- Komisi Pemilihan Umum. (2008). Pemilu 1999. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. Dalam <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999> (diakses 9/10/2017).
- Kompas. (3 Juli 2013). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Dalam <http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Menakar-Otonomi-Khusus-Aceh-dan-Papua-Kompas-3-Juli-2012.pdf> (diakses 2/10/2017).
- Kristiawan, R. (2013). *Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Lagon, M. (2011). *The Whys and Hows of Promoting Democracy*. New York: Council on Foreign Relations. Dalam <https://www.cfr.org/expert-brief/whys-and-hows-promoting-democracy> (diakses 29 Agustus 2017).
- Laman web untuk keperluan kursus Ekonomi Pembangun. (2009). *Politik Malaysia-Indonesia: Suatu Tinjauan*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam [http://www.harwaimun.com/asian\\_crisis.html](http://www.harwaimun.com/asian_crisis.html)
- Lasswell, H. D. (1990). *Politics Who Gets What, When and How*. Gloucester MA: Peter Smith Pub Inc.
- Laut, A., Mariano, A., Ontolan, F., Baracamonte, N., Aguado, C., & Ponce, S. (2013). Graft and Corruption Practices Among Selected Public Officials in Mindanao, Southern Philippines. *Journal of Government and Politics*, 4(2), 229-243. Dalam <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2013.0013>

- Leake, E. (2018). Spooks, Tribes, and Holy Men: The Central Intelligence Agency and the Soviet Invasion of Afghanistan. *Journal of Contemporary History*, 240-262. doi:<https://doi.org/10.1177/0022009416653459>
- Lee, K. Y. (2000). Singapore Foreign Policy. *International Studies*, 3(4), 40-60.
- Lili Yulyadi Arnakim. (2009). Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor “Co-Religio” Dalam Hubungan Dua Hala. Dalam Mohamad Redzuan Othman, et.al., *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. Shah Alam: Arah Publications.
- Liow, J. (2005). *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. London: Routledge.
- Liow, J. C., and Pasuni, A. (2010). Debating the Conduct and Nature of Malaysian Politics: Communalism and New Media Post-March 2008. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(4), 39-65.
- M. Busyro Muqoddas. (2011). *Hegemoni Rezim Intelijen*. Yogyakarta: PUSHAM, UII Yogyakarta.
- Maarif, A. S. (1988). *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1960*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- MacDonald, K. (2015-16). Eric Kaufmann’s The Rise and Fall of Anglo-America. *The Occidental Quarterly*, 15(4), 3-42.
- MacMillan, M. (2007). *Nixon and Mao: The Week that changed the World*. New York: Random House.

- Maksum, A. (2015). Gerakan Bersih dan Demokrasi Ala Malaysia. *Opini Jawa Pos 1 September*.
- Maisrikrod, S. (2008). Civil society, accountability and governance in Thailand: a dim case of participatory democracy. Dalam T. Chong, *Globalization and its Counter-forces in Southeast Asia* (hal. 97-116). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mallarangeng, R. (2008). *Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & Freedom Institute.
- Manglapus, R. (1960). The State of Philippine Democracy. *Foreign Affairs*. Dalam <https://www.foreignaffairs.com/articles/philippines/1960-07-01/state-philippine-democracy> (diakses 9/5/2018)
- Manila Bulletin. (28 Agustus 2016). Destroy Abu Sayyaf, Duterte orders gov't security forces. Dalam <https://archive.is/20160903132817/http://www.mb.com.ph/destroy-abu-sayyaf-duterte-orders-govt-security-forces/#selection-1107.1-1107.57> (diakses 12/5/2018)
- Mapping Militant Organizations. (2015). Moro National Liberation Front. Stanford, CA: Stanford University. Dalam <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/379> (diakses 12/5/2018)
- Maravall, J., & Przeworski, A. (2003). *Democracy and the Rule of Law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Maududi, A. (1960). *Political Theory of Islam*. Lahore, Pakistan: Islamic Publications.

- Mauzy, D., & Milne, R. (2002). *Singapore Politics under the People's Action Party*. London and New York: Routledge.
- McCargo, D. (2005). Network monarchy and legitimacy crises in Thailand. *The Pacific Review*, 18(4), 499-519.
- McCargo, D. (2006). The 19 September 2006 coup – preliminary thoughts on the implications for the future direction of Thai politics. *Working Paper*. Singapore: Asia Research Institute, NUS. Dalam <https://ari.nus.edu.sg/Assets/repository/files/events/McCargo%20paper%20edited.pdf> (diakses 15/5/2018)
- Merdeka.com. (4 Agustus 2014). Jimly sebut ketegangan Pilpres cuma persoalan psikologis. Dalam <https://www.merdeka.com/politik/jimly-sebut-ketegangan-pilpres-cuma-persoalan-psikologis.html> (diakses 4/10/2017).
- Merdeka.com. (8 Juni 2015). Ini foto legendaris kekalahan Soeharto oleh IMF. Dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-foto-legendaris-kekalahan-soeharto-oleh-imf.html> (diakses 27/9/2017).
- Mihradi, R. (2015). Paradoks Demokrasi Lokal. *Harian Bogor Today*, 14 Januari. Dalam [http://www.unpak.ac.id/pdf/paradok\\_demokrasi\\_lokal.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/paradok_demokrasi_lokal.pdf) (diakses 2/10/2017).
- Ming, H. (2009). Singapore-Malaysia Relations Revisited: An “English School” IR Analysis. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 11(2), 172-198.
- Moh. Mahfudz MD. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (Cet.3)*. Yogyakarta: Liberty.

- Mohd Mizan Aslam. (2008). The Southern Thailand Insurgency: Ideological and Identity Challenges. *Jati*, 13, 79-93.
- Mohd Nasir Haji Ibrahim. (2008). Persepsi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT Terhadap Pilihan Raya Umum Ke-12. *Prosiding Seminar Politik Malaysia*. Shah Alam: Universiti Teknologi MARA.
- Mohamad, M. (2002). From Nationalism to Post-Developmentalism: The Intersection of Gender, Race and Religion in Malaysia. *Macalester International*.
- Montinola, G. (1999). The Philippines in 1998: Opportunity amid Crisis. *Asian Survey*, 39(1), 64-71. Dalam <http://www.jstor.org/stable/2645595>
- Moussalli, A. (2001). *The Islamic quest for democracy, pluralism, and human rights*. Gainesville: University Press of Florida.
- Muna, M. (1999). Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda. Dalam R. Sumka, & J. Kristiadi, *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Murray, D. (1996). *Angels and Devils: Thai Politics from February 1991 to September 1992—A Struggle for Democracy?* Bangkok: White Orchid Press.
- Mutawakkil. (2009). Politik Umat Islam Indonesia: Upaya Depolitisasi Pascakemerdekaan. *Jurnal Hunafa*, 6(2), 129-138.
- National Democratic Institute. (2007). Democracy Indicators. Washington, DC: National Democratic Institute. Dalam

- [https://www.ndi.org/sites/default/files/2147\\_ww\\_democracy\\_indicators\\_040407.pdf](https://www.ndi.org/sites/default/files/2147_ww_democracy_indicators_040407.pdf) (diakses 29 Agustus 2017)
- Neher, C. (1994). Asian Style Democracy. *Asian Survey*, 34(11), 949-961.
- Nelson, M. (2006). Political Turmoil in Thailand: Thaksin, Protests, Elections, and the King. *Journal of Contemporary Eastern Asia*, 5(1), 9-25. doi:<http://dx.doi.org/10.17477/jcea.2006.5.1.009>
- Neo, J. (2014). What's In a Name? Malaysia's 'Allah' Controversy and The Judicial Intertwining of Islam with Ethnic Identity. NUS Law Working Paper Series 2014/008, June 2014. Singapore: National University of Singapore.
- New Mandala. (2 June 2014). Who's who in the Thai coup? Dalam <http://www.newmandala.org/whos-who-in-the-thai-coup/> (diakses 16/5/2018)
- New Straits Times (12 March 2016). Dr Mahathir-Lim Kit Siang declaration doesn't represent the rakyat: Najib
- Nohlen, D., Grotz, F., & Hartmann, C. (2001). *Elections in Asia and the Pacific : A Data Handbook: Volume II: South East Asia, East Asia, and the South Pacific*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Norhayati Mohd. Salleh. (2008). Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU-12): “Tsunami” Politik Melayu? *Jebat*(35), 49-64.

- NPR. (9 Desember 2013). Thai Prime Minister Dissolves Parliament, Calls New Elections. Dalam <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2013/12/09/249729649/thai-prime-minister-dissolves-parliament-calls-new-elections> (diakses 15/5/2018)
- Nucholis Madjid. (2004). *Indonesia Kita*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurana, A. C., & Muta'ali, L. (2012). Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning. *Makalah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Dalam <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/download/82/80> (diakses 3/10/2017).
- Observation Mission Report. (2001). *Election for Members of the House of Representatives in Thailand*. Bangkok: ANFREL and FORUM-ASIA.
- Official NET News. (16 Juli 2016). NET Special Report: Penelusuran Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=EqSjw4OojWw> (diakses 13/5/2018)
- Parameswaran, P. (2016). The Truth About Duterte's 'Popularity' in the Philippines. *The Diplomat*. Dalam <https://thediplomat.com/2016/10/the-truth-about-dutertes-popularity-in-the-philippines/> (diakses 12/5/2018)
- Permal, S. (2006). US-Indonesia Military Ties: An Observation. *Working Paper*. Kuala Lumpur: Centre for Maritime Security and Diplomacy, Maritime Institute of Malaysia.

- Perpustakaan Bappenas. (2014). Biaya Pemilu 2014 Rp. 16,2 T. Jakarta: Perpustakaan Bappenas. Dalam [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/115565-%5B\\_Konten\\_%5D-Biaya-MI.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/115565-%5B_Konten_%5D-Biaya-MI.pdf) (diakses 29/9/2017).
- Phongpaichit, P., & Baker, C. (1997). Power in transition: Thailand in the 1990s. Dalam K. Hewison, *Political Change in Thailand: Democracy and Participation*. New York: Routledge.
- Phil Star. (9 Mei 2000). Pimentel: CIA may be behind creation of Sayyaf. Dalam <https://www.philstar.com/headlines/2000/05/09/87930/pimentel-cia-may-be-behind-creation-sayyaf>
- Philstar. (29 April 2002). PNP: No repeat of May 1 riots. Dalam <https://www.philstar.com/headlines/2002/04/29/158977/pnp-no-repeat-may-1-riots> (diakses 11/5/2018)
- Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (1981). *Sejarah Nasional Indonesia . Jilid V* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Putzel, J. (1995). Democratization and clan politics: the 1992 Philippine elections. *SouthEast Asia Research*, 18-45.
- Quimpo, N. (2007). The US and the Southern Philippines' Quagmire . *Working Paper No.144*. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.
- Regilme Jr, S. (2018). Does US Foreign Aid Undermine Human Rights? The “Thaksinification” of the War on Terror Discourses and the Human Rights Crisis in Thailand, 2001 to 2006. *Human Rights Review*, 19(1), 73-95. Retrieved



from <https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-017-0482-2>

Raaflaub, K., Ober, J., & Wallace, R. (2007). *Origins of Democracy in Ancient Greece*. Berkeley: University of California Press.

Rakyat Merdeka Online. (12 Mei 2012). Aktivis 98 yang Salah Jalan Diajak Kembali ke Jalan yang Benar. Dalam <http://www.rmol.co/read/2011/05/12/26951/Aktivis-98-yang-Salah-Jalan-Diajak-Kembali-ke-Jalan-yang-Benar> (diakses 27/9/2017)

Ramlah Adam. (1998). *Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Rappler. (14 Januari 2016). 'Family ties' push Canada to give more Yolanda aid. Dalam <https://www.rappler.com/nation/119013-canada-philippines-yolanda-haiyan-donations> (diakses 12/5/2018) Reuters. (14 September 2008). Thai emergency lifted, search for new PM goes on. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-thailand/thai-government-security-chiefs-meet-on-emergency-rule-idUSBKK27312220080914> (diakses 15/5/2018)

Rasiah, R., Kee, C., & Doner, R. (2014). Southeast Asia and the Asian and Global Financial Crises. *Journal of Contemporary Asia*, 44(4), 572–580. Dalam <http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2014.933062>

Reid, B. (2008). Development NGOs, Semiclientelism, and the State in the Philippines: From “Crossover” to Double-crossed. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 23(1), 4-42.

- Reuters. (25 Oktober 2007). Former Philippine president Estrada pardoned. *Reuters*. Dalam <https://uk.reuters.com/article/uk-philippines-estrada-idUKMNB0007120071025> (diakses 10/5/2018)
- Reuters. (20 January 2014). Thai government considers state of emergency after weekend violence. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-thailand-protest/thai-government-considers-state-of-emergency-after-weekend-violence-idUSBREA0J09Y20140120> (diaksesn15/5/2018)
- Reyes, V. (2013). The Impact of Automation on Elections: Case Study of the May 2010 Philippine Presidential Contest. *Journal of Developing Societies*, 29(3), 259–285. doi:10.1177/0169796X13494276
- Reynolds, E. (2005). *Thailand's Secret War: The Free Thai, OSS, and SOE during World War II*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ricklefs, M. (1993). *A History of Modern Indonesia Since C. 1300*. London: Mac Millan.
- RMOL. (23 April 2014). Pasukan Nasi Bungkus Itu Punya Jokowi atau Prabowo? Dalam <http://www.rmol.co/read/2014/04/23/152340/Pasukan-Nasi-Bungkus-Itu-Punya-Jokowi-atau-Prabowo-> (diakses 5/10/2017).
- Rood, S. (1992). Non-Government Organizations and the 1992 Philippine Elections. *Philippine Political Science Journal*, 17(33-36), 97-119. doi:<https://doi.org/10.1080/01154451.1992.9754178>

- Roumasset, J. (2008). *The Political Economy of Corruption: A Philippine*. Working Paper No. 08-05. Manoa: University of Hawaii.
- Santos, L. (2013). Elevating NGOs role key to developing society in the Philippines. *Opinion*. Dalam <https://www.devex.com/news/elevating-ngos-role-key-to-developing-society-in-the-philippines-81960> (diakses 9/5/2018)
- Saneyha, N. (2015). Evaluation of Thailand's Democracy: Steps to Consolidation. *PhD Thesis*. Stuttgart: Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung der Universität Stuttgart.
- Saravanamuttu, J. (2010). *Malaysia's Foreign Policy The First Fifty Years: Alignment, Neutralism, Islamism*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Sawasdee, S. (2012). Thailand. Dalam T. Inoguchi, & J. J. Blondel, *Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia* (hal. 143-164). New York: Palgrave Macmillan.
- Schafferer, C. (2008). Parliamentary election in Thailand, 23 December 2007. *Electoral Studies*, xxx, 1-4.
- Schneier, E. (2009). Reformasi and the Indonesian 'War on Terror': State, Military and Legislative-Executive Relations in an Emerging Democracy. *The Journal of Legislative Studies*, 15(2-3), 294-313.
- Schofield, C., & Storey, I. (2005). Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Disputes. *Harvard Asia Quarterly*, 9(4). Dalam

- <http://www.asiaquarterly.com/content/view/160/> (diakses 4/10/2017).
- Schumpeter, J. (1983). *The Theory of Economic Development*. New York: Transaction Press.
- Shamsul AB. (1996). Nations-of-Intent in Malaysia. Dalam S. Tonnesson, & H. Antlov, *Asian Forms of the Nation* (hal. 323-47). London: Curzon and Nordic Institute of Asian Studies.
- Sinar Harian (12 August, 2016). 'Apa salah Pas, Umno bersatu'
- Sinar Harian (15 August 2016). Umno, Pas dilihat perlu bersatu demi Islam
- Siregar, I. (2003). Sejarah dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Thaqafiyat*, 14(1), 88-103.
- Smith, A. (2003). U.S.-Indonesia Relations: Searching for Cooperation in the War against Terrorism. *Asia-Pacific Center for Security Studies*, 2(2), 1-4.
- Sobri Sudin, & Mohd. Hafidz Hussein. (2002). *Globalisasi & Budaya Politik di Malaysia*. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.
- St. John, R. (1998). The Land Boundaries of Indochina: Cambodia, Laos and Vietnam. *Boundary and Territory Briefing Vol. 2 No. 6*. Durham, UK: University of Durham.
- Storey, I. (2007). Malaysia's Role in Thailand's Southern Insurgency. *Terrorism Monitor*, 5(5). Dalam <https://jamestown.org/program/malaysias-role-in-thailands-southern-insurgency/> (diakses 17/5/2018)

- Straits Times. (29 Agustus 2016). Drug users not human, killing them justified: Duterte. Dalam <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/drug-users-not-human-killing-them-justified-duterte> (diakses 12/5/2018)
- Straits Times. (6 April 2017). Thailand's new Constitution: What you need to know. Dalam <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailands-new-constitution-what-you-need-to-know> (diakses 16/5/2017)
- Sudarsono, J. (1979). Indonesia and the United States, 1966–1975: an inquiry into a de facto alliance association. *Ph.D. Thesis*. London: London School of Economics and Political Science.
- Suhadi. (8 Juli 2014). Rekonsiliasi dan Cegah Konflik, Agenda Mendesak Pasca Pilpres. *Opini CSIS*. Dalam <http://crccs.ugm.ac.id/id/opini/1305/rekonsiliasi-dan-cegah-konflik-agenda-mendesak-pasca-pilpres-2.html> (diakses 5 Oktober 2017).
- Suhrki, A. (1971). Smaller-Nation Diplomacy: Thailand's Current Dilemmas. *Asian Survey*, 11(5), 429-444.
- Sukma, R. (2003). Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 14-18 Juli*. Bali.
- Sukma, R. (2009). Indonesia-Cina Relations: The Politics of Re-engagement. *Asian Survey*, 49(1), 591-608.
- Tadman, K. (2013). An American Provocation: U.S. Foreign Policy during the Soviet-Afghanistan War.

- Western Illinois Historical Review*, V, 31-65. Dalam <http://www.wiu.edu/cas/history/wihr/pdfs/Tadman-AnAmericanProvocationVol5.pdf>
- The Age. (7 October 2008). Thai PM jumps fence to flee protesters. Dalam <https://www.theage.com.au/world/thai-pm-jumps-fence-to-flee-protesters-20081007-4vsn.html> (diakses 15/5/2018)
- The Daily Tribune. (22 Februari 2006). Small Setback. Dalam <https://web.archive.org/web/20070928020715/http://www.tribune.net.ph/20060222/commentary/20060222com5.html> (diakses 11/5/2018)
- The Economist. (15 April 2010). Angels with bloody hands. Dalam <https://www.economist.com/node/15908365> (diakses 15/5/2018)
- The Malaysian Insight. (7 Januari 2018). Pakatan sahkan Dr Mahathir calon PM sebelum Anwar diampun. Dalam <https://www.themalaysianinsight.com/bahasa/s/31284/>
- The Malay Mail (2 October 2016). Posthumous Maal Hijrah award for Haron Din
- The Nation. (25 June 2006). Prem disagrees with proposed use of Malay as official language. Dalam [https://web.archive.org/web/20110605044334/http://nationmultimedia.com/2006/06/25/headlines/headlines\\_30007268.php](https://web.archive.org/web/20110605044334/http://nationmultimedia.com/2006/06/25/headlines/headlines_30007268.php) (diakses 17/5/2018)
- The Nation. (17 March 2009). Letter of Lee Jones. Dalam [https://web.archive.org/web/20140106091539/http://www.nationmultimedia.com/2009/03/12/politics/politics\\_30097786.php](https://web.archive.org/web/20140106091539/http://www.nationmultimedia.com/2009/03/12/politics/politics_30097786.php) (diakses 15/5/2018)

- The Nation. (21 October 2011). Disaster warning issued for Bangkok. Dalam <http://www.nationmultimedia.com/politics/Disaster-warning-issued-for-Bangkok-30168212.html> (diakses 15/5/2018)
- The New York Times. (20 May 1995). Thai Government Collapses In a Land-Reform Scandal. Dalam <https://www.nytimes.com/1995/05/20/world/thai-government-collapses-in-a-land-reform-scandal.html> (diakses 14/5/2018)
- The New York Times. (10 November 1999). Longtime I.M.F. Director Resigns in Midterm. Dalam <http://www.nytimes.com/1999/11/10/business/international-business-longtime-imf-director-resigns-in-midterm.html> (diakses 27/9/2017).
- The Star. (7 May 2014). Court removes Thai PM from office, deputy Niwattumrong Boonsongpaisan appointed caretaker. Dalam <https://www.thestar.com.my/news/regional/2014/05/07/court-removes-thai-pm-from-office/> (diakses 15/5/2018)
- The Star (3 August 2015). MACC: RM2.6bil in Najib's account from donors, not 1MDB's
- The Star (3 December 2016). Najib: Rohingya rally proof Umno and PAS united on common issues
- The Sun Daily (6 January 2016). UMNO and PAS cooperation good for Islam and unity
- The Washington Post . (3 December 2013). Thailand has had more coups than any other country. This is why.

- The Wall Street Journal (2 July 2015). Investigators Believe Money Flowed to Malaysian Leader Najib's Accounts Amid 1MDB Probe
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 881-894.
- Unger, D. (2009). Thaksin's Time Atop Thailand's Politics May Be Over. *Asia Pacific Bulletin No. 30*. Washington: East-West Center. Dipetik 5 15, 2018, dari <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb030.pdf?file=1&type=node&id=32318>
- US Department of State. (2016). Thailand 2016 International Religious Freedom Report. *International Religious Freedom Report for 2016*. Washington, DC: US Department of State. Dalam <https://www.state.gov/documents/organization/269014.pdf> (diakses 17/5/2018)
- US Department of Veterans Affairs. (2018). Thailand Military Bases. Washington, D.C.: US Department of Veterans Affairs. Dalam <https://www.vets.gov/disability-benefits/conditions/exposure-to-hazardous-materials/agent-orange/thailand-military-bases/> (diakses 13/5/2018)
- US Embassy Seoul. (2017). Democracy in Brief. Seoul: US Embassy Seoul. Dalam [https://kr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/75/2017/04/Democracy-in-Brief\\_kor.pdf](https://kr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/75/2017/04/Democracy-in-Brief_kor.pdf) (diakses 18 Juli 2017)
- Utusan Malaysia. (7 Mei 2013). Apalagi orang Cina Mahu? Dalam [http://ww1.utusan.com.my/utusan/Pilihan\\_](http://ww1.utusan.com.my/utusan/Pilihan_)



- Raya/20130507/px\_03/Apa-lagi-orang-Cina-mahu (diakses 6 Januari 2018).
- Walker, Ben. (2016). *Demanding Dictatorship? US-Philippine Relations, 1946-1972. Ph.D. Thesis*. Manchester, UK: The University of Manchester.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- Wan Haslan K, and Indriaty Ismail. (2014). *Kalimah Allah Menurut Perbahasan Linguistik dan Teologi*. Paper presented at the Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Da'wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective, Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, UKM, Bangi, Selangor, Malaysia.
- Wu, F. (2008). Singapore's Sovereign Wealth Funds: The Political Risk of Overseas Investments. *Working Paper No. 166*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies. Dalam <https://www.files.ethz.ch/isn/92196/WP166.pdf> (diakses 14/5/2018)
- Yathip, P. (2015). Thailand's Foreign Policy in the post-Cold War period: uncovering new actors in the foreign policy-making process toward neighbouring countries. *PhD Thesis*. Queensland, Australia: James Cook University.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 156-166.
- Yoshifumi, T. (1995). *Coups in Thailand, 1980-1991: Classmates, Internal Conflicts and Relations with the*

Government of the Military. *Southeast Asian Studies*, 33(3), 317-339. Dalam <https://kyoto-seas.org/pdf/33/3/330303.pdf>

Zeeman, R. (2012). *Colonization and Post-Colonial Democracy Development in Indonesia and Malaysia. MA Thesis*. Tilburg, Netherlands: Tilburg University.



## GLOSARIUM

- Angkatan ke-V : Angkatan Bersenjata yang terdiri dari Buruh dan Tani atas usulan Partai Komunis Indonesia (PKI)
- BERSIH : Kelompok demonstran di Malaysia anti pemerintahan rezim Najib Razak yang dipimpin Anwar Ibrahim dan oposisi
- G30S/PKI : Peristiwa berdarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 30 September 1965 yang mengorbankan para pahlawan revolusi dan kemudian dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila
- Geopolitik : Politik internasional yang secara spesifik diartikan sebagai upaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam batas geografi tertentu misalnya Asia Tenggara, Eropa atau seluruh dunia dalam konteks kebijakan luar negeri
- Indo-China : Wilayah yang merujuk kepada Asia Tenggara daratan terdiri dari Myanmar,

	Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia Semenanjung dan Singapura.
Jiran	: Tetangga dalam bahasa Melayu
Junta militer	: Pemerintahan diktator yang dipimpin oleh kalangan militer sebuah negara
Konfrontasi	: Kebijakan Presiden Sukarno untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia
Krismon	: Krisis Moneter istilah yang sangat terkenal ketika tahun 1998 untuk menggambarkan sulitnya kehidupan ekonomi rakyat
Lengser	: Istilah Bahasa Jawa yang artinya turun tahta
Multikulturalisme	: Ideologi yang menekankan masyarakat menerima terhadap keberagaman baik agama, suku, jenis kelamin dan lain-lain
Orde Baru	: Rezim kepemimpinan Suharto tahun 1967-1998
Orde Lama	: Rezim kepemimpinan Sukarno tahun 1945-1967
Pakatan	: Istilah koalisi politik di Malaysia
People power	: Gelombang aksi yang dilakukan oleh masyarakat luas menuntut pengunduran diri seorang pemimpin di Filipina dan sudah menjadi istilah umum termasuk di Indonesia

- Perang Dingin : Perang ideologi antara Amerika Serikat yang mengusung ideologi kapitalis dan sekutunya melawan Uni Soviet dan sekutunya dengan ideologi komunis antara tahun 1947-1991
- Putrajaya : Pusat pemerintahan Malaysia yang merupakan kantor Perdana Menteri
- Sekulerisme : Pemisahan antara urusan politik dan urusan agama
- Tanah Melayu : Negara dan pemerintahan Melayu sebelum pembentukan Federasi Malaysia
- Ummah : Istilah umat Islam di Malaysia



## INDEX

### Symbols

1 Malaysia 66, 79, 80, 83, 184

1MDB x, xi, 66, 83, 84, 85,  
87, 91, 97, 206, 207

### A

Abhisit Vejjajiva 154, 155,  
157

Abraham Lincoln 3

Abul A'la Maududi 5

Abu Sayyaf 122, 129, 190,  
194, 198

Ahmad Dahlan 2

al-huququq al shari'iyya 5

al-hurriyya 5

Anwar Ibrahim 75, 76, 77,  
78, 85, 87, 88, 94, 97,  
179, 211

Arab Saudi 3

Aristotle 4, 179

Arroyo 112, 113, 114, 115,  
116, 119, 177, 187

Asia Tenggara ii, iii, iv, vi,  
vii, viii, ix, 1, 6, 7, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,  
26, 27, 30, 32, 33, 65, 68,  
69, 73, 74, 99, 101, 102,  
108, 110, 120, 136, 162,  
169, 170, 171, 173, 174,  
175, 211

AUKU xi, 22

### B

Barisan Nasional xi, 21, 74,  
85

Bhumibol Adulyadej 160

Black May 141

Boedi Oetomo 2, 9

Bosnia-Herzegovina 54

### C

Choun Enlai 68

CIA 129, 199

Cleisthenes 3



## D

davao 190

Dekrit Presiden 20, 25

Don Mueang International  
Airport 153

Duterte 102, 115, 120, 121,  
122, 123, 124, 125, 130,  
170, 178, 187, 190, 194,  
198, 204

## F

Ferdinand Marcos 8, 24,  
100, 121, 174, 183

Filipina iii, x, 8, 15, 23, 24,  
25, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 107, 108,  
110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 119, 120, 121,  
122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 129, 130, 131,  
162, 163, 169, 170, 171,  
172, 173, 198, 212

## G

G30S/PKI xii, 30, 211

Gerakan Non-Blok xii, 30  
gotong-royong 6, 38, 46

## H

Habibie 23, 31, 34, 35, 48,

55, 59, 77, 188

Hanura 49

Hasyim Asy'ari 2, 11

## I

ICMI xii, 31, 53, 54, 77

ijma 5

Islamic State of Lanao 122

Istana Malacanang 113

## J

Jenderal Hijau 54

Jenderal Merah 54

Jihad 129

John Lock 51

Jokowi 48, 50, 51, 52, 185,  
201

Joko Widodo 48, 49

Joseph Estrada 108, 109,  
110, 118

Joze Rizal 8

Jusuf Kalla 49, 50

## K

Ki Hajar Dewantara 2

KKN xii, 33, 34, 76

Koalisi Indonesia Hebat xii,  
49

Koalisi Merah Putih xii, 49

kolusi 33, 76, 130, 131, 171

- korupsi vii, 6, 16, 26, 33, 41, 47, 76, 79, 80, 83, 104, 111, 114, 130, 131, 137, 138, 143, 146, 148, 149, 150, 168, 169, 170, 171, 172, 175
- kudeta militer vii, 24, 25, 133, 137, 138, 139, 143, 151, 152, 158, 160, 161, 172
- M**
- Mahathir x, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 173, 174, 181, 188, 197, 205
- Mao Zedong 68
- Marawi iii, 124, 130, 170, 178
- Masyumi 2, 20, 54, 203
- Michael Camdessus 36
- MILF xiii, 111, 122
- MNLF xiii, 107, 111, 122, 127, 128, 129
- Muhammadiyah vi, 2, 10, 54, 217
- Muslim Mindanao xi, 99, 108, 128
- N**
- Nahdhatul Ulama xiii, 2, 11, 54
- Najib Razak 79, 81, 83, 87, 93, 97, 211
- NasDem 49
- O**
- One-Cina Policy 101
- P**
- Partai Demokrat 32, 49, 142
- Partai Gerindra 49
- Partai Golkar 49
- Partai PAN 49
- Partai PKS 49
- Partai PPP 49, 152
- PDI-P 49
- people power 8, 112, 113
- Pilkada DKI 51, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 171
- PKB xiv, 49, 55
- Prabowo 49, 50, 51, 52, 201
- Prabowo Subianto 49
- Prayuth Chan-ocha 155, 159, 160, 161
- PULO xiv, 164
- R**
- Ramos 99, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 181,

182, 184  
Red Shirts 153, 155  
Richard Nixon 68

**S**

Samuel Huntington 4  
Sarekat Islam xv, 9, 11, 178  
Seruan Azhar 13  
shura 5  
Spratly 102  
Sukarno 2, 19, 20, 48, 212  
Suvarnabhumi Airport 153

**T**

Taman Siswa 2  
Thailand iii, vi, vii, x, xv, 24,  
25, 33, 133, 134, 135,  
136, 137, 138, 139, 141,  
143, 145, 146, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153,  
154, 155, 156, 157, 158,  
159, 160, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168,  
169, 170, 171, 172, 173,  
178, 180, 181, 182, 183,  
184, 185, 186, 188, 189,  
190, 191, 194, 195, 196,  
197, 198, 199, 201, 202,  
203, 204, 206, 207, 208,  
212

Thailand Selatan x, 133, 134,  
137, 151, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 168, 170,  
172  
Thaksin Shinawatra 137,  
146, 147, 156, 157, 164,  
188  
theodemocracy 5  
Timor Leste 18, 19, 32  
Tjokroaminoto 12  
Two-Cina Policy 101

**U**

umat Islam iii, iv, vii, 9, 31,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 63, 88, 91, 97,  
100, 125, 127, 134, 162,  
163, 169, 170, 171, 173,  
175, 213  
UMNO xv, 12, 13, 21, 22, 73,  
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  
84, 85, 87, 88, 90, 91, 92,  
93, 94, 97, 171, 188, 206  
USAID 105

**Y**

Yellow Shirts 153, 155

## BIODATA PENULIS



**Ali Maksum, PhD.** lahir di Ponorogo Jawa Timur adalah alumni TA PSM Bogem, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bogem Sampung Ponorogo, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sampung Ponorogo, Sekolah Menengah Umum 2 (SMU 2) Ponorogo, Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia, dan Universiti Sains Malaysia (USM) Penang Malaysia. Saat ini bekerja dan tinggal di Yogyakarta sebagai pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pernah menjadi peneliti untuk *Japan-Related Research Project, The Sumitomo Foundation Japan*. Menjadi *Visiting Scholar* di *National Chengchi University Taiwan* didanai *2018 Taiwan Fellowship*. Tulisannya banyak dimuat di media nasional misalnya *The Jakarta Post*, Koran Sindo, Jawa Pos termasuk jurnal nasional dan internasional. Penulis bisa dihubungi melalui:

Email : [ali.maksum@fisipol.umy.ac.id](mailto:ali.maksum@fisipol.umy.ac.id)

Facebook : <https://www.facebook.com/ali.maksumaja>

Twitter : @alimcsum

Instagram : @alimaksumradjudin

